

Laporan Perekonomian

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Agustus 2025

Laporan Perekonomian

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Agustus 2025





Publikasi ini dapat diakses secara online pada:
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx>

Salinan publikasi dalam bentuk *hardcopy* dapat diperoleh di:

Fungsi Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Gajah Mada No. 1

Samarinda 75122, Kalimantan Timur

Telp: 0542 - 741 022, 741 023

Fax: 0542 - 732 644

Kata Pengantar

Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan hasil asesmen perkembangan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Laporan ini memuat informasi terkini mengenai kondisi ekonomi makro daerah, keuangan pemerintah, inflasi, stabilitas sistem keuangan daerah, sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan kesejahteraan, serta prospek perekonomian ke depan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi *stakeholders* baik untuk tujuan penyusunan kajian, sosialisasi maupun perumusan kebijakan.

Secara umum, ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan II 2025 tumbuh 4,69% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan ekonomi Kaltim di periode pelaporan didorong oleh LU industri pengolahan yang terakselerasi didorong terutama oleh industri refinery minyak dan gas (migas), *Crude Palm Oil* (CPO), dan *fertilizers*. Peningkatan kinerja ketiga industri pengolahan tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja ekspor hasil minyak, CPO, dan *fertilizers* yang turut mendorong komponen ekspor di sisi pengeluaran. Lebih lanjut, peningkatan kinerja pengolahan CPO juga sejalan dengan peningkatan kinerja LU pertanian yang diperkirakan didorong oleh panen kelapa sawit seiring peningkatan produktivitas dan luas panen akibat pemupukan yang lebih baik. Kinerja positif ekonomi Kaltim ini juga sejalan dengan inflasi Kaltim yang masih terjaga di tengah berakhirnya diskon tarif listrik yang meningkatkan tekanan inflasi di triwulan II 2025. Selain itu, stabilitas sistem keuangan di Kaltim masih terjaga didukung oleh tingkat risiko yang rendah, di tengah kinerja penyaluran kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang termoderasi. Adapun dari sisi sistem pembayaran, transaksi sistem pembayaran melalui infrastruktur Bank Indonesia tumbuh positif, didukung perkembangan pembayaran

nontunai digital retail melalui Uang Elektronik (UE) dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Analisis dalam laporan ini menggunakan berbagai data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan dan laporan survei, *focus group discussion* (FGD), serta *liaison* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Data dimaksud juga termasuk hasil pengolahan berbagai data sekunder dan informasi yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari kalangan Pemerintah maupun swasta. Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Laporan ini juga merupakan salah satu wujud dari hubungan kemitraan strategis yang telah terjalin dengan baik dan semoga dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua dalam upaya mengembangkan ekonomi Kalimantan Timur guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya menuju Indonesia maju.

Samarinda, Agustus 2025
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ttd.

Budi Widihartanto
Kepala Perwakilan

VISI BANK INDONESIA

- Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju.

MISI BANK INDONESIA

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

NILAI-NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA

- Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas (*trust and integrity*); (ii) profesionalisme (*professionalism*); (iii) keunggulan (*excellence*); (iv) mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan (v) koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).

KATA PENGANTAR	iii
VISI BANK INDONESIA	iv
MISI BANK INDONESIA	iv
NILAI-NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xvii

I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH	1	3.3. Program Pengendalian Inflasi Daerah	40
1.1. Gambaran Umum	2	3.3.1. Keterjangkauan Harga	40
1.2. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha	2	3.3.2. Ketersediaan Pasokan	41
1.3. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran	8	3.3.3. Kelancaran Distribusi	41
		3.3.4. Komunikasi Efektif	41
II. KEUANGAN PEMERINTAH DI DAERAH	21	IV. PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM	43
II.1. Gambaran Umum	22	4.1. Gambaran Umum	44
II.2. Realisasi Pendapatan dan Belanja Provinsi	23	4.2. Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan Daerah	44
II.3. Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	26	4.2.1. Perkembangan Penyaluran Kredit dan Dana Pihak Ketiga	44
II.4. Realisasi Pendapatan dan Belanja APBN Wilayah Kaltim	27	4.2.2. Perkembangan Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Syariah	48
III. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH	33	4.2.3. Asesmen Stabilitas Keuangan Korporasi di Kaltim	51
3.1. Gambaran Umum	34	4.2.4. Asesmen Stabilitas Keuangan Rumah Tangga	52
3.1.1. Perkembangan Inflasi Daerah Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	35	4.2.5. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Pemerintah Daerah	53
3.1.2. Perkembangan Inflasi Daerah Berdasarkan Kabupaten/Kota IHK	36	4.3. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM	54
3.2. Tracking Inflasi Triwulan III 2025	38	4.3.1. Perkembangan Kredit UMKM Spasial	55

Daftar isi

V. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 57

5.1. Gambaran Umum	58
5.2. Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan	
Bank Indonesia	58
5.2.1. Perkembangan Transaksi <i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS)	59
5.2.2. Perkembangan Transaksi Sistem Kliring	
Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	60
5.2.3. Perkembangan Transaksi BI-FAST	60
5.3. Sistem Pembayaran Non Tunai Ritel	61
5.3.1. Perkembangan Transaksi APMK	61
5.3.2. Perkembangan Transaksi Uang	
Elektronik	63
5.3.3. Perkembangan Transaksi QRIS	64
5.4. Pengelolaan Uang Rupiah	65

VI. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN 69

6.1. Gambaran Umum	70
6.2. Ketenagakerjaan	70
6.3. Kesejahteraan	72

VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 77

7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi	78
7.2. Prospek Inflasi	80

DAFTAR ISTILAH 83

TIM PENYUSUN LAPORAN 85

Daftar Tabel

I. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Tabel I.1	Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Triwulan II 2025 Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy)	3
Tabel I.2	Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Triwulan II 2025 Berdasarkan Pengeluaran (yoy)	9
Tabel I.3	Realisasi Belanja APBD Kaltim	15
Tabel I.4	Realisasi Belanja APBN Kaltim	15

I. Keuangan Pemerintah Di Daerah

Tabel II.1.	Realisasi Keuangan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur	23
Tabel II.2.	Realisasi APBD Pemprov Kaltim Triwulan II	23
Tabel II.3.	Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltim Triwulan II 2024 dan 2025	24
Tabel II.4.	Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan II 2024 dan 2025	26
Tabel II.5.	Realisasi Belanja APBD Kabupaten /Kota Kaltim s.d Triwulan II 2024 dan 2025	27
Tabel II.6	Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/ Kota Kaltim s.d Triwulan II 2024 dan 2025	28
Tabel II.7.	Realisasi Pendapatan dan Belanja APBN di Kalimantan Timur s.d Juni 2025	28
Tabel II.8	Realisasi Penyaluran Dana Desa per Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur Triwulan I 2025	31

III. Perkembangan Inflasi Daerah

Tabel II.1.	Realisasi Keuangan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur	22
Tabel II.2.	Realisasi APBD Pemprov Kaltim Triwulan II	23
Tabel II.3.	Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan II 2024 dan 2025	24

Tabel II.4.	Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan II 2024 dan 2025	25
Tabel II.5.	Realisasi Belanja APBD Kabupaten /Kota Kaltim s.d Triwulan II 2024 dan 2025	26
Tabel II.6	Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Kaltim s.d Triwulan II 2024 dan 2025	27
Tabel II.7.	Realisasi Pendapatan dan Belanja APBN di Kalimantan Timur s.d Juni 2025	28
Tabel II.8	Realisasi Penyaluran Dana Desa per Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur Triwulan I 2025	30

VI. Ketenagakerjaan Dan Kesejahteraan

Tabel VI.1	Angkatan Kerja dan Pengangguran Kaltim	70
Tabel VI.2	Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	71
Tabel VI.3	Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltim	72
Tabel VI.4	Persentase Komoditas Makanan terhadap GKM	74
Tabel VI.5	Persentase Komoditas Nonmakanan terhadap GKNM	74

VII. Prospek Perekonomian Daerah

Tabel VII.1	Proyeksi Pertumbuhan Global dan Domestik	78
Tabel VII.2	Proyeksi Inflasi Global dan Domestik	80

Daftar Grafik

I. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Grafik I.1	Pertumbuhan Ekonomi Kaltim, Kalimantan & Nasional Triwulan II 2025	2
Grafik I.2	Pertumbuhan 5 (lima) Lapangan Usaha Utama pada Triwulan II 2025	3
Grafik I.3	Pangsa PDRB Kaltim Triwulan II 2025 Berdasarkan Lapangan Usaha*)	3
Grafik I.4	Perkembangan Produksi Batu Bara Kaltim	4
Grafik I.5	Perkembangan Curah Hujan Kaltim	4
Grafik I.6	Perkembangan Volume Ekspor Batu Bara Kaltim Triwulan II 2025	5
Grafik I.7	Perkembangan Produksi Batu Bara Tiongkok	5
Grafik I.8	Perkembangan Produksi Listrik Tiongkok	5
Grafik I.9	Perkembangan Kredit Pertambangan Kaltim Berdasarkan Lokasi Proyek	5
Grafik I.10	Perkembangan Nilai Ekspor Hasil Minyak	6
Grafik I.11	Perkembangan Indeks Produksi LNG dan LPG	6
Grafik I.12	Indeks Produksi Pupuk	6
Grafik I.13	Perkembangan Volume Ekspor Sejumlah Produk Industri Unggulan di Kaltim	6
Grafik I.14	Perkembangan Pagu Anggaran IKN	7
Grafik I.15	Perkembangan Kredit Konstruksi di Kaltim	7
Grafik I.16	Perkembangan Nilai Konstruksi Terdistribusi di Kaltim	7
Grafik I.17	Perkembangan Kredit Konstruksi di Kaltim	7
Grafik I.18	Indeks Penjualan Riil Kaltim	7
Grafik I.19	Total Bongkar dan Muat Pelabuhan di Kaltim	7
Grafik I.20	Perkembangan NTP Subsektor	8
Grafik I.21	Perkembangan Harga TBS	8
Grafik I.22	Perkembangan NTP, IT, dan IB Kaltim	8
Grafik I.23	Pertumbuhan 5 (lima) Komponen Pengeluaran Utama Kaltim pada Triwulan II 2025 (% yoy)	9
Grafik I.24	Pangsa PDRB Kaltim Berdasarkan Pengeluaran Triwulan II 2025	9
Grafik I.25	Perkembangan Nilai Ekspor Beberapa Komoditas Nonmigas Unggulan Kaltim	10

Grafik I.26	Perkembangan Harga CPO Kaltim	10
Grafik I.27	Perkembangan Harga Plywood (Kayu Lapis)	10
Grafik I.28	Perkembangan Harga Urea	10
Grafik I.29	Perkembangan Ekspor Nonmigas Kaltim	11
Grafik I.30	Perkembangan Ekspor Batu bara Kaltim	11
Grafik I.31	Perkembangan Ekspor Migas Kaltim	11
Grafik I.32	Perkembangan Nilai Impor Migas Kaltim	11
Grafik I.33	Perkembangan Nilai Impor Migas Berdasarkan Jenis Barang	12
Grafik I.34	Perkembangan Nilai Impor Nonmigas Kaltim	12
Grafik I.35	Perkembangan Nilai Impor Nonmigas Berdasarkan Jenis Barang	12
Grafik I.36	Perkembangan Realisasi APBN IKN	13
Grafik I.37	Penanaman Modal Asing (PMA) Kaltim	13
Grafik I.38	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kaltim	13
Grafik I.39	Perkembangan Realisasi APBN IKN	14
Grafik I.40	Realisasi belanja Operasional APBD Kaltim	14
Grafik I.41	Realisasi belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa APBD Kaltim	14
Grafik I.42	Realisasi belanja Hibah dan Bantuan Sosial APBD Kaltim	15

II. Keuangan Pemerintah Di Daerah

Grafik II.1	Komponen Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltim (dalam %)	24
Grafik II.2	Derajat Otonomi Fiskal Pemprov Kaltim	25
Grafik II.3	Derajat Otonomi Fiskal Pemerintah Kab/ Kota	25
Grafik II.4	Komponen Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan II 2024 dan 2025 (dalam %)	26
Grafik II.5	Kinerja Pendapatan APBN Kaltim	28
Grafik II.6	Kinerja Realisasi Belanja Modal APBN Kaltim	29
Grafik II.7	Kinerja Realisasi Belanja Barang APBN Kaltim	29
Grafik II.8	Kinerja Realisasi Belanja K/L APBN Kaltim	29

III. Perkembangan Inflasi Daerah

Grafik III.1	Inflasi Kaltim dan Nasional	34
Grafik III.2	Kelompok Utama Pendorong Inflasi Kaltim	34
Grafik III.3	Perbandingan Inflasi Gabungan Kota IHK di seluruh Provinsi di Kalimantan, triwulan I 2025 dan triwulan II 2025	34
Grafik III.4	Inflasi Samarinda, Balikpapan, Berau, dan PPU	35
Grafik III.5	Inflasi Tahunan (<i>year-on-year</i> , yoy) Kaltim	38
Grafik III.6	Inflasi Bulanan (<i>month-to-month</i> , mtm) Kaltim	38

IV. Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan Dan Umkm

Grafik IV.1	Perkembangan Kredit Kaltim dan Nasional	45
Grafik IV.2	Perkembangan Kredit Kaltim Berdasarkan Penggunaannya	45
Grafik IV.3	Pangsa Penyaluran Kredit Berdasarkan Debitur	45
Grafik IV.4	Perkembangan NPL Kredit Kaltim Berdasarkan Penggunaannya	45
Grafik IV.5	Perkembangan Kredit Sektoral Kaltim	46
Grafik IV.6	Share Kredit Kaltim Berdasarkan Sektor	46
Grafik IV.7	Perkembangan NPL Kaltim Berdasarkan Sektor	46
Grafik IV.8	Pertumbuhan Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim	47
Grafik IV.9	Perkembangan NPL Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim	47
Grafik IV.10	Pangsa Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Kaltim	47
Grafik IV.11	Perkembangan DPK Kaltim dan Nasional	47
Grafik IV.12	Perkembangan DPK Kaltim Berdasarkan Sumbernya	48
Grafik IV.13	Pangsa DPK Kaltim Berdasarkan Sumber	48
Grafik IV.14	Pangsa DPK Kaltim Berdasarkan Golongan Nasabah	48
Grafik IV.15	Perkembangan DPK Perseorangan Kaltim	48

Grafik IV.16	Perkembangan Pembiayaan Syariah Kaltim	49
Grafik IV.17	Perkembangan Pangsa Pembiayaan Syariah Kaltim	49
Grafik IV.18	Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan	49
Grafik IV.19	Perkembangan NPF Kaltim Berdasarkan Penggunaannya	49
Grafik IV.20	Pertumbuhan Pembiayaan Syariah Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim	49
Grafik IV.21	Perkembangan NPF Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim	50
Grafik IV.22	Pangsa Pembiayaan Syariah Spasial Kabupaten/Kota di Kaltim	50
Grafik IV.23	Perkembangan DPK Syariah Kaltim	50
Grafik IV.24	Perkembangan DPK Syariah Kaltim berdasarkan Komponen Pembentuk	50
Grafik IV.25	Pangsa DPK Syariah Kaltim berdasarkan Komponen Pembentuk	51
Grafik IV.26	Pangsa DPK Syariah dan Non Syariah Kaltim	51
Grafik IV.27	Perkembangan Kredit Korporasi Kaltim	51
Grafik IV.28	Perkembangan NPL Korporasi Kaltim	51
Grafik IV.29	Perkembangan DPK Korporasi Kaltim	52
Grafik IV.30	Perkembangan DPK Korporasi Kaltim Berdasarkan Komponennya	52
Grafik IV.31	Pangsa DPK Korporasi Kaltim	52
Grafik IV.32	Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltim	52
Grafik IV.33	Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaannya	53
Grafik IV.34	NPL Kredit Rumah Tangga Kaltim	53
Grafik IV.35	NPL Kredit Rumah Tangga Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaannya	53
Grafik IV.36	Perkembangan DPK Pemerintah Daerah Kaltim	53
Grafik IV.37	Perkembangan DPK Pemerintah Daerah Kaltim Berdasarkan Komponennya	53
Grafik IV.38	Pangsa DPK Pemerintah Daerah Kaltim Berdasarkan Komponennya	54

Grafik IV.39 Perkembangan Kredit UMKM Kaltim dan Nasional	54
Grafik IV.40 Perkembangan Kredit UMKM Kaltim berdasarkan Jenis Penggunaan	54
Grafik IV.41 Perkembangan NPL UMKM Kaltim	54
Grafik IV.42 Perkembangan NPL UMKM Kaltim berdasarkan Jenis Penggunaan	55
Grafik IV.43 Pertumbuhan Kredit UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim	55
Grafik IV.44 Perkembangan NPL UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim	55
Grafik IV.45 Pangsa Kredit UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Kaltim	55

V. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah

Grafik V.1 Perkembangan Nominal Transaksi Melalui Sistem Pembayaran Bank Indonesia di Provinsi Kaltim	58
Grafik V.2 Perkembangan Volume Transaksi Melalui Sistem Pembayaran Bank Indonesia di Provinsi Kaltim (% yoy)	59
Grafik V.3 Transaksi Melalui Sistem Pembayaran Bank Indonesia di Kaltim Berdasarkan Infrastruktur	59
Grafik V.4 Perkembangan Nominal Transaksi RTGS di Provinsi Kaltim	59
Grafik V.5 Perkembangan Volume Transaksi RTGS di Provinsi Kaltim	59
Grafik V.6 Perkembangan Nominal Transaksi SKNBI di Provinsi Kaltim	60
Grafik V.7 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI di Provinsi Kaltim	60
Grafik V.8 Perkembangan Nominal Transaksi BI-FAST di Provinsi Kaltim	60
Grafik V.9 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI di Provinsi Kaltim	60
Grafik V.10 Perkembangan Nominal Transaksi APMK di Kaltim	61

Grafik V.11 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI di Provinsi Kaltim	61
Grafik V.12 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Provinsi Kaltim	62
Grafik V.13 Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit di Provinsi Kaltim	62
Grafik V.14 Distribusi Nominal Transaksi Kartu Kredit di Provinsi Kaltim	62
Grafik V.15 Distribusi Volume Transaksi Kartu Kredit di Provinsi Kaltim	62
Grafik V.16 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu ATM/Debit di Provinsi Kaltim	63
Grafik V.17 Perkembangan Volume Transaksi Kartu ATM/Debit di Provinsi Kaltim	63
Grafik V.18 Distribusi Nominal Transaksi Kartu ATM/Debit di Provinsi Kaltim Triwulan II 2025	63
Grafik V.19 Distribusi Volume Transaksi Kartu ATM/Debit di Provinsi Kaltim Tw I 2025	63
Grafik V.20 Perkembangan Nominal Transaksi Uang Elektronik di Provinsi Kaltim	64
Grafik V.21 Perkembangan Volume Transaksi Uang Elektronik di Provinsi Kaltim	64
Grafik V.22 Perkembangan Jumlah Akun Uang Elektronik di Provinsi Kaltim	64
Grafik V.23 Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kaltim	65
Grafik V.24 Jumlah <i>Merchant</i> QRIS di Provinsi Kaltim	65
Grafik V.25 Perkembangan Nominal Transaksi QRIS di Provinsi Kaltim	65
Grafik V.26 Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Provinsi Kaltim	65
Grafik V.27 Pengedaran Uang Kartal di Provinsi Kaltim	65
Grafik V.28 Uang Kartal di Provinsi Kaltim - Spasial	66
Grafik V.29 <i>Dropping</i> ULE dan <i>inflow</i> UTLE	66
Grafik V.30 Penarikan Uang Tidak Layak Edar di Provinsi Kaltim	66
Grafik V.31 Penarikan Uang Tidak Layak Edar terhadap <i>Inflow</i> di Provinsi Kaltim	66

VI. Ketenagakerjaan Dan Kesejahteraan

Grafik VI.1	Perbandingan TPT Kaltim dan Provinsi Lainnya di Kalimantan	71
Grafik VI.2	Perbandingan TPAK Kaltim dan Provinsi Lainnya di Kalimantan	71
Grafik VI.3	Tenaga Kerja Kaltim Berdasarkan Sektor Formal dan Informal	72
Grafik VI.4	Perbandingan Proporsi Tenaga Kerja Formal dan Informal Seluruh Provinsi di Kalimantan	72
Grafik VI.5	Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Timur	73
Grafik VI.6	Perbandingan Rasio Gini Seluruh Provinsi di Kalimantan	73

Grafik VI.7	Garis Kemiskinan Kalimantan Timur	73
Grafik VI.8	Pertumbuhan GKM dan GKNM	73
Grafik VI.9	Perkembangan NTP, IT, dan IB Kaltim	74
Grafik VI.10	Perkembangan NTP Sub Sektor Pertanian	74

VII. Prospek Perekonomian Daerah

Grafik VII.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kaltim 2025	79
Grafik VII.2	Proyeksi Inflasi Kaltim 2025	81

Daftar Gambar

Gambar I.1	Pertumbuhan Ekonomi Tiap Provinsi di Kalimantan Triwulan II 2025	2
Gambar III.1	Peta Prakiraan Curah Hujan Kaltim September 2025	39

Gambar III.2	Peta Prakiraan Daerah Potensi Banjir Kaltim September 2025	40
Gambar III.3	Peta Anomali Suhu Muka Laut Dasarian I Agustus 2025	40



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

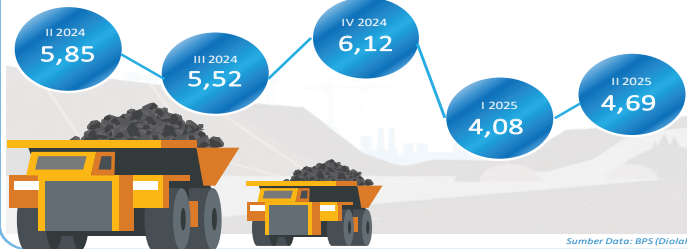


<https://tinyurl.com/LPPKaltim>

INFOGRAFIS

PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR – TRIWULAN II 2025

PERTUMBUHAN EKONOMI



Sumber Data: BPS (Dialah)

FAKTOR PENDORONG

- LU industri pengolahan meningkat disebabkan oleh akselerasi kinerja industri refinery migas secara year-on-year pasca revamp pabrik di tahun lalu. Selain itu, pengolahan Crude Palm Oil (CPO), industri pupuk, dan bahan kimia organik juga diprakirakan meningkat.
- Komponen ekspor terakselerasi didorong utamanya oleh peningkatan ekspor CPO, bahan kimia organik dan fertilizers untuk kelompok nonmigas serta hasil minyak untuk kelompok migas.

FAKTOR PENAHAN

- LU konstruksi terkontraksi secara year-on-year seiring high baseline di triwulan II 2024 akibat percepatan pembangunan IKN untuk mengejar kesiapan menjelang HUT RI ke-79 di IKN tahun lalu.
- Konsumsi pemerintah terkontraksi di sisi pengeluaran PDRB seiring belanja barang dan jasa yang terkontraksi secara year-on-year seiring kebijakan efisiensi belanja pemerintah

SISTEM PEMBAYARAN

Transaksi Tunai

Net inflow
Rp258 M

Transaksi Non Tunai

Transaksi SP BI
Nominal
6,10%
(yoy)
Volume
22,6%
(yoy)

QRIS
Nominal
173%
(yoy)
Volume
248%
(yoy)

Uang Elektronik

Nominal
8,74%
(yoy)
Volume
27,9%
(yoy)

user
816.111
merchant
715.038



INFLASI

KELOMPOK PENYUMBANG

MAKANAN, MINUMAN & TEMBAKAU
2,64
(%yoy)

PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA
5,67
(%yoy)

Komoditas andil Inflasi yoy

1. Emas Perhiasan
2. Kopi Bubuk
3. Minyak Goreng
4. Sigaret Kretek Mesin
5. Beras

Kaltim **1,62%** (yoy)

Samarinda **1,77%** (yoy)

Balikpapan **1,77%** (yoy)

Berau **0,77%** (yoy)

Penajam Paser Utara **1,26%** (yoy)

Komoditas andil deflasi yoy

1. Bensin
2. Angkutan Udara
3. Sabun Detergen Bubuk
4. Pengharum ruangan
5. Sabun cair/cuci piring

Sumber Data: BPS (Dialah)



KESEJAHTERAAN & KETENAGAKERJAAN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

66,40%
(Februari 2025)

Tingkat Pengangguran Terbuka

5,33%
(Februari 2025)

Tingkat Kemiskinan

5,17
(Maret 2025)

Rasio Gini

0,312
(Maret 2025)

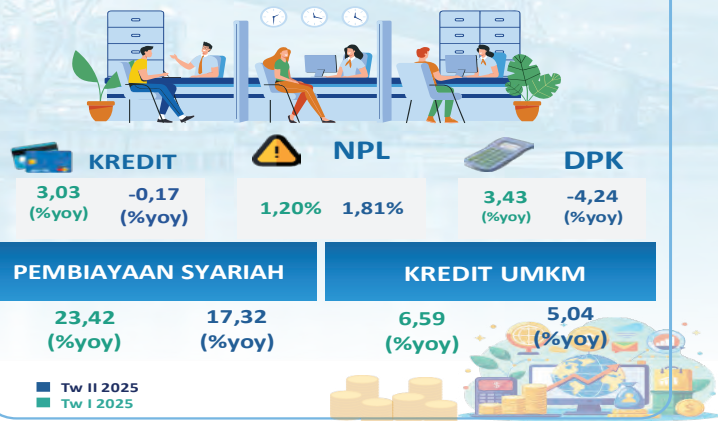
Nilai Tukar Petani

144,75
(Triwulan II 2025)

Sumber Data: BPS (Dialah)



SISTEM KEUANGAN



PROSPEK PEREKONOMIAN

PERTUMBUHAN EKONOMI

2025
Diprakirakan berada pada rentang
5,00 – 5,80% (yoy)

Ekonomi Kaltim diprakirakan akan termoderasi dibandingkan tahun sebelumnya seiring permintaan ekspor batu bara yang relatif stagnan serta termoderasinya progress pembangunan proyek pemerintah dan IKN. Meski demikian, LU Industri Pengolahan diprakirakan tumbuh tinggi dan menahan perlambatan yang lebih rendah seiring ekspansinya industri pengolahan baru, seperti CPO, smelter, dan penambahan kapasitas pabrik refinery migas.

INFLASI

2025
Diprakirakan berada pada rentang target
2,5±1%

Di tengah tingginya tekanan inflasi global dan potensi tekanan permintaan domestik, inflasi kaltim diprakirakan akan tetap terjaga dalam rentang target. Hal tersebut didorong oleh prakiraan termoderasinya tekanan inflasi pangan seiring terkendalinya ekspektasi masyarakat serta upaya pengendalian inflasi yang masif oleh TPID Kaltim.

Tabel Indikator Makroekonomi

PERTUMBUHAN EKONOMI

Komponen PDRB	2022				2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	I	II
	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	andil %yoy	share %
PDRB TOTAL	2,40	3,62	5,34	6,47	6,99	6,89	5,30	5,76	7,26	5,85	5,52	6,12	4,08	4,69	4,69	100,00
Berdasarkan Lapangan Usaha																
Pertanian	-0,15	2,80	2,92	2,27	2,96	1,19	2,35	3,49	3,77	3,04	-1,24	3,95	5,85	8,66	0,54	9,65
Pertambangan	1,68	2,77	3,69	5,74	5,09	5,21	3,26	7,17	10,47	6,24	5,65	4,93	-0,61	-0,13	-0,06	34,11
Industri Pengolahan	1,64	3,67	3,63	5,31	7,00	4,97	7,05	0,12	-0,47	-1,99	-0,15	3,58	8,36	15,12	2,75	20,32
Listrik dan Gas	3,43	3,63	-2,04	10,09	19,57	20,06	16,57	9,39	17,09	18,96	18,74	11,33	6,51	5,05	0,00	0,07
Air	8,42	9,96	5,03	7,11	7,09	6,47	7,89	9,05	9,12	8,79	6,76	6,32	5,23	6,41	0,00	0,06
Konstruksi	3,95	6,85	9,28	10,71	16,73	20,47	14,22	12,63	12,26	17,28	13,98	11,11	3,87	-0,11	-0,01	11,48
Perdagangan	4,92	4,56	7,66	9,98	9,91	7,44	6,22	4,11	6,34	8,89	9,32	9,66	12,99	9,91	0,61	7,54
Transportasi dan Pergudangan	8,23	11,12	13,91	14,40	11,81	13,81	8,81	4,36	5,59	5,26	10,12	11,69	13,36	6,58	0,21	4,75
Akomodasi dan Makan Minum	7,65	7,37	13,05	8,66	7,66	6,84	7,63	8,59	9,18	11,88	12,05	13,19	13,73	9,97	0,10	1,21
Informasi dan Komunikasi	8,53	8,63	7,64	7,19	6,89	8,03	8,06	4,62	5,54	7,41	8,75	9,95	8,96	4,96	0,14	1,58
Jasa Keuangan	8,76	2,74	16,02	10,05	12,99	20,26	2,44	12,60	6,54	3,40	9,69	6,99	3,71	1,78	0,03	1,87
Real Estate	2,04	1,67	2,32	4,01	4,67	4,64	5,04	3,22	3,74	5,13	5,98	8,60	8,61	7,54	0,06	0,85
Jasa Perusahaan	4,13	4,19	6,95	6,09	9,21	6,89	4,62	6,06	6,69	6,53	7,91	9,03	6,50	9,89	0,02	0,24
Adm. Pemerintahan	2,98	-3,23	27,15	6,39	8,34	12,94	0,78	10,48	14,19	25,86	13,87	12,37	13,26	1,72	0,04	2,48
Jasa Pendidikan	-0,94	1,22	7,79	6,12	4,88	4,97	3,77	5,74	5,16	5,89	3,98	6,25	6,19	6,96	0,10	1,93
Jasa Kesehatan dan Sosial	3,84	4,02	4,64	6,87	6,73	8,96	7,56	4,42	3,73	4,07	5,73	6,23	8,46	8,72	0,07	0,99
Jasa lainnya	4,74	5,05	9,97	8,15	7,16	8,31	8,79	7,60	5,69	9,58	13,81	13,48	12,22	13,96	0,08	0,86
Berdasarkan Penggunaan																
Konsumsi Rumah Tangga	1,41	2,23	5,02	4,99	5,08	5,13	4,52	5,22	5,27	5,16	4,48	4,36	5,33	4,58	0,67	17,91
Konsumsi LNPRT	3,10	2,99	4,40	1,68	5,02	5,94	0,53	11,02	18,12	14,85	4,97	7,63	-1,63	3,92	0,02	0,56
Konsumsi Pemerintah	2,85	-0,48	13,88	13,09	26,10	37,82	38,42	38,15	14,75	26,19	5,37	5,29	5,58	-18,64	-0,82	4,57
PMTB	5,12	2,43	5,81	8,32	11,80	14,76	11,17	8,58	7,29	9,69	9,22	7,04	2,29	1,72	0,51	35,47
Perubahan Inventori	-87,87	-28,20	993,37	813,79	894,46	-7,07	70,95	-38,51	48,28	43,88	77,85	-117,31	-91,86	-83,74	-0,08	0,02
Ekspor	1,90	2,21	4,92	5,52	10,92	4,76	1,62	6,03	7,14	5,56	6,90	7,47	6,23	7,18	7,86	117,39
Impor*)	2,42	-0,25	5,12	5,81	17,97	7,50	2,58	10,37	6,95	8,48	9,82	8,40	7,41	5,89	3,47	75,94

*)Sejak tahun 2020, perhitungan PDRB ekspor impor mengalami perubahan dari komponen ekspor luar negeri (LN), impor luar negeri (LN), dan net ekspor antar daerah (AD) menjadi komponen ekspor dan impor.

sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah

EKSPOR DAN IMPOR

Ekspor dan Impor	2022				2023				2024				2025	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy
EKSPOR TOTAL	50,96	101,78	59,35	15,38	29,29	-33,02	-44,89	-31,87	-25,44	-5,66	-2,71	5,92	-12,30	-22,43
Ekspor Migas	407,97	170,75	98,97	12,77	32,58	-21,58	-18,93	-26,00	-11,50	4,51	-39,61	33,22	-10,45	-30,43
Ekspor Nonmigas	41,77	97,77	56,66	15,66	28,99	-33,93	-47,14	-32,49	-26,76	-6,62	2,20	2,76	-12,51	-21,58
TOTAL IMPOR	131,83	34,88	113,58	38,85	19,24	17,98	-8,63	-5,88	-18,59	-21,24	-6,75	1,14	21,54	6,58
Impor Migas	583,05	53,55	294,17	47,61	30,58	18,77	-3,55	2,64	-16,89	-22,47	-15,47	-4,58	26,3	8,04
Impor Nonmigas	10,93	9,20	9,71	20,57	0,53	15,79	-19,15	-27,67	-22,23	-17,80	14,75	21,92	10,66	2,73

Sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah

INFLASI

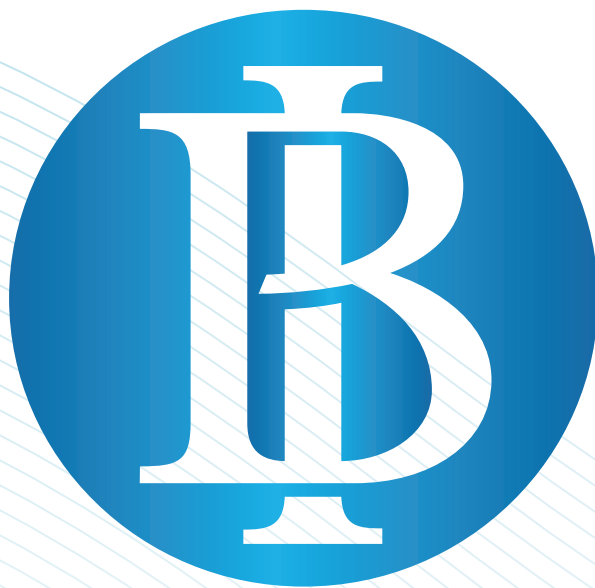
	2022				2023				2024				2025	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Kaltim	2,86	4,38	5,69	5,35	5,24	3,76	3,06	3,46	3,03	2,99	2,16	1,47	1,36	1,62
Samarinda	2,58	3,97	5,27	5,22	5,03	3,67	3,14	3,37	2,84	2,88	1,79	1,50	1,29	1,77
Balikpapan	3,23	4,93	6,26	5,52	5,51	3,87	2,96	3,60	2,95	3,00	2,31	1,11	1,38	1,77
Berau									4,05	3,67	3,34	2,69	1,71	0,77
PPU									3,18	2,36	1,73	1,25	1,19	1,26
Nasional	2,64	4,35	5,95	5,51	4,97	3,52	2,28	2,61	3,05	2,51	1,84	1,57	1,03	1,87
Kalimantan	3,37	4,97	6,37	5,94	5,44	3,85	2,64	2,79	2,75	2,55	1,92	1,56	1,22	
Kalsel	3,65	5,95	7,35	6,99	6,56	4,29	2,72	2,43	2,58	2,34	1,98	1,05	1,20	1,81
Kalbar	3,13	4,31	5,71	6,30	5,06	4,10	2,26	2,02	2,51	2,28	1,79	1,72	0,93	1,20
Kalteng	4,34	6,40	8,12	6,32	5,63	3,55	1,88	2,64	2,72	2,22	1,45	1,03	1,33	1,06
Kaltara	4,61	5,17	6,64	4,74	4,17	2,91	2,16	2,44	2,62	2,39	1,74	1,30	1,23	1,38

*) Sejak tahun 2024, perhitungan Inflasi Kaltim menggunakan SBH 2022

umber: BPS Provinsi Kaltim, diolah

PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Kinerja Perbankan dan Sistem Pembayaran	2022				2023				2024				2025	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy
DPK dan ASET														
Dana Pihak Ketiga (KC/KCP)	13,60	19,23	12,87	24,75	25,69	17,39	18,53	6,45	6,09	8,52	5,08	8,67	3,43	-4,24
Giro	34,77	58,45	35,50	88,58	57,92	23,62	28,35	-6,95	3,47	6,43	0,01	5,76	-8,41	-21,14
Tabungan	12,66	11,79	11,11	11,05	10,81	10,96	9,26	9,50	13,69	10,68	11,21	11,62	9,77	7,46
Deposito	1,49	0,83	-3,37	-6,41	21,36	20,48	21,82	23,16	-1,67	7,83	2,56	7,35	6,83	-2,08
KREDIT														
Penyaluran Kredit (Lokasi Proyek)	15,15	22,14	33,71	19,28	19,22	16,34	10,93	12,60	9,52	5,54	7,25	4,05	3,03	-0,17
NPL (%)	3,40	2,82	2,60	1,77	1,44	1,38	1,32	1,11	1,28	1,17	1,24	1,08	1,2	1,81
Berdasarkan Jenis Penggunaan														
Modal Kerja	9,28	13,82	48,41	41,11	20,46	21,45	1,22	17,53	25,20	18,08	18,89	2,44	-1,32	-9,47
Investasi	25,93	37,34	36,90	10,37	21,90	14,97	19,00	9,10	-1,39	-5,65	-3,43	1,23	2,55	2,6
Konsumsi	1,61	3,76	6,78	8,52	10,16	11,14	9,53	11,99	12,49	13,46	15,52	14,92	13,03	11,8
Berdasarkan Sektor Ekonomi														
Pertanian	35,15	40,99	27,73	4,19	11,52	-0,42	-1,39	-8,66	-6,76	-4,25	-3,08	2,81	-1,12	-4,44
Pertambangan	59,37	107,21	195,36	89,99	44,00	34,04	4,33	40,74	23,81	5,39	21,74	-9,36	-8,16	-20,52
Industri	53,97	37,99	51,58	36,70	56,02	66,26	65,11	18,56	17,32	11,72	-24,48	-8,82	-13,99	-9,72
Konstruksi	-6,96	-9,58	18,31	2,55	-0,97	-0,16	0,18	-2,60	3,48	3,31	2,98	-3,50	-6,03	-6,23
LGA	-1,19	1,54	489,67	3,88	-0,28	-2,24	-0,43	-2,36	1,72	1,94	50,44	56,32	56,62	51,91
PHR	-2,85	-1,10	7,51	7,01	13,40	18,28	19,91	11,14	7,72	3,37	6,46	3,36	-0,76	-2,28
Trans & Kom	-16,53	-12,15	-48,50	21,21	29,15	35,60	57,76	39,48	36,99	32,63	21,92	59,00	66,93	62,66
J. Keuangan, R.E. dan J. Usaha	-23,12	-5,28	11,75	-0,27	3,81	-11,93	-14,97	4,09	-2,26	-2,87	-11,41	-25,32	63,47	79,53
Lainnya	13,88	16,07	14,80	24,67	22,19	21,00	19,32	17,22	7,34	8,96	13,15	24,76	-50,65	-52,66
Rumah Tangga (Penerima Kredit Non LU)	1,11	2,86	6,62	7,11	9,46	10,72	8,96	11,59	12,10	12,60	15,13	14,32	20,15	19,47
SISTEM PEMBAYARAN														
Inflow	-24,47	-16,88	10,08	21,74	29,90	19,89	18,43	3,41	61,27	-18,57	-1,59	-6,36	-1,31	-4,78
Outflow	10,20	-7,45	19,91	14,25	27,35	22,54	-1,20	15,02	-46,25	-58,84	8,48	19,08	4,04	-49,31
Net	-53,68	12,96	49,42	11,61	35,01	26,76	-44,62	19,49	13,28	56,17	54,54	27,42	418,16	-503,97



Halaman ini sengaja dikosongkan



RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Agustus 2025

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan II 2025 tumbuh 4,69% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan ekonomi Kaltim di periode pelaporan didorong oleh LU industri pengolahan yang terakselerasi didorong terutama oleh industri *refinery* minyak dan gas (migas), *Crude Palm Oil* (CPO), dan *fertilizers*. Peningkatan kinerja ketiga industri pengolahan tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja ekspor hasil minyak, CPO, dan *fertilizers* yang turut mendorong komponen ekspor di sisi pengeluaran. Lebih lanjut, peningkatan kinerja pengolahan CPO juga sejalan dengan peningkatan kinerja LU pertanian yang diperkirakan didorong oleh panen kelapa sawit seiring peningkatan produktivitas dan luas panen akibat pemupukan yang lebih baik. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh LU konstruksi yang berkontraksi seiring normalisasi progress pembangunan IKN pasca percepatan di tahun 2024. Selain itu, LU pertambangan juga masih berkontraksi sejalan dengan produksi batu bara yang turun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, serta permintaan batu bara dari negara mitra dagang utama yang masih tertahan seiring tingginya produksi domestik negara mitra di tengah terbatasnya kebutuhan seiring peralihan ke energi terbarukan. Adapun dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah juga berkontraksi seiring penurunan belanja operasional akibat kebijakan efisiensi belanja pemerintah pasca Inpres No.1 Tahun 2025¹ yang menahan realisasi belanja barang dan jasa.

KEUANGAN PEMERINTAH DI DAERAH

Pada triwulan II 2025, kinerja keuangan pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan, sejalan dengan menurunnya konsumsi pemerintah. Realisasi pendapatan pemerintah mencakup APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota tercatat sebesar Rp16,93 triliun atau 30,82% dari total pagu 2025, turun dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp27,30 triliun atau 42,60% dari pagu 2024, penurunan ini diakibatkan oleh menurunnya pendapatan asli daerah (PAD), pajak dalam negeri (PBB dan PPN), serta dampak kebijakan refocusing dan blokir anggaran. Realisasi belanja juga menurun menjadi Rp27,37 triliun atau 34% dari total pagu 2025 dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2024 mencapai Rp35,42 triliun atau sebesar 30% dari pagu, dipengaruhi oleh penurunan pagu anggaran pemerintah akibat refocusing anggaran pemerintah pusat termasuk dana transfer serta kebijakan efisiensi belanja barang, dan penurunan alokasi belanja modal IKN.

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Inflasi Kaltim terjaga dalam rentang target inflasi nasional dan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi Kaltim pada triwulan II 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2025 karena bertepatan dengan momen Idul Adha dan libur sekolah yang berdampak pada peningkatan permintaan serta berakhirnya diskon tarif listrik² di Triwulan II 2025. Namun demikian, laju inflasi yang lebih tinggi tertahan

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2025, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025
2. Kebijakan diskon tarif listrik diberikan oleh Pemerintah pada bulan Januari dan Februari 2025. Diskon diberikan sebesar 50% kepada rumah tangga dengan daya Listrik hingga 2.200 VA.

oleh penyesuaian harga BBM yang mengalami penurunan pada bulan Juni 2025. Secara spasial, inflasi Kabupaten/Kota Kaltim tertinggi tercatat di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda sebesar 1,77% (yoy) dan terendah di Kabupaten Berau sebesar 0,77% (yoy), dengan tren laju inflasi di seluruh Kabupaten/Kota meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya kecuali Kabupaten Berau.

PEMBIAYAAN DI DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

Meskipun mengalami perlambatan kinerja, fungsi intermediasi perbankan di Kaltim masih didukung oleh tingkat risiko yang rendah. Penyaluran kredit di Kaltim pada triwulan II 2025 berkontraksi sebesar 0,17% (yoy), setelah tumbuh positif pada periode sebelumnya sebesar 3,03% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, perlambatan kredit Kaltim pada periode laporan terjadi seiring dengan kontraksi kredit modal kerja, sejalan dengan optimisme pelaku usaha yang cenderung menurun akibat peningkatan risiko geopolitik. Adapun secara sektoral, tercatat pertumbuhan kredit sektor utama Kaltim-pertambangan mengalami kontraksi paling dalam sejalan dengan perlambatan di PDRB-nya. Di tengah perlambatan kinerjanya, risiko kredit Kaltim masih terjaga rendah diindikasikan oleh rasio NPL yang berada di bawah *threshold* 5%.

Sejalan dengan pertumbuhan kredit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) turut mengalami perlambatan utamanya disebabkan oleh kontraksi DPK pemerintah di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Namun demikian, di tengah perlambatan kredit secara umum, inklusivitas keuangan Kaltim tumbuh stabil dengan risiko kredit yang rendah mencerminkan ketahanan sektor UMKM Kaltim.

SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Transaksi sistem pembayaran di Kalimantan Timur melanjutkan tren pertumbuhan pada triwulan II-2025, didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi pada triwulan II-2025. Dari sisi nominal, transaksi melalui infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia juga mengalami pertumbuhan, sebesar 6,10% (yoy). Hal tersebut didorong utamanya oleh akselerasi penggunaan BI-FAST dan RTGS yang mengalami peningkatan secara nominal masing-masing sebesar 14,83% (yoy) dan 1,29% (yoy). Sementara nominal transaksi melalui SKNBI mengalami kontraksi sebesar 16,14% (yoy) sejalan dengan pergeseran preferensi masyarakat terhadap penggunaan BI-FAST sebagai sistem pembayaran non tunai yang dinilai lebih cepat, mudah diakses, aman dan berbiaya rendah. Pada transaksi sistem pembayaran ritel, nominal transaksi QRIS mencatat pertumbuhan sebesar 178% (yoy) seiring minat masyarakat yang terus meningkat pada sistem pembayaran digital. Sementara itu transaksi APMK dan Uang Elektronik dari sisi nominal juga mengalami pertumbuhan, masing-masing sebesar 2,24% (yoy) dan 8,74% (yoy). Sementara itu dari sisi transaksi tunai, aliran uang kartal di Kaltim berada dalam posisi net inflow sebesar Rp258 miliar, seiring dengan meningkatnya aliran uang masuk yang sejalan dengan normalisasi konsumsi masyarakat, pasca HBKN Idul Fitri pada triwulan I-2025.

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Sejalan dengan kinerja ekonomi yang masih cukup tinggi, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan turut menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja beberapa sektor utama seperti sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan saat ini masih menjadi pendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut tercermin dari peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan yang membaik tersebut, kesejahteraan masyarakat juga lebih baik, terindikasi dari penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan ketimpangan pendapatan. Namun demikian, tingkat kesejahteraan petani menurun pada periode laporan.

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Di tengah perlambatan ekonomi global imbas perluasan tarif resiprokal Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada 2025 diperkirakan tetap tumbuh di bawah titik tengah kisaran 5,00 - 5,80% (yoy). Faktor penahan pertumbuhan ekonomi tersebut utamanya masih dipengaruhi oleh permintaan ekspor batu bara yang relatif stagnan, termoderasinya proyek pemerintah dan IKN. Kendati demikian, LU industri pengolahan diperkirakan semakin membaik seiring mulai beroperasinya sejumlah pabrik refinery migas dan semakin ekspansifnya industri CPO. Seiring dengan meredanya tekanan inflasi global dan menguatnya nilai tukar Rupiah, Inflasi tahunan Kaltim di tahun 2025 diperkirakan tetap berada dalam koridor target dikisaran $2,5 \pm 1\%$ (yoy) disertai dengan upaya pengendalian inflasi yang konsisten dan intensif untuk mencapai stabilitas harga komoditas utama di Kaltim.



Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 1

Perkembangan Ekonomi Makro di Daerah



RINGKASAN EKSEKUTIF

- Ekonomi Kalimantan Timur periode triwulan II 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, namun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional Kalimantan.
- Dari sisi lapangan usaha, peningkatan kinerja industri pengolahan khususnya pada komoditas unggulan seperti migas, CPO, dan *fertilizers* menjadi pendorong utama kinerja pertumbuhan ekonomi Kaltim. Meski demikian, LU Konstruksi yang berkontraksi seiring normalisasi progress pembangunan IKN pasca percepatan di tahun 2024, turunnya produksi batu bara sebagai dampak lemahnya permintaan batu bara global menjadi faktor penahan pertumbuhan ekonomi Kaltim di triwulan laporan.
- Dari sisi pengeluaran, peningkatan produksi produk utama industri unggulan mendorong komponen ekspor Kaltim meningkat pada triwulan laporan. Disisi lain, tertahannya kinerja *progress* fisik IKN di periode laporan menjadi faktor penahan utama kinerja pertumbuhan ekonomi Kaltim dari sisi pengeluaran.

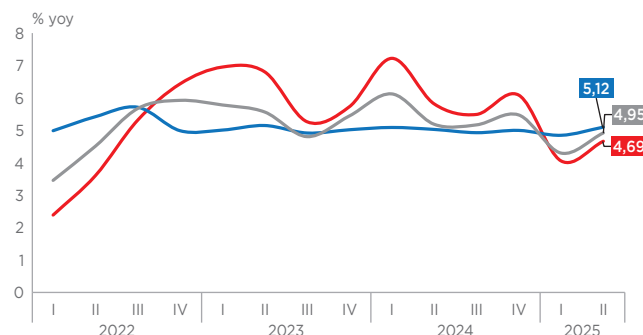


1.1. GAMBARAN UMUM

Ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan II 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, meski masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi Kaltim tercatat sebesar 4,69% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 4,08% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan kondisi ekonomi nasional yang juga meningkat dari 4,87% (yoy) di triwulan lalu, menjadi 5,12% (yoy) di triwulan II 2025. Hal yang sama juga terjadi di ekonomi regional Kalimantan yang juga meningkat dari 4,32% (yoy) di triwulan lalu, menjadi 4,95% (yoy) di triwulan II 2025 (Grafik I.1). Meski pertumbuhan ekonomi Kaltim di periode laporan lebih rendah dibandingkan ekonomi regional Kalimantan dan Nasional, namun pangsa ekonomi Kaltim masih tertinggi diantara provinsi Kalimantan lainnya, yakni 46,58% (Gambar I.1).

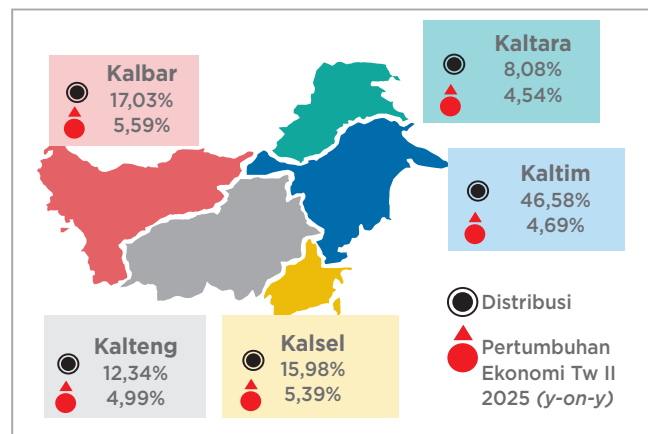
Peningkatan ekonomi Kaltim triwulan II 2025 didorong utamanya oleh kinerja Lapangan Usaha (LU) industri pengolahan dan pertanian, serta ekspor dari sisi pengeluaran. Peningkatan kinerja LU industri pengolahan disebabkan oleh kinerja industri *refinery* minyak dan gas (migas) yang meningkat secara *year-on-year* pasca *revamp* kilang di tahun lalu. Selain itu, pengolahan *Crude Oil* (CPO) dan industri pupuk juga diperkirakan meningkat, sejalan dengan peningkatan ekspor kedua komoditas tersebut yang turut mendorong komponen ekspor di sisi pengeluaran. Sejalan

Grafik I.1 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim, Kalimantan & Nasional Triwulan II 2025



Sumber: BPS, diolah

Gambar I.1 Pertumbuhan Ekonomi Tiap Provinsi di Kalimantan Triwulan II 2025



Sumber: BPS, diolah

dengan CPO yang mendorong LU Industri Pengolahan, kinerja LU Pertanian juga didorong oleh perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh LU Pertambangan dan Konstruksi dari sisi lapangan usaha, serta komponen belanja pemerintah yang berkontraksi.

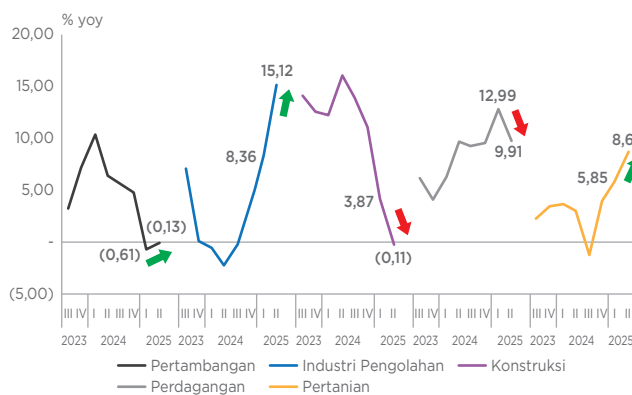
1.2. PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN LAPANGAN USAHA

Dari sisi lapangan usaha, peningkatan kinerja ekonomi Kaltim pada periode triwulan II 2025 didorong utamanya oleh Lapangan Usaha (LU) industri pengolahan dan pertanian, di tengah LU pertambangan dan konstruksi yang berkontraksi dan LU perdagangan yang melambat (Grafik I.2). Peningkatan kinerja LU industri pengolahan disebabkan oleh kinerja industri *refinery* minyak dan gas (migas) yang meningkat secara *year-on-year* pasca *revamp* pabrik di tahun lalu. Selain itu, pengolahan *Crude Oil* (CPO), industri pupuk, dan bahan kimia organik juga diperkirakan meningkat, sejalan dengan peningkatan ekspor ketiga komoditas tersebut. Sejalan dengan CPO yang mendorong LU Industri Pengolahan, kinerja LU Pertanian juga didorong oleh perkebunan kelapa sawit. Selain subsektor perkebunan, subsektor tanaman hortikultura juga diperkirakan meningkat seiring tibanya musim panen cabai, serta subsektor kehutanan yang juga diperkirakan meningkat

sejalan dengan peningkatan permintaan produk olahan kayu. Adapun LU perdagangan melambat pasca perayaan *festive* HBKN Idul Fitri di triwulan sebelumnya yang secara *seasonal* meningkatkan aktivitas perdagangan dan konsumsi masyarakat. Sementara itu, LU konstruksi terkontraksi akibat terbatasnya progress pembangunan fisik IKN di tahun 2025 pasca tingginya realisasi di tahun sebelumnya. LU pertambangan juga terkontraksi

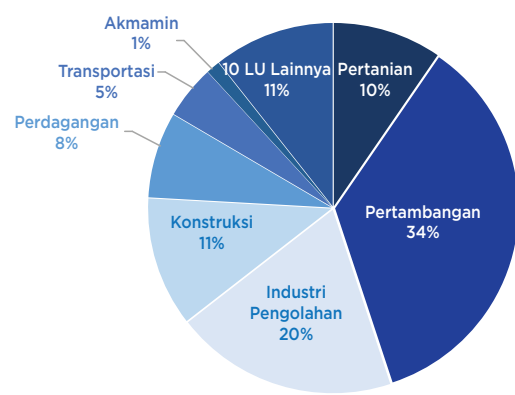
pada periode laporan didorong oleh belum pulihnya permintaan batu bara dari negara mitra dagang utama yang melemah sejak awal tahun 2025. Tingginya produksi domestik negara mitra di tengah terbatasnya kebutuhan seiring peralihan ke energi terbarukan menjadi penyebab utama penurunan permintaan batu bara negara mitra dagang utama provinsi Kaltim.

Grafik I.2 Pertumbuhan 5 (lima) Lapangan Usaha Utama pada Triwulan II 2025



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.3 Pangsa PDRB Kaltim Triwulan II 2025 Berdasarkan Lapangan Usaha*)



Sumber: BPS, diolah

Tabel I.1 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Triwulan II 2025 Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy)

Berdasarkan Lapangan Usaha	2022				2023				2024				2025				
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	andil	share	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,15	2,80	2,92	2,27	2,96	1,19	2,35	3,49	3,77	3,04	-1,24	3,95	5,85	8,66	0,54	9,65	↗
Pertambangan dan Penggalian	1,68	2,77	3,69	5,74	5,09	5,21	3,26	7,17	10,47	6,24	5,65	4,93	-0,61	-0,13	-0,06	34,11	↗
Industri Pengolahan	1,64	3,67	3,63	5,31	7,00	4,97	7,05	0,12	-0,47	-1,99	-0,15	3,58	8,36	15,12	2,75	20,32	↗
Pengadaan Listrik, Gas	3,43	3,63	-2,04	10,09	19,57	20,06	16,57	9,39	17,09	18,96	18,74	11,33	6,51	5,05	0,00	0,07	↘
Pengadaan Air	8,42	9,96	5,03	7,11	7,09	6,47	7,89	9,05	9,12	8,79	6,76	6,32	5,23	6,41	0,00	0,06	↗
Konstruksi	3,95	6,85	9,28	10,71	16,73	20,47	14,22	12,63	12,26	17,28	13,98	11,11	3,87	-0,11	-0,01	11,48	↘
Perdagangan Besar & Eceran	4,92	4,56	7,66	9,98	9,91	7,44	6,22	4,11	6,34	8,89	9,32	9,66	12,99	9,91	0,61	7,54	↘
Transportasi dan Pergudangan	8,23	11,12	13,91	14,40	11,81	13,81	8,81	4,36	5,59	5,26	10,12	11,69	13,36	6,58	0,21	4,75	↘
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,65	7,37	13,05	8,66	7,66	6,84	7,63	8,59	9,18	11,88	12,05	13,19	13,73	9,97	0,10	1,21	↘
Informasi dan Komunikasi	8,53	8,63	7,64	7,19	6,89	8,03	8,06	4,62	5,54	7,41	8,75	9,95	8,96	4,96	0,14	1,58	↘
Jasa Keuangan	8,76	2,74	16,02	10,05	12,99	20,26	2,44	12,60	6,54	3,40	9,69	6,99	3,71	1,78	0,03	1,87	↘
Real Estate	2,04	1,67	2,32	4,01	4,67	4,64	5,04	3,22	3,74	5,13	5,98	8,60	8,61	7,54	0,06	0,85	↘
Jasa Perusahaan	4,13	4,19	6,95	6,09	9,21	6,89	4,62	6,06	6,69	6,53	7,91	9,03	6,50	9,89	0,02	0,24	↗
Administrasi Pemerintahan	2,98	-3,23	27,15	6,39	8,34	12,94	0,78	10,48	14,19	25,86	13,87	12,37	13,26	1,72	0,04	2,48	↘
Jasa Pendidikan	-0,94	1,22	7,79	6,12	4,88	4,97	3,77	5,74	5,16	5,89	3,98	6,25	6,19	6,96	0,10	1,93	↗
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,84	4,02	4,64	6,87	6,73	8,96	7,56	4,42	3,73	4,07	5,73	6,23	8,46	8,72	0,07	0,99	↗
Jasa lainnya	4,74	5,05	9,97	8,15	7,16	8,31	8,79	7,60	5,69	9,58	13,81	13,48	12,22	13,96	0,08	0,86	↗
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2,40	3,62	5,34	6,47	6,99	6,89	5,30	5,76	7,26	5,85	5,52	6,12	4,08	4,69	4,69	100,00	↗

Sumber: BPS, diolah

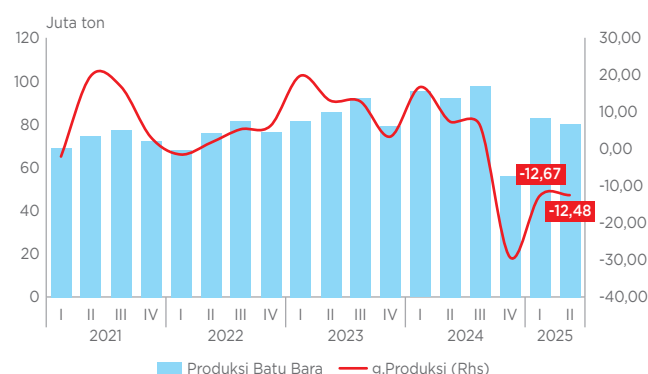
Secara pangsa, LU Pertambangan masih menopang strukur ekonomi Kaltim meski andil pertumbuhan tertinggi di triwulan II 2025 disumbangkan oleh LU Industri Pengolahan dan Pertanian. Ekonomi Kaltim pada triwulan II masih didominasi oleh LU pertambangan dengan pangsa sebesar 34,11%, diikuti oleh industri pengolahan, konstruksi, pertanian, dan perdagangan dengan pangsa masing-masing sebesar 20,33%, 11,48%, 9,65%, dan 7,54%. Secara total, kelima LU ini menguasai pangsa sebesar 83,11% dari total ekonomi Kaltim di periode pelaporan (Grafik I.3). Dengan pangsa dan pertumbuhan yang cukup tinggi di triwulan II 2025, sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian menyumbangkan andil pertumbuhan tertinggi, yakni secara berurut-turut sebesar 2,75% (yoy), 0,61% (yoy), dan 0,54% (yoy). Sementara itu, LU konstruksi dan pertambangan menyumbangkan andil -0,01% (yoy) dan -0,06% (yoy) seiring pertumbuhannya yang juga berkontraksi secara *year-on-year* di periode pelaporan (Tabel I.1).

Pertambangan dan Penggalian

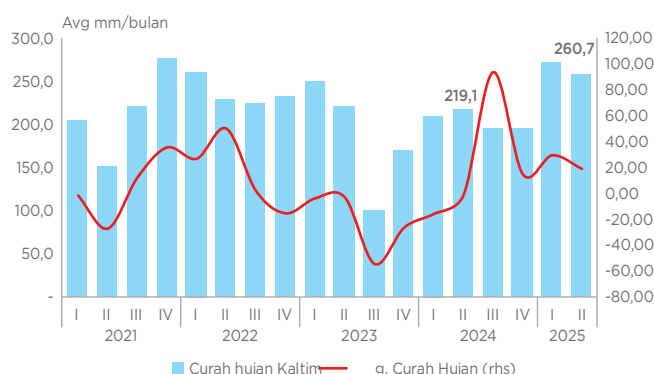
LU pertambangan dan penggalian Kaltim masih berkontraksi seiring belum pulihnya permintaan batu bara dari negara mitra dagang utama Kaltim. Pada triwulan II 2025, LU pertambangan berkontraksi sebesar 0,13% (yoy) seiring produksi batu bara yang masih berkontraksi akibat

curah hujan yang tinggi dan permintaan batu bara dari negara mitra dagang yang masih tertahan. Produksi batu bara triwulan II 2025 berkontraksi 12,48% (yoy) relatif sedikit membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 12,67% (yoy) (Grafik I.4). Tertahannya pertumbuhan produksi batu bara di triwulan II 2025 tersebut terjadi seiring curah hujan yang tinggi di periode pelaporan dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya dan mengganggu aktivitas pertambangan (Grafik I.5). Penurunan kinerja LU pertambangan juga sejalan dengan penurunan permintaan batu bara yang tergambar dari penurunan volume ekspor batu bara yang berkontraksi 27,98% (yoy) (Grafik I.6). Penurunan permintaan batu bara dari negara mitra dagang yang terjadi pada periode laporan disebabkan oleh peningkatan produksi batu bara domestik dari negara mitra dagang, khususnya Tiongkok³. Tren produksi domestik Tiongkok tumbuh lebih tinggi sejak triwulan I 2025 (Grafik I.7) seiring adanya kebijakan dari pemerintahnya yang berupaya mengurangi impor komoditas ini. Selain itu, adanya kebijakan peralihan pemenuhan energi dari sumber energi baru terbarukan juga turut berkontribusi pada perlambatan permintaan batu bara Tiongkok pada periode laporan. Pertumbuhan produksi listrik dari energi baru terbarukan di Tiongkok berada dalam tren pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan produksi listrik dengan sumber

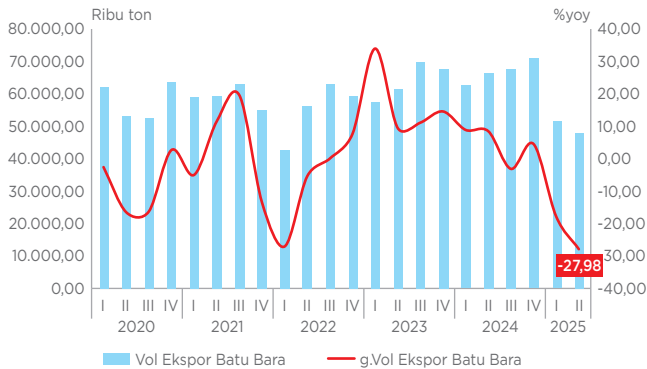
Grafik I.4 Perkembangan Produksi Batu Bara Kaltim



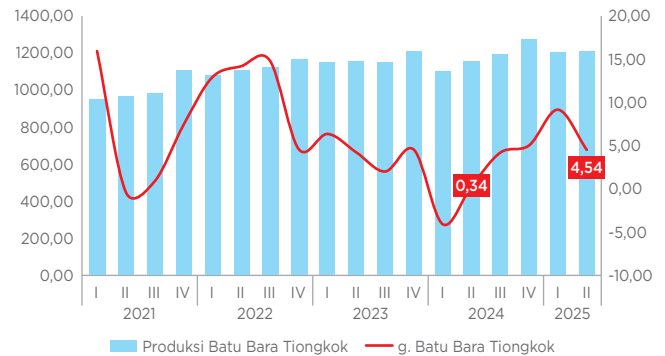
Grafik I.5 Perkembangan Curah Hujan Kaltim



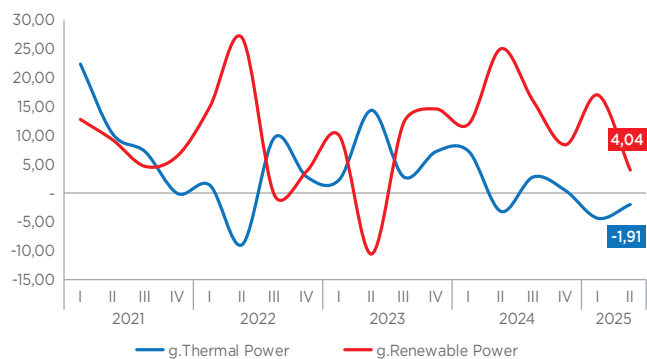
3. Tiongkok merupakan negara mitra dagang utama komoditas batu bara provinsi Kaltim.

Grafik I.6 Perkembangan Volume Ekspor Batu Bara Kaltim Triwulan II 2025

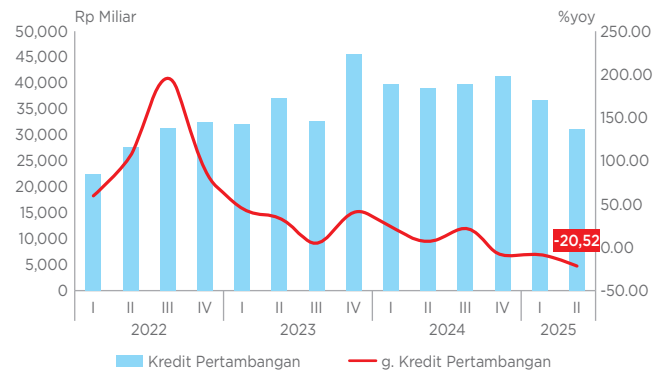
Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik I.7 Perkembangan Produksi Batu Bara Tionggok

Sumber: McCloskey, diolah

Grafik I.8 Perkembangan Produksi Listrik Tionggok

Sumber: National Bureau of Statistics of China, diolah

Grafik I.9 Perkembangan Kredit Pertambangan Kaltim Berdasarkan Lokasi Proyek

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

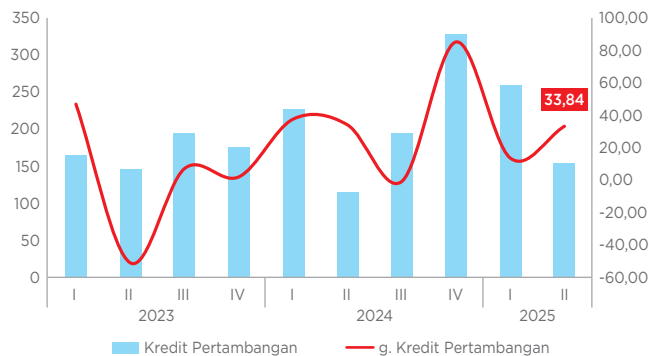
energi termal (Grafik I.8). Kondisi melemahnya LU pertambangan dan penggalan juga berdampak pada penyaluran kredit perbankan di sektor ini. Kredit pertambangan tercatat masih melanjutkan tren kontraksi sebesar 20,52% (yoy) di periode pelaporan (Grafik I.9).

Industri Pengolahan

LU industri pengolahan tumbuh lebih tinggi di triwulan II 2025 seiring peningkatan kinerja pengolahan migas, pupuk, bahan kimia, dan CPO. LU industri pengolahan pada triwulan II 2025 tumbuh positif sebesar 15,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,36% (yoy). Tingginya pertumbuhan LU industri pengolahan pada periode laporan didorong oleh peningkatan kinerja pengolahan minyak dan gas (migas) pasca *revamp* kilang *refinery* migas di tahun 2024.

Peningkatan tersebut tergambar dari peningkatan ekspor hasil minyak yang tumbuh sebesar 33,84% (yoy) (Grafik I.10). Selain hasil minyak, produksi LPG dan LNG juga meningkat yang tergambar melalui peningkatan indeks produksi LPG dan LNG (Grafik I.11). Selain migas, industri pupuk juga meningkat yang tergambar dari indeks produksi pupuk yang meningkat (Grafik I.12) serta ekspor *fertilizer* yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik I.13). Selain ketiga komoditas tersebut, industri pengolahan CPO dan bahan kimia organik juga diperkirakan meningkat, sejalan dengan ekspornya yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun industri kayu lapis juga memiliki kinerja yang positif pada periode laporan. Peningkatan permintaan produk industri ini terjadi sejak awal tahun, khususnya berasal dari Amerika Serikat. Lesunya permintaan di tahun 2024 seiring harga produk olahan kayu domestik yang kurang

Grafik I.10 Perkembangan Nilai Ekspor Hasil Minyak



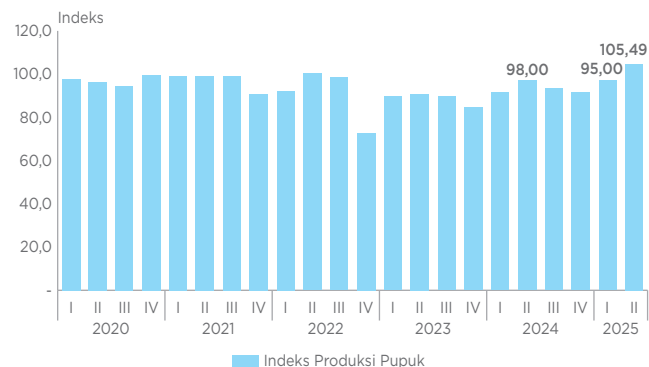
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik I.11 Perkembangan Indeks Produksi LNG dan LPG



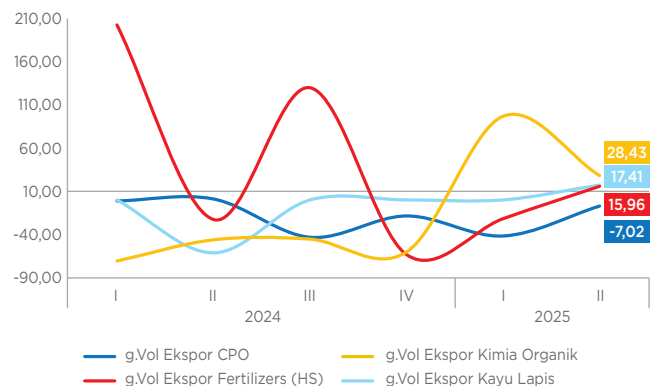
Sumber: Data Olahan Bank Indonesia

Grafik I.12 Indeks Produksi Pupuk



Sumber: Data Olahan Bank Indonesia

Grafik I.13 Perkembangan Volume Ekspor Sejumlah Produk Industri Unggulan di Kaltim



Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

kompetitif berbanding terbalik dengan kondisi di tahun 2025 yang mengalami peningkatan tinggi. Peningkatan ini juga tergambar melalui volume ekspornya yang tumbuh positif 28,43% (yoy) di periode laporan (Grafik I.12).

Konstruksi

Kinerja LU konstruksi Kaltim triwulan II 2025 terkontraksi akibat terbatasnya progress pembangunan fisik IKN di tahun 2025 pasca percepatan yang dilakukan di tahun sebelumnya. Pada triwulan II 2025, LU konstruksi terkontraksi sebesar 0,11% (yoy), setelah tumbuh positif di triwulan sebelumnya yang sebesar 3,87% (yoy). Penurunan kinerja LU konstruksi sejalan dengan progress pembangunan IKN yang termoderasi sejalan dengan penurunan pagu anggaran untuk keseluruhan tahun 2025 (Grafik I.14) di tengah *high baseline* triwulan II 2024⁴. Lebih lanjut,

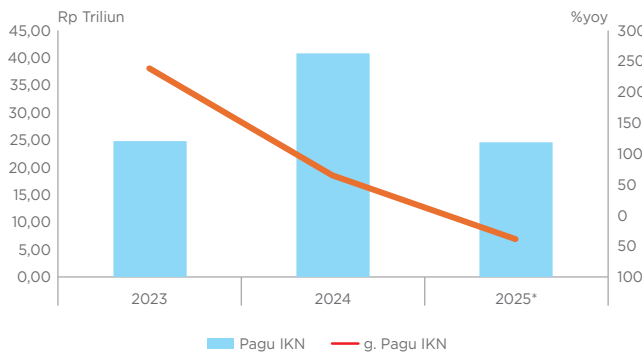
perlambatan kinerja LU konstruksi juga tercermin dari pengadaan semen di periode pelaporan yang turun 33,30% (yoy) dibandingkan dengan pengadaan semen di triwulan II 2024 (Grafik I.15). Lebih lanjut, terkontraksinya pengadaan semen juga sejalan dengan prakiraan nilai proyek konstruksi terdistribusi yang berjalan di periode pelaporan yang terkontraksi 41,5% (yoy) (Grafik I.16) dan penurunan kredit konstruksi yang terkontraksi sebesar 6,24% (yoy) (Grafik I.17).

Perdagangan Besar dan Eceran

Normalisasi konsumsi masyarakat pasca HBKN Ramadhan dan Idul Fitri di triwulan I 2025 menyebabkan LU perdagangan dan eceran melambat di triwulan II. LU Perdagangan pada

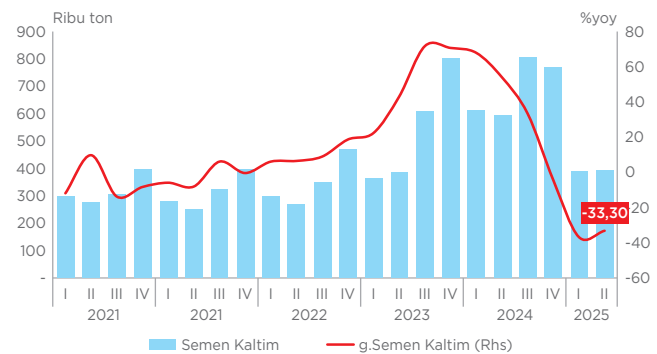
4. Triwulan II 2024 terjadi percepatan pembangunan untuk mengejar kesiapan proyek menjelang pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 di IKN

Grafik 1.14 Perkembangan Pagu Anggaran IKN



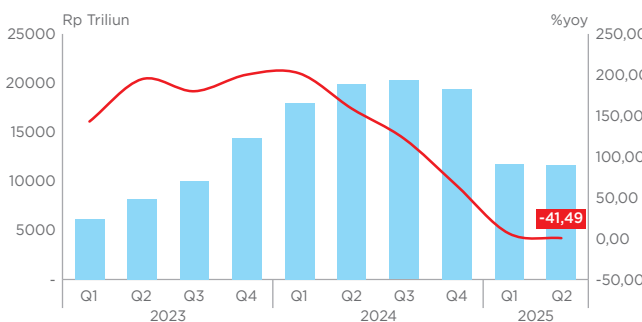
Sumber: DJPb Kaltim, diolah

Grafik 1.15 Perkembangan Kredit Konstruksi di Kaltim



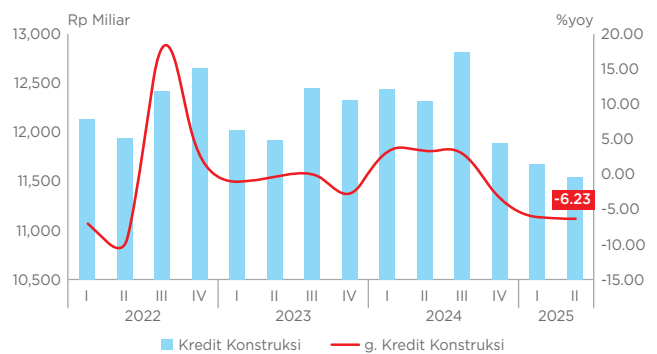
Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 1.16 Perkembangan Nilai Konstruksi Terdistribusi di Kaltim



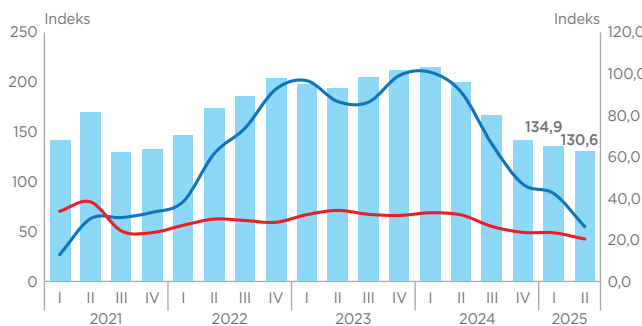
Sumber: BCI Asia, diolah

Grafik 1.17 Perkembangan Kredit Konstruksi di Kaltim



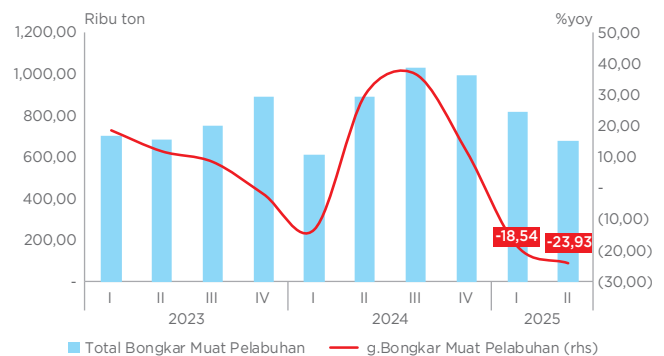
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 1.18 Indeks Penjualan Riil Kaltim



Sumber: Survey Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.19 Total Bongkar dan Muat Pelabuhan di Kaltim



Sumber: BPS, diolah

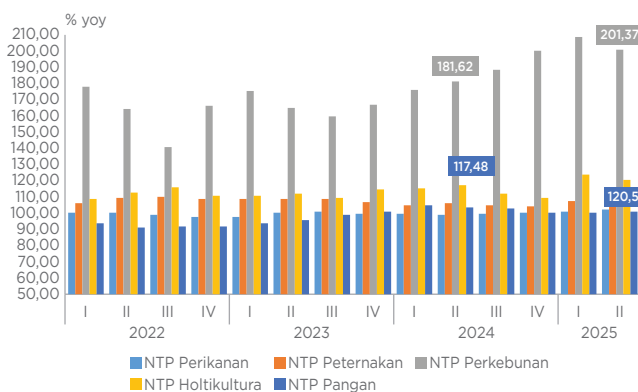
triwulan II tumbuh 9,91% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 12,99% (yoy). Perlambatan aktivitas perdagangan di triwulan II pasca HBKN Idul Fitri di triwulan sebelumnya tergambar melalui indeks penjualan riil yang menurun dari 134,9 di triwulan I menjadi 130,6 di periode laporan. Penurunan indeks penjualan riil tersebut disebabkan terutama

oleh penurunan indeks penjualan kendaraan serta makanan, minuman, dan tembakau (Grafik 1.18). Melambatnya aktivitas perdagangan besar dan eceran juga sejalan dengan penurunan bongkar muat barang di pelabuhan yang terkontraksi 23,93% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 18,54% (yoy) (Grafik 1.19).

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

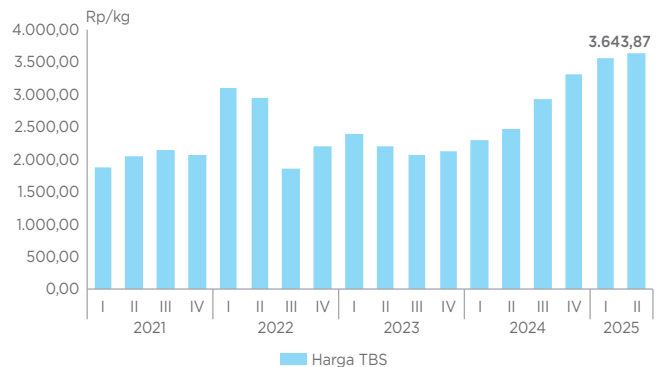
Kinerja LU pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan meningkat pada triwulan II 2025 seiring panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diperkirakan lebih tinggi dari periode yang sama di tahun sebelumnya seiring penambahan luas panen kebun kelapa sawit. LU pertanian pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 8,66% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 5,85% (yoy). Peningkatan kinerja LU ini sejalan dengan panen TBS kelapa sawit yang diperkirakan lebih tinggi dari periode yang sama di tahun sebelumnya seiring penambahan luas panen perkebunan kelapa sawit dan peningkatan produktivitas akibat pemupukan yang lebih baik di tahun 2024 pasca El-Nino dan berdampak ke tahun 2025. Prakiraan peningkatan produksi TBS secara *year-on-year* ini juga tergambar melalui Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor perkebunan yang meningkat di periode laporan dibandingkan triwulan II 2024 (Grafik I.20). Peningkatan NTP ini sejalan dengan peningkatan indeks yang diterima petani yang (IT) yang tergambar dari harga TBS di triwulan II 2025 yang lebih tinggi secara level, baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun dibandingkan dengan triwulan II 2024 (Grafik I.21). Meski membaik di subsektor perkebunan, NTP secara umum tercatat mengalami sedikit perlambatan di triwulan laporan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan indeks

Grafik I.20 Perkembangan NTP Subsektor



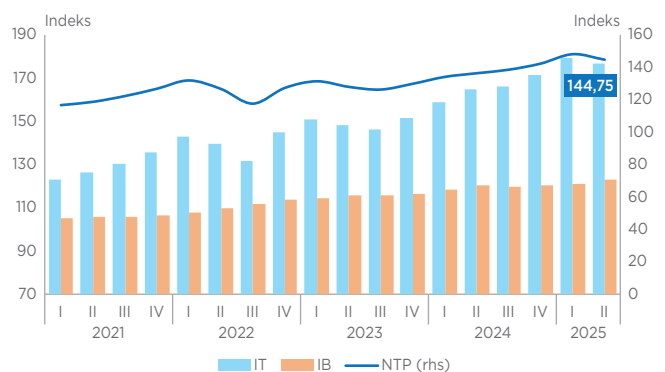
Sumber: BPS Kaltim, diolah

Grafik I.21 Perkembangan Harga TBS



Sumber: Disbun Kaltim, diolah

Grafik I.22 Perkembangan NTP, IT, dan IB Kaltim



Sumber: BPS Kaltim, diolah

yang diterima petani (IT) di tengah indeks yang dibayar petani (IB) yang relatif stagnan (Grafik I.22).

1.3. PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN PENGELUARAN

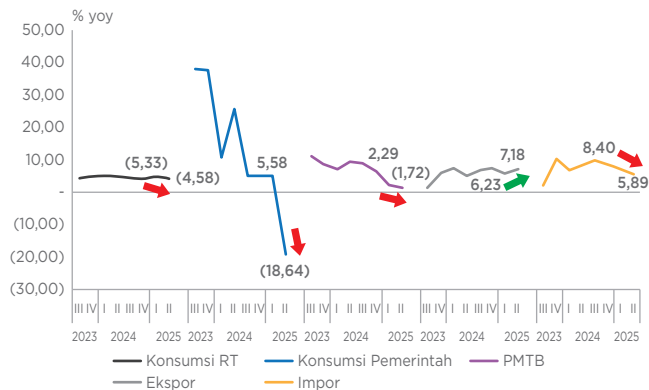
Peningkatan kinerja ekonomi Kaltim di triwulan II 2025 disebabkan utamanya oleh komponen ekspor yang tumbuh lebih tinggi di tengah perlambatan komponen lainnya. Komponen ekspor terakselerasi didorong terutama oleh peningkatan ekspor bahan kimia organik dan *fertilizers* untuk kelompok nonmigas serta hasil minyak untuk kelompok migas, yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selain ketiga komoditas tersebut, ekspor CPO juga membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Komponen pengeluaran lainnya selain ekspor

tercatat tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Komponen PMTB melambat sejalan dengan perlambatan LU Konstruksi yang terjadi terbatasnya anggaran IKN tahun 2025. Komponen konsumsi rumah tangga (RT) juga tumbuh melambat sejalan dengan LU Perdagangan yang juga tertahan di periode yang sama. Normalisasi konsumsi masyarakat pasca HBKN Idul Fitri di triwulan I 2025 yang tercermin dari penurunan indeks keyakinan konsumen (IKK) menjadi penyebab perlambatan yang terjadi. Selanjutnya, komponen impor juga melambat seiring perlambatan impor migas seiring dengan meningkatnya produksi migas domestik. Di sisi lain, kebijakan efisiensi belanja pemerintah juga membuat komponen konsumsi pemerintah berkontraksi pada periode laporan.

Secara pangsa, net ekspor masih menopang struktur ekonomi Kaltim dari sisi pengeluaran

sejalan dengan sumbangannya pada andil pertumbuhan yang tertinggi di triwulan II 2025. Ekonomi Kaltim pada sisi pengeluaran didominasi oleh net ekspor mencatatkan *share* terbesar mencapai 41,45% dari total PDRB Kaltim. Selanjutnya, secara berurutan, pangsa terbesar komponen pengeluaran PDRB Kaltim yakni PMTB sebesar 35,48%, konsumsi rumah tangga (RT) sebesar 17,91%, dan konsumsi pemerintah 4,57% (Grafik 1.23). Secara total, keempat komponen ini menguasai pangsa sebesar 99,41% dari total ekonomi Kaltim di periode pelaporan (Grafik 1.24). Adapun secara andil, dengan pangsa dan pertumbuhan yang cukup tinggi, net ekspor masih menyumbangkan andil pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 4,39% (yoy). Andil tertinggi selanjutnya disumbangkan oleh komponen RT 0,67% (yoy) dan komponen PMTB 0,51% (yoy). Sementara itu, konsumsi pemerintah

Grafik 1.23 Pertumbuhan 5 (lima) Komponen Pengeluaran Utama Kaltim pada Triwulan II 2025 (% yoy)



mencatatkan andil pertumbuhan -0,82% (yoy) seiring kinerjanya yang berkontraksi di periode pelaporan (Tabel I.2).

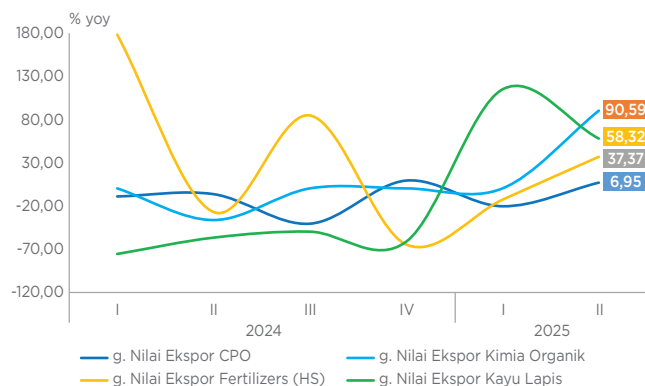
Ekspor

Komponen ekspor Kaltim tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, didorong oleh ekspor sejumlah komoditas industri pengolahan Kaltim pada periode laporan. Komponen ekspor Kaltim di triwulan II 2025 sebesar 7,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,23% (yoy). Peningkatan kinerja ekspor tersebut disebabkan utamanya oleh peningkatan nilai ekspor sejumlah komoditas nonmigas unggulan Kaltim, diantaranya CPO yang tumbuh 6,95% (yoy), *fertilizers* yang tumbuh 37,37% (yoy), dan bahan kimia organik yang tumbuh 90,59% (yoy) (Grafik I.25). Selain ketiga komoditas tersebut,

komoditas kayu lapis juga tumbuh positif sebesar 58,32% (yoy).

Peningkatan ekspor sejumlah komoditas unggulan industri pengolahan Kaltim tersebut sejalan dengan peningkatan harga sejumlah komoditas tersebut. CPO sebagai komoditas ekspor unggulan Kaltim kedua setelah batu bara, mengalami peningkatan harga dari Rp12.174/kg pada triwulan II 2024 menjadi Rp13.769/kg atau meningkat 13,10% (yoy), meski melambat dibandingkan dengan pertumbuhan di triwulan sebelumnya (Grafik I.26). Selain itu, harga *plywood* juga meningkat 7,86% (yoy) (Grafik I.27) seiring peningkatan permintaan, serta harga urea, sebagai salah satu jenis *fertilizers* juga tercatat meningkat 27,45% (yoy) (Grafik I.28). Meskipun demikian, secara keseluruhan, ekspor nonmigas Kaltim tercatat masih mengalami kontraksi sebesar 21,58% (yoy) di periode laporan (Grafik

Grafik I.25 Perkembangan Nilai Ekspor Beberapa Komoditas Nonmigas Unggulan Kaltim



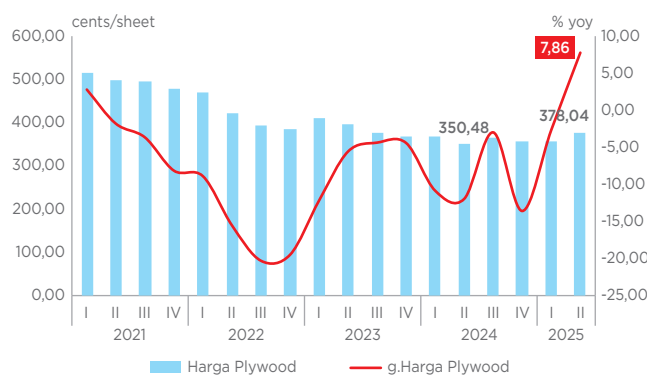
Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik I.26 Perkembangan Harga CPO Kaltim



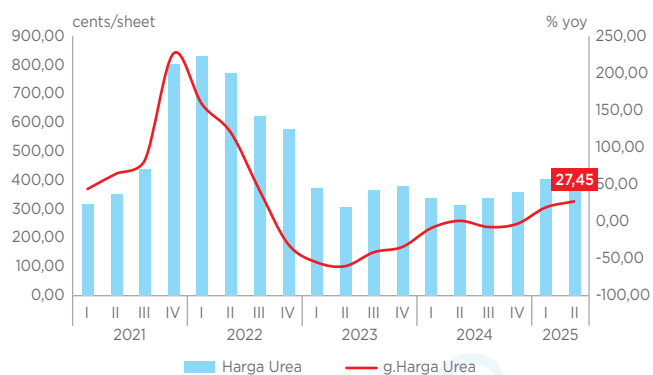
Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik I.27 Perkembangan Harga Plywood (Kayu Lapis)



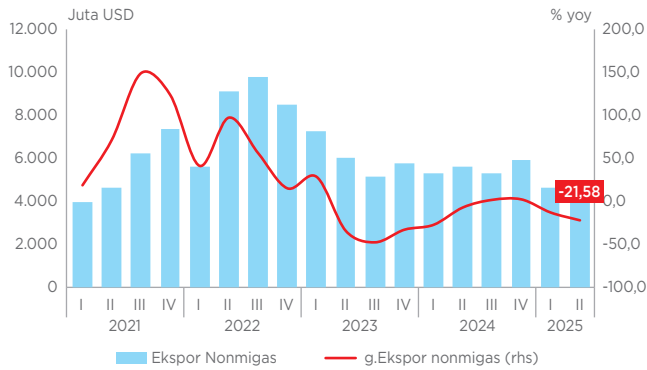
Sumber: World Bank, diolah

Grafik I.28 Perkembangan Harga Urea



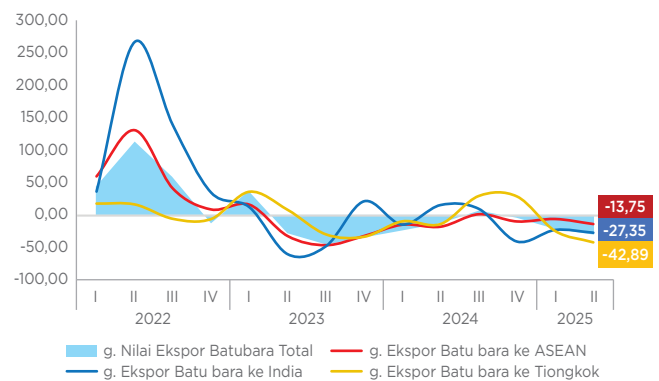
Sumber: World Bank, diolah

Grafik I.29 Perkembangan Ekspor Nonmigas Kaltim



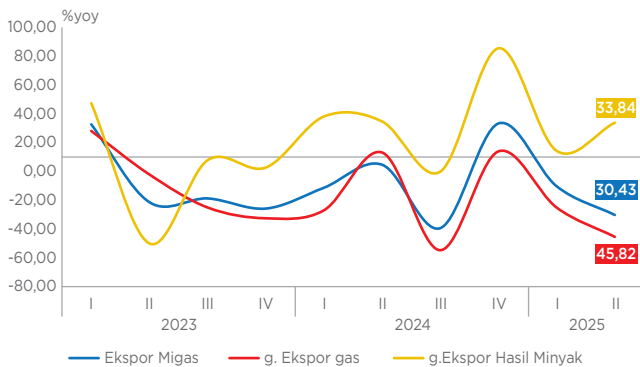
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.30 Perkembangan Ekspor Batu bara Kaltim



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.31 Perkembangan Ekspor Migas Kaltim



Sumber: BPS, diolah

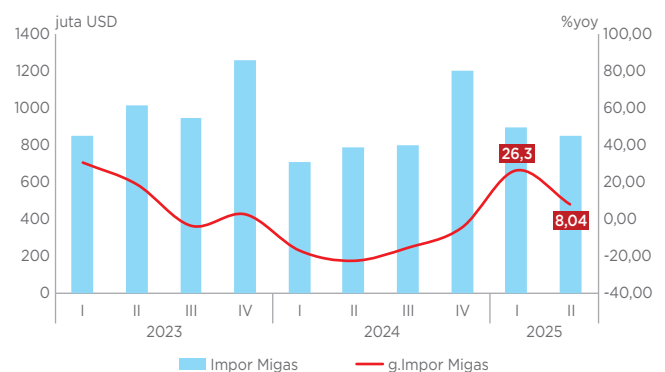
I.29). Terkontraksinya ekspor non migas Kaltim disebabkan oleh kondisi kontraksi yang dialami oleh ekspor batu bara Kaltim. Sebagai komoditas unggulan utama Kaltim, ekspor batu bara masih terkontraksi sebesar 29,5% (yoy) pada periode laporan, seiring penurunan permintaan dari sejumlah negara mitra dagang Kaltim, utamanya Tiongkok, India, dan ASEAN (Grafik I.30). Sementara itu, dari sisi ekspor migas, ekspor hasil minyak tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di triwulan sebelumnya dan turut mendorong kinerja ekspor Kaltim, di tengah ekspor gas yang terkontraksi (Grafik I.31).

Impor

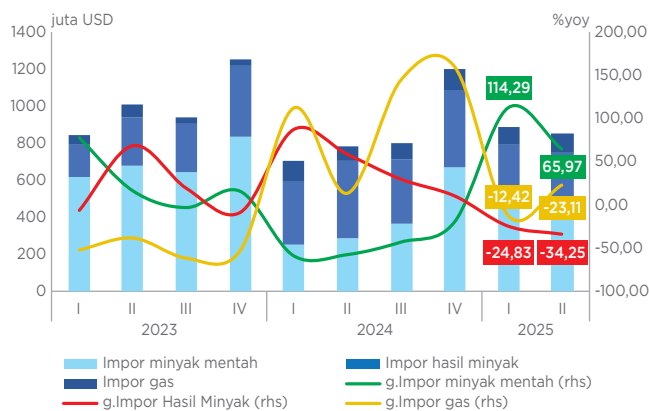
Komponen impor Kaltim melambat pada triwulan II 2025 didorong oleh perlambatan impor migas, terutama impor hasil minyak, sejalan dengan prakiraan peningkatan produksi *refinery* minyak

bumi domestik di LU Industri Pengolahan. Komponen impor melambat dari 7,41% (yoy) di triwulan sebelumnya menjadi 5,89% (yoy) di periode pelaporan. Impor migas Kaltim yang memegang pangsa 73,6% dari total impor Kaltim, tercatat tumbuh melambat dari 26,3% (yoy) di triwulan sebelumnya menjadi 8,04% (yoy) di periode laporan (Grafik I.32). Berdasarkan jenis barangnya, perlambatan impor migas disebabkan oleh perlambatan impor minyak mentah serta kontraksi impor hasil minyak. Kedua jenis barang tersebut memegang pangsa impor migas terbesar Kaltim dengan total pangsa keduanya mencapai 88,3% dari total impor migas Kaltim pada periode laporan. Impor minyak mentah dan hasil minyak secara berturut turut tercatat melambat dan terkontraksi dari 114,3% (yoy) dan 24,83% (yoy) menjadi 65,97% (yoy) dan 34,25% (yoy) di periode laporan. Adapun perlambatan impor hasil

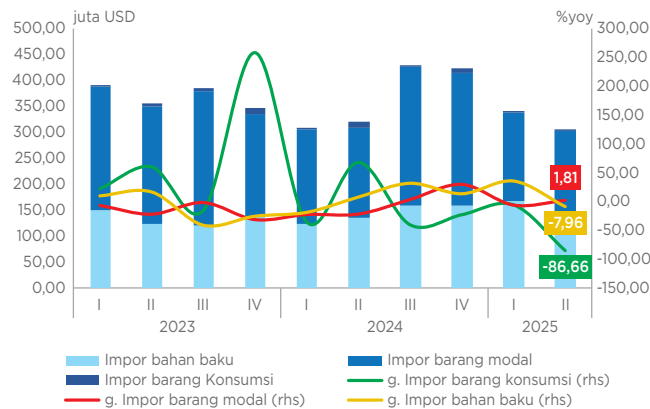
Grafik I.32 Perkembangan Nilai Impor Migas Kaltim



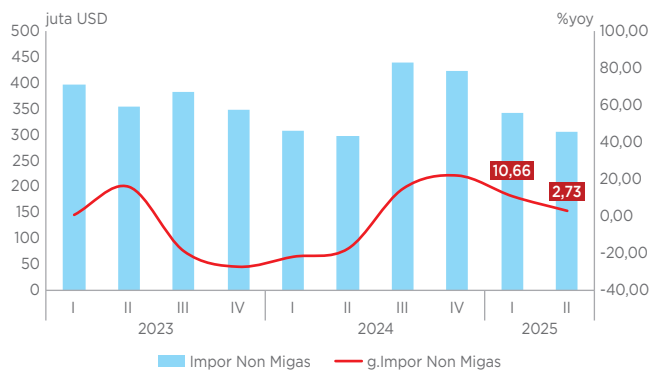
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.33 Perkembangan Nilai Impor Migas Berdasarkan Jenis Barang

Sumber: BPS, diolah

Grafik I.35 Perkembangan Nilai Impor Nonmigas Berdasarkan Jenis Barang

Sumber: BPS, diolah

Grafik I.34 Perkembangan Nilai Impor Nonmigas Kaltim

Sumber: BPS, diolah

minyak tersebut diperkirakan disebabkan oleh peningkatan produksi *refinery* minyak bumi pasca *revamp* pabrik. Di tengah impor kedua barang tersebut yang melambat, impor gas tercatat tumbuh positif 23,11% (yoy), setelah berkontraksi 12,42% (yoy) di triwulan sebelumnya (Grafik I.33).

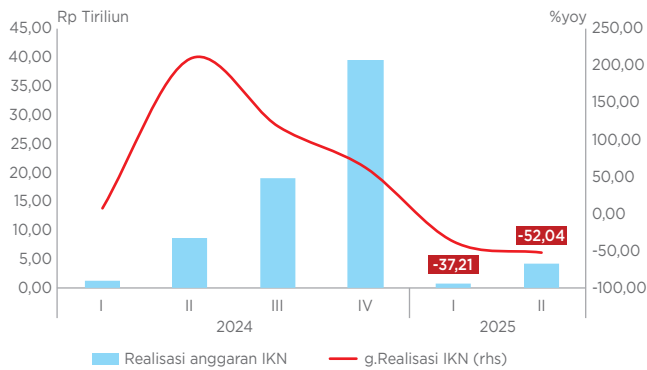
Dari sisi impor non-migas, perlambatan nilai impor disebabkan oleh kelompok barang bahan baku dan barang konsumsi yang sejalan dengan tertahannya kinerja LU konstruksi dan komponen konsumsi PDRB. Impor non migas Kaltim yang pada periode pelaporan memegang pangsa sebesar 26,4% dari total impor Kaltim, turut mencatatkan pertumbuhan yang melambat, yakni dari 10,66% (yoy) menjadi 2,73% (yoy) (Grafik I.34). Perlambatan impor non migas tersebut disebabkan oleh impor bahan baku

yang berkontraksi 7,96% (yoy) pasca tumbuh positif di triwulan sebelumnya sebesar 37,15% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan perlambatan kinerja LU Konstruksi di periode pelaporan. Selain bahan baku, impor barang konsumsi juga berkontraksi 86,7% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 6,16% (yoy) (Grafik I.35). Perlambatan tersebut sejalan dengan perlambatan kinerja komponen konsumsi di periode pelaporan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) - Investasi

Komponen PMTB Kaltim di triwulan II 2025 termoderasi akibat realisasi investasi pemerintah di IKN yang tertahan seiring terbatasnya anggaran IKN di tahun 2025, serta berkontraksinya investasi swasta asing. Komponen PMTB tumbuh 1,72% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan di triwulan sebelumnya yang sebesar 2,29% (yoy). Tertahannya pertumbuhan komponen PMTB ini utamanya disebabkan oleh realisasi anggaran pembangunan IKN yang turun 52% (yoy) dari realisasi anggaran pembangunan IKN di periode yang sama di tahun sebelumnya (Grafik I.36). Terkontraksinya realisasi anggaran pembangunan IKN ini tidak terlepas dari *high baseline* realisasi di tahun sebelumnya seiring percepatan pembangunan IKN untuk mengejar

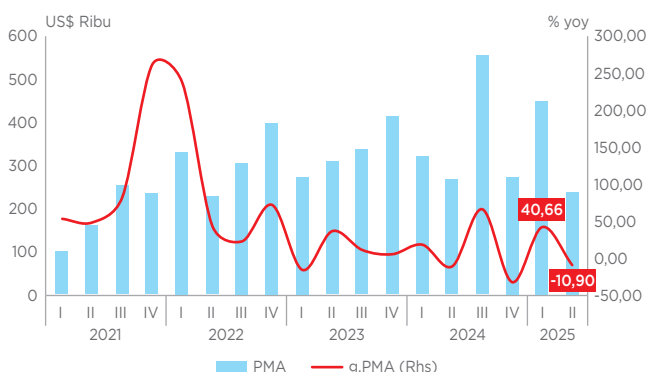
Grafik I.36 Perkembangan Realisasi APBN IKN



Sumber: DJPb Kaltim, diolah

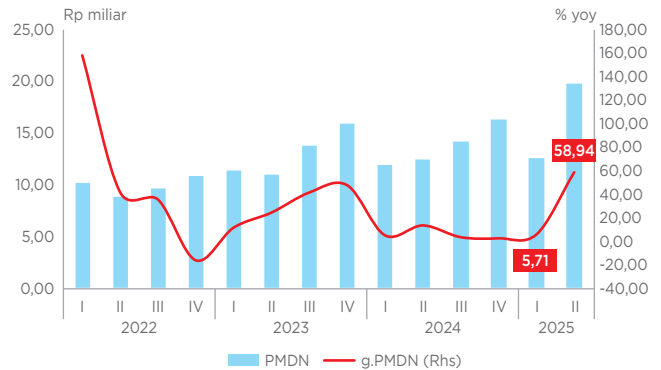
kesiapan menjelang rangkaian kegiatan upacara HUT RI ke-79 di IKN. Selain itu, jika ditinjau dari investasi swasta, tercatat investasi swasta asing (Penanaman Modal Asing, PMA) berkontraksi 10,9% (yoy), setelah tumbuh positif di triwulan sebelumnya sebesar 40,7% (yoy) (Grafik I.37). Adapun penurunan PMA salah satunya terjadi pada investasi di LU Pertambangan yang berkontraksi 40,6% (yoy). Meski demikian, investasi swasta domestik (Penanaman Modal Dalam Negeri, PMDN) tumbuh 58,9% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,71% yang sebesar 5,71% (yoy) (Grafik I.38). Peningkatan investasi swasta domestik tersebut diperkirakan didorong oleh investasi di lapangan usaha Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan yang meningkat signifikan dan menahan perlambatan yang lebih dalam pada komponen investasi.

Grafik I.37 Penanaman Modal Asing (PMA) Kaltim



Sumber: BKPM, diolah

Grafik I.38 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kaltim



Sumber: BKPM, diolah

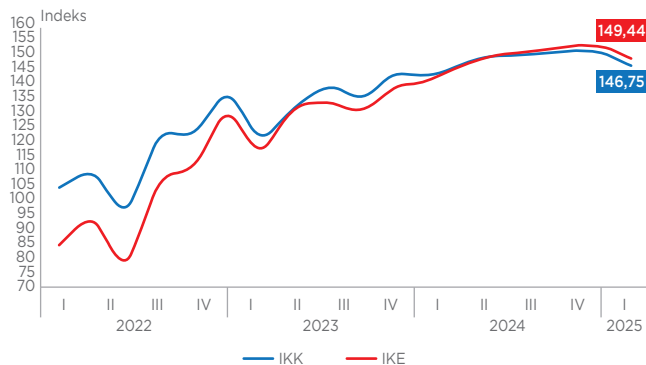
Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga Kaltim pada triwulan II 2025 termoderasi pasca HBKN Idul Fitri pada triwulan sebelumnya yang meningkatkan konsumsi secara *seasonal*. Konsumsi rumah tangga Kaltim di periode pelaporan tumbuh sebesar 4,58% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan di triwulan sebelumnya, yakni 5,33% (yoy). Termoderasinya konsumsi rumah tangga tercermin dari penurunan indeks keyakinan konsumen (IKK) dan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) secara berturut-turut dari 151,67 dan 153,56 di triwulan sebelumnya menjadi 146,75 dan 149,44, (Grafik I.39). Penurunan kedua indeks tersebut disebabkan utamanya oleh normalisasi konsumsi masyarakat pasca peningkatan di momen HBKN Idul Fitri pada triwulan sebelumnya.

Konsumsi Pemerintah

Realisasi belanja pemerintah daerah di triwulan II 2025 berkontraksi seiring penurunan belanja operasional akibat penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) yang sepenuhnya terjadi di triwulan I 2025. Komponen pengeluaran pemerintah di periode pelaporan berkontraksi sebesar 18,64% (yoy), setelah tumbuh positif di triwulan sebelumnya sebesar 5,58% (yoy). Penurunan komponen ini sejalan dengan belanja operasional APBD Kaltim yang berkontraksi 19,7% (yoy) (Grafik I.40), belanja pegawai dari APBN yang

Grafik I.39 Perkembangan Realisasi APBN IKN



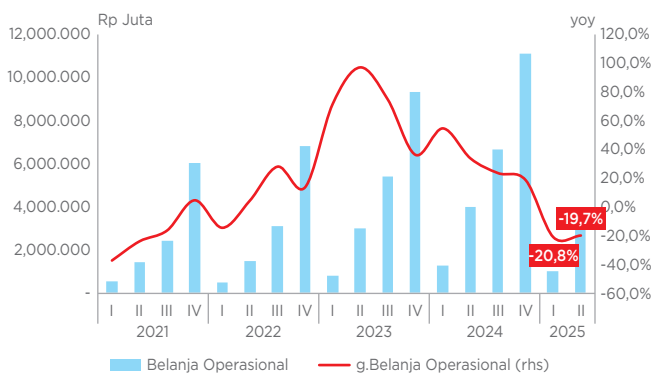
Sumber: Survei bank Indonesia, diolah

tumbuh melambat, serta transfer ke daerah dan belanja belanja barang dan jasa APBN yang berkontraksi. Penurunan belanja operasional APBD sejalan dengan realisasi belanja pegawai yang melambat dari 16% (yoy) menjadi 3,1% (yoy), belanja barang dan jasa yang berkontraksi 19% (yoy), serta belanja hibah yang berkontraksi 83% (yoy) (Grafik I.41, I.42, dan Tabel I.3). Selain itu, dari sisi APBN, realisasi belanja pegawai APBN melambat dari 8,28% (yoy) menjadi 5,37% (yoy) (Tabel I.4). Tertahannya realisasi belanja pegawai baik di APBD dan APBN tersebut salah satunya disebabkan oleh bergesernya periode penyaluran THR dari yang awalnya terbagi ke triwulan I dan II

di tahun 2024 menjadi sepenuhnya disalurkan di triwulan I pada tahun 2025.

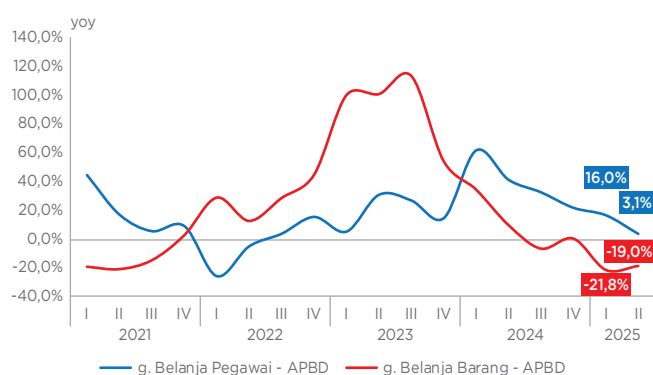
Selain itu, kebijakan efisiensi belanja pemerintah juga menahan realisasi belanja barang dan jasa pada APBD dan APBN Kaltim, di tengah transfer ke daerah yang berkontraksi akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH). Pengurangan pelaksanaan event, rapat, dan kegiatan seremonial oleh pemerintah seiring efisiensi belanja pemerintah pasca Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menahan realisasi belanja barang dan jasa baik di APBD maupun APBN Kaltim. Adapun transfer ke daerah pada APBN Kaltim berkontraksi 10,37% (yoy), disebabkan terutama oleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkontraksi 11,90% (yoy) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berkontraksi 9,83% (yoy). Penurunan realisasi DBH sejalan dengan penurunan pagu DBH yang berkontraksi 2,11% (yoy) disebabkan terutama oleh penurunan royalti batu bara tahun sebelumnya seiring harga batu bara acuan (HBA) tahun 2024 yang lebih rendah dibandingkan dengan HBA tahun 2023⁵. Sementara itu, pembayaran tunjangan profesi guru di daerah, yang merupakan bagian dari DAU, mulai dilakukan secara terpusat sejak Maret 2025, dan menahan realisasi DAU di triwulan II 2025.

Grafik I.40 Realisasi belanja Operasional APBD Kaltim



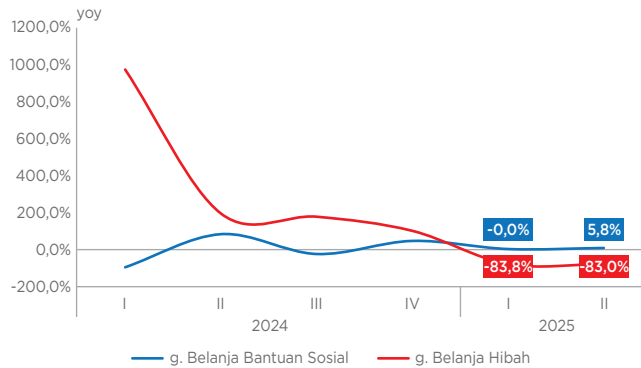
Sumber: BPKAD Kaltim, diolah

Grafik I.41 Realisasi belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa APBD Kaltim



Sumber: BPKAD Kaltim, diolah

- DBH bersumber dari penerimaan negara dari sumber daya alam (SDA), khususnya dari sektor migas (minyak dan gas bumi) serta mineral dan batu bara, sehingga royalti batu bara sebagai komoditas unggulan Kaltim sangat mempengaruhi DBH Kaltim

Grafik I.42 Realisasi belanja Hibah dan Bantuan Sosial APBD Kaltim**Tabel I.3 Realisasi Belanja APBD Kaltim**

URAIAN APBD	2023				2024				2025	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Nominal Realisasi										
Belanja	2.042.293	6.060.314	10.746.056	17.763.575	2.167.370	6.712.491	11.784.097	20.463.584	1.010.446	5.379.196
Belanja Operasional	814.632	2.988.520	5.415.999	9.371.659	1.262.039	4.004.043	6.702.247	11.137.895	998.931	3.214.022
Belanja Pegawai	333.660	1.079.824	1.713.035	2.661.188	537.505	1.519.372	2.261.235	3.225.824	623.699	1.566.120
Belanja Barang	310.047	1.177.378	2.591.608	4.897.588	415.644	1.287.524	2.411.196	4.898.722	325.232	1.043.195
Belanja Hibah	28.610	258.154	327.436	603.504	308.890	756.130	901.045	1.195.068	50.000	128.441
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan sosial	629	3.654	9.121	11.879	-	6.635	6.635	17.177	-	7.018
Belanja Bantuan Keuangan	141.686	469.510	774.799	1.197.500	-	434.382	1.122.136	1.801.104	-	469.248
Belanja Modal	159.205	860.484	1.998.616	5.017.154	160.720	804.021	1.991.039	4.870.010	11.515	349.905
Belanja Tanah	230	1.033	78.554	215.878	5.618	8.543	24.796	78.009	-	-
Belanja Peralatan Mesin	19.614	246.260	521.219	1.649.479	34.050	126.120	394.180	1.142.602	11.498	62.111
Belanja Bangunan dan Gedung	70.420	245.581	505.561	1.189.662	52.465	276.852	704.015	1.963.236	-	44.243
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.941	361.180	876.873	1.914.792	67.930	381.503	843.210	1.612.447	-	243.440
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	5.235	12.659	34.063	-	9.453	18.753	41.748	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	1.196	3.749	13.280	658	1.549	6.083	31.968	17	110
Belanja tidak terduga	80	497	7.120	50.441	-	-	-	64.231	-	-
Belanja tidak terduga	80	497	7.120	50.441	-	-	-	64.231	-	-
Transfer	1.068.377	2.210.813	3.324.321	3.324.321	745.190	1.904.428	3.090.812	4.391.449	-	1.815.269
Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	1.068.377	2.210.813	3.832.682	5.186.080	745.190	1.904.428	3.090.812	4.391.449	-	1.815.269

Sumber: BPKAD Kaltim, diolah

Tabel I.4 Realisasi Belanja APBN Kaltim

URAIAN	Mar-25					Jun-25				
	Pagu	Realisasi	%real	g.Pagu	g.Realisasi	Pagu	Realisasi	%real	g.Pagu	g.Realisasi
Belanja Negara	55.335,30	10.379,77	18,76	-42,31	2,03	59.447,90	21.976,52	36,97	-35,43	-23,41
Belanja Pemerintah Pusat	16.925,16	2.190,40	12,94	-68,47	-30,18	21.037,82	7.729,83	36,74	-60,28	-39,60
Belanja Pegawai	3.411,18	955,59	28,01	-1,45	8,28	3.624,42	1.949,22	53,78	7,07	5,37
Belanja Barang	3.385,68	351,51	10,38	-45,79	-57,75	3.519,87	998,73	28,37	-44,07	-43,71
Belanja Modal	10.117,55	883,31	8,73	-76,99	-37,71	13.882,79	4.776,84	34,41	-67,92	-47,91
Belanja Bantuan Sosial	10,74	-	0,00	8,82	-	10,74	50.424,00	46,93	8,82	-
Transfer Ke Daerah	38.410,15	8.189,37	21,32	-9,06	16,39	38.410,08	14.246,69	37,09	-1,75	-10,37
Dana Bagi Hasil	27.984,76	5.868,13	20,97	-11,80	15,51	27.984,76	10.137,16	36,22	-2,11	-11,90
Dana Alokasi Umum	6.678,60	1.517,55	22,72	4,03	10,58	6.678,60	2.488,92	37,27	4,03	-9,83
Dana Alokasi Khusus Fisik	405,72	-	0,00	-54,10	-	405,72	-	-	-54,10	-
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	2.471,47	725,57	29,36	10,86	35,50	2.471,47	1.158,55	46,88	10,86	2,47
Dana Insentif Daerah	59,55	-	0,00	-63,88	-	59,48	29,74	50,00	-63,92	-
Dana Desa	810,05	78,12	9,64	0,01	100,00	810,05	432,32	53,37	0,01	100,00

Sumber: Kanwil DJPb Kaltim, diolah

BOKS 1

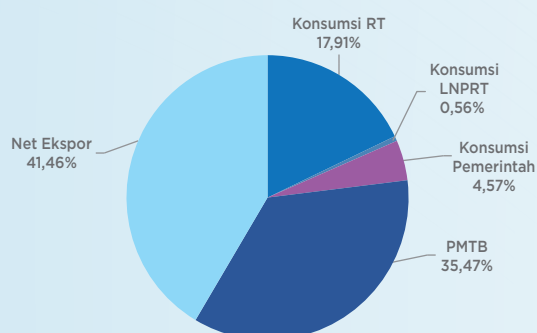
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Iklim Investasi Kalimantan Timur

Investasi yang tercermin melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menyumbangkan lebih dari 30% *share* terhadap PDRB Kaltim, serta menunjukkan tren yang sejalan. Dari sisi pengeluaran, struktur PDRB Kaltim pada triwulan II 2025 masih ditopang oleh net ekspor dan PMTB, dengan kontribusi PMTB mencapai 35,47% menjadi salah satu komponen penting menopang pertumbuhan ekonomi daerah (Grafik BOKS 1). Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan historis menunjukkan pertumbuhan PMTB bergerak sejalan dengan PDRB, mencerminkan eratnya keterkaitan antara aktivitas investasi dan kinerja ekonomi. Adapun pada triwulan II 2025, pertumbuhan PMTB tercatat 1,72% (*yoy*), lebih rendah dari pertumbuhan PDRB sebesar 4,69% (*yoy*) (Grafik BOKS 2). Hal ini menandakan perlunya akselerasi investasi agar tetap menjadi

motor penggerak utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Kaltim.

Investasi menjadi indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tercermin dari tingginya korelasi terhadap PMTB. Keterkaitan PMTB dengan realisasi investasi (PMDN dan PMA) juga sangat erat tercermin dari nilai korelasi yang mencapai 90% (Grafik Boks. 3). Peningkatan realisasi investasi mendorong kenaikan PMTB, terwujud melalui pembangunan infrastruktur, penambahan mesin, dan peningkatan kapasitas produksi. Korelasi antara PMTB dan investasi yang tinggi tersebut, mempertegas bahwa setiap penguatan iklim investasi baik domestik maupun asing akan memberi dampak nyata terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi Kaltim.

Grafik BOKS 1. Pangsa PDRB Kaltim Berdasarkan Pengeluaran Triwulan II 2025



Sumber: BPS, diolah

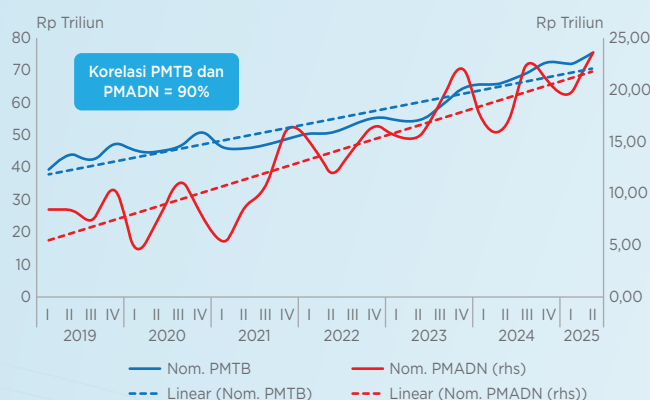
Grafik BOKS 2. Pertumbuhan PDRB dan PMTB Kaltim



Sumber: BPS, diolah



Grafik BOKS 3. Korelasi PMTB dan PMADN Kaltim



Sumber: BPS, diolah

Penguatan fungsi Regional Investor Relation Unit (RIRU) di daerah, menjadi langkah strategis dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui strategi peningkatan realisasi investasi daerah. Beberapa strategi yang dapat dilakukannya yakni, pertama, penguatan regulasi dan penyusunan skema insentif investasi yang kompetitif. Hal bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan merujuk pada *best practice* di negara-negara ASEAN. Adapun beberapa isu eksisting pemberian insentif investasi di Kaltim, meliputi ketidaksinkronan regulasi Pusat dan Daerah, proses berinvestasi yang masih memakan waktu yang cukup panjang, insentif belum tepat

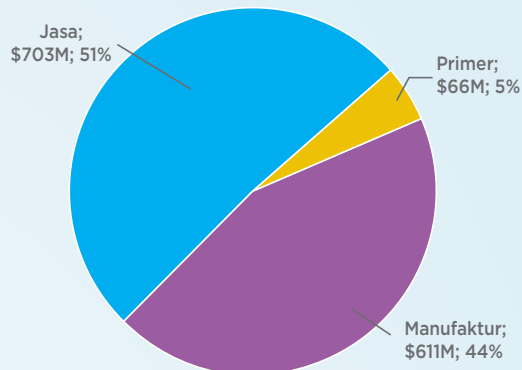
asaran, serta kurang mengakomodir kebutuhan Investor dan tidak disosialisasikan kepada investor. Di sisi lain, beberapa negara ASEAN seperti Kota Kinabalu (Malaysia), Mingalodon (Kamboja), dan Saigon (Vietnam) menawarkan berbagai insentif untuk menarik investasi, termasuk pembebasan atau pengurangan pajak, kemudahan kepemilikan tanah atau perusahaan, serta dukungan khusus untuk sektor tertentu seperti teknologi tinggi dan ekspor (Tabel BOKS. 1). Insentif ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri di wilayah masing-masing.

Kedua, melakukan pemetaan **demand** pasar global agar arah investasi Kaltim mampu menjawab kebutuhan global dan memaksimalkan potensi daerah secara optimal. Adapun investasi global pada tahun 2023 meningkat menjadi US\$1,38 triliun, level tertinggi yang pernah tercatat, yang terutama didorong oleh ekspansi proyek manufaktur dengan share mencapai 44% (Grafik Boks. 4). Selain itu, seiring dengan komitmen untuk menurunkan emisi karbon dunia, investasi di sektor ekonomi hijau, seperti kendaraan listrik juga menarik bagi investor. Hal ini juga didukung oleh kebijakan yang diambil oleh negara-negara Amerika dan Eropa, seperti Inflation Reduction Act (IRA) dan Carbon Border Adjustment Mechanism

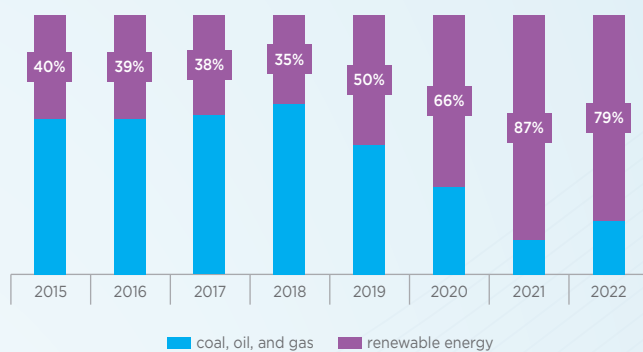
Tabel Boks 1. Insentif di beberapa negara ASEAN

City/Country	Incetives
Kota Kinabalu/Malaysia	• Halal Development Corporation Incentives • Packaged incentives similar to Sabah Development Corridor • Bionexus Incentives • Land tenure - up to 99 years
Mingalodon/Cambodia	• Exemption from income tax for three years • Accelerated depreciation • Up to 50% tax relief on profits from exports • Right to carry forward and set off losses for three consecutive years from the year loss is sustained • Exemption from duties, taxes and raw materials for the first three years of commercial production • Guarantee against nationalization • Rights to have up to 100% ownership of a company
Saigon/Vietnam	• Corporate income tax (CIT) of zero per cent • VAT and import duty exemption • VAT of zero per cent and export duty exemption for high-tech products. • Similar personal income tax (PIT; for both local and foreign workers at projects operating in SHTP) • Competitive fees: Eligible investors are entitled to competitive land, office and factory rentals

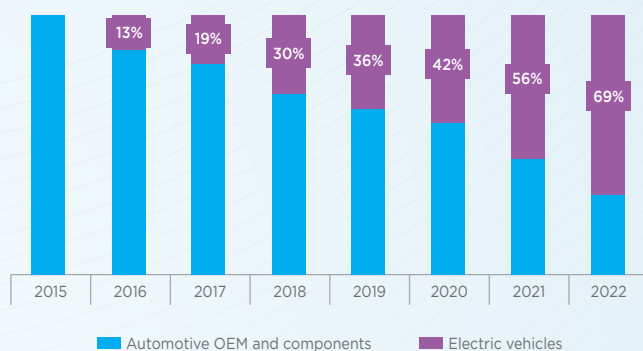
Sumber: Malaysian Investment Development Authority (MIDA), Council for The Development of Cambodia, Ministry of Planning and Investment (Vietnam), diolah

Grafik BOKS 4. Share Investasi Global Berdasarkan Sektor Tahun 2023

Sumber: World Investment Report 2024, diolah

Grafik Boks 5. Share Green FDI Project pada Sektor Energi dan Automotif

Sumber: Boston Consulting Group (BCG) 2023, diolah



Sumber: Boston Consulting Group (BCG) 2023, diolah

(CBAM). Berdasarkan hal tersebut, arah investasi Kaltim perlu diarahkan pada sektor-sektor yang selaras dengan tren global, khususnya manufaktur dan ekonomi hijau, sehingga dapat memperkuat posisi Kaltim sebagai destinasi investasi strategis yang berdaya saing.

Beberapa perkembangan kondisi ekonomi terkini membuka peluang investasi domestik. Seiring dengan perkembangan ekonomi global terkini beberapa hal yang dapat menjadi peluang peningkatan *demand* investasi dalam negeri yakni, *opportunity* dalam *Trade War* US-China yang menyebabkan potensi relokasi industri China ke negara ASEAN termasuk Indonesia, serta peningkatan permintaan global untuk barang-barang manufaktur non-Tiongkok (China+1 strategy) pasca konflik geopolitik. Dari sisi *supply*, komitmen Pemprov Kaltim melalui RPJMD 2025-2029 dalam mendorong peningkatan investasi sebagai salah satu fokus utama yang mendukung transformasi ekonomi, serta posisi Kaltim sebagai mitra strategis IKN (superhub ekonomi IKN) yang terus mengakselerasi transformasi ekonomi hijau (sejalan dengan target 100% EBT IKN di tahun 2045) menjadi peluang optimalisasi potensi investasi daerah.

Mempertimbangkan dinamika tersebut, optimalisasi peluang investasi Kaltim ke depan memerlukan strategi yang mampu mengintegrasikan tren global (*demand*) dengan potensi daerah (*supply*). Dengan demikian, promosi investasi dapat berlangsung secara adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada preferensi investor global, sekaligus mampu menonjolkan keunggulan komparatif dan kompetitif dari Kaltim. Strategi ini tidak hanya bertujuan menarik arus PMA, tetapi juga memastikan keselarasan dengan agenda pembangunan berkelanjutan serta transformasi ekonomi daerah.



Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 2

Keuangan Pemerintah di Daerah



RINGKASAN EKSEKUTIF

- Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Kaltim mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, baik dari sisi realisasi pendapatan maupun belanja.
- Persentase realisasi pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten/Kota di Kaltim lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
- Capaian realisasi APBN di wilayah Kaltim hingga triwulan II 2025 menurun baik pada pos belanja maupun pos pendapatan.



2.1. GAMBARAN UMUM

Sejalan dengan kinerja komponen konsumsi pemerintah PDRB di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), kinerja anggaran pemerintah juga mengalami penurunan kinerja pada periode yang sama. Realisasi pendapatan pemerintah (APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota) pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp16,93 triliun dengan persentase realisasi 30,82%, lebih rendah dibanding periode yang sama 2024 yang sebesar Rp 27,30 triliun dengan persentase realisasi 42,60%. Sejalan dengan itu, realisasi belanja keuangan pemerintah juga mengalami penurunan pada periode yang sama. Realisasi belanja pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp 27,37 triliun, lebih rendah dibanding periode yang sama 2024 yang sebesar Rp 35,42 triliun. Meski demikian secara persentase, realisasi tersebut tercatat meningkat dari 30% tahun sebelumnya menjadi 34% di tahun 2025. Penurunan kinerja keuangan pemerintah tersebut, tidak terlepas dari adanya penurunan pagu anggaran pemerintah, akibat kebijakan refocusing anggaran pemerintah pusat pada awal tahun 2025, termasuk yang terkait dengan komponen dana transfer. Rincian selengkapnya sebagaimana terinci pada tabel II.1.

Bila dianalisis lebih lanjut terkait pendapatan, struktur keuangan pemerintah didominasi oleh pendapatan kabupaten/Kota, pendapatan APBN, dan pendapatan APBD Provinsi. Sejalan dengan itu, realisasi pendapatan untuk APBN pada periode laporan juga mengalami penurunan, terutama disebabkan oleh penurunan komponen

pajak dalam negeri akibat menurunnya penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Penurunan realisasi pendapatan di provinsi juga terjadi terutama disebabkan oleh komponen pendapatan asli daerah (PAD).

Sejalan dengan menurunnya realisasi pendapatan, realisasi belanja juga mengalami penurunan pada triwulan II 2025 dibanding periode yang sama 2024. Bila dianalisis lebih lanjut, struktur belanja pemerintah juga didominasi oleh belanja kabupaten/kota, diikuti oleh realisasi belanja APBN, dan realisasi belanja pemerintah. Penurunan yang terjadi juga disebabkan oleh menurunnya pagu anggaran dibandingkan tahun sebelumnya, sebagai dampak dari kebijakan refocusing anggaran pemerintah pusat pada awal tahun 2025. Realisasi belanja kabupaten/kota yang menurun terutama disebabkan oleh menurunnya realisasi pada komponen belanja barang, yang disebabkan oleh kebijakan efisiensi. Kebijakan ini berdampak cukup signifikan pada penyerapan belanja modal serta barang dan jasa di level daerah. Lebih lanjut, penurunan realisasi belanja APBN yang terjadi pada periode laporan disebabkan oleh menurunnya realisasi komponen belanja barang dan modal akibat penurunan signifikan pada alokasi belanja modal IKN. Sejalan dengan itu, realisasi belanja provinsi juga mengalami penurunan terutama komponen belanja modal akibat kebijakan blokir anggaran berdampak signifikan pada penyerapan belanja modal serta menyebabkan penundaan pelaksanaan kegiatan.

Tabel II.1. Realisasi Keuangan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur

KETERANGAN	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Pagu (Rp Triliun)	Realiasi Nominal (Rp Triliun) TW II	Persentase Realisasi (%) TW II	Pagu (Rp Triliun)	Realiasi Nominal (Rp Triliun) TW II	Persentase Realisasi (%) TW II
Total Pendapatan	64,07	27,30	42,60%	54,93	16,93	30,82%
Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	20,00	10,02	50,09%	20,10	7,45	37,05%
Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Kaltim	0,05	0,02	41,18%	0,05	0,02	34,38%
Pendapatan APBN	44,02	17,26	39,21%	34,78	9,47	27,22%
Total Belanja	116,65	35,42	30,36%	80,45	27,37	34,02%
Belanja Daerah Prov. Kaltim	20,68	6,71	32,47%	20,95	5,38	25,68%
Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Kaltim	0,05	0,01	24,71%	0,05	0,01	24,81%
Belanja APBN	95,92	28,69	29,91%	59,45	21,98	36,97%

2.2. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA PROVINSI

Realisasi pendapatan dan belanja APBD Pemprov Kaltim sampai triwulan II 2025 lebih rendah dibanding periode triwulan II 2024. Penurunan realisasi pendapatan disebabkan oleh turunnya seluruh komponen pendapatan daerah, baik PAD, pendapatan transfer, maupun komponen lain-lain pendapatan yang sah. Sejalan dengan komponen pendapatan, penurunan juga dialami oleh realisasi belanja seiring penerapan kebijakan efisiensi pemerintah dan terlambatnya pengadaan barang/jasa. Kondisi ini berdampak terhadap menurunnya realisasi belanja di seluruh komponen, yaitu belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer (Tabel II.2).

Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan APBD Pemprov Kaltim hingga triwulan II 2025 menurun dibanding periode yang sama 2024. Pada triwulan II 2025, realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Kaltim tercatat sebesar Rp7,45 triliun atau sebesar 37,08% dari pagu 2025, kondisi ini menurun 25,66% (yoy) dibandingkan dengan periode

yang sama di tahun sebelumnya. Menurunnya realisasi pendapatan disebabkan oleh turunnya seluruh realisasi komponen pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada periode triwulan II 2025, realisasi komponen pendapatan transfer mengalami penurunan paling signifikan dengan realisasi Rp2,86 triliun atau 29,12% dari pagu 2025, turun 53,79% (yoy) dibanding realisasi triwulan II 2024 yang sebesar Rp5,13 triliun atau 49,70% dari pagu 2024. Sejalan dengan itu, realisasi PAD tercatat sebesar Rp4,57 triliun atau 45,57% dari pagu 2025, turun 6,18% (yoy) dibanding realisasi triwulan II 2024 yang sebesar Rp4,87 triliun atau 49,70% dari pagu 2024 (Tabel II.3).

Bila ditinjau dari sisi komponen pembentuk pendapatan daerah, komponen PAD memiliki pangsa terbesar dibandingkan dengan komponen lainnya. Pangsa PAD tercatat sebesar 61,41% dari total pendapatan daerah, selanjutnya diikuti oleh komponen pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah dengan pangsa masing-masing sebesar 38,49% dan 0,10%. Lebih lanjut, proporsi pendapatan transfer tersebut menurun dibandingkan periode triwulan II 2024 dengan

Tabel II.2 . Realisasi APBD Pemprov Kaltim Triwulan II

	2024			2025			Selisih	%
	Pagu	Realisasi Tw-II		Pagu	Realisasi Tw-II			
	Rp Juta	Rp juta	%	Rp Juta	Rp juta	%		
PENDAPATAN (I+II+III)	20.000.000	10.017.382	50,09	20.100.000	7.446.835	37,05	(2.570.547)	-25,66
I. PAD	9.808.078	4.874.443	49,70	10.035.158	4.573.172	45,57	(301.271)	-6,18
II. Pendapatan Transfer	9.542.874	5.133.576	53,79	9.862.792	2.865.956	29,06	(2.267.620)	-44,17
III. Lain-lain pendapatan yang sah	649.047	9.364	1,44	202.050	7.707	3,81	(1.657)	-17,69

	2024			2025			Selisih	
	Pagu	Realisasi Tw-II		Pagu	Realisasi Tw-II			
	Rp Juta	Rp juta	%	Rp Juta	Rp juta	%		
BELANJA (I+II+III+IV)	20.675.000	6.712.491	32,47	20.950.000	5.379.196	25,68	(1.333.295)	-19,86
I. Belanja Operasional	11.075.936	4.004.043	36,15	11.444.131	3.214.022	28,08	(790.021)	-19,73
II. Belanja Modal	4.462.901	804.021	18,02	3.667.457	349.905	7,50	(454.116)	-56,48
III. Belanja tidak terduga	343.264	80	0,02	174.966	-	0,00	(80)	-100,00
IV. Transfer	4.792.900	1.904.428	39,73	4.663.446	1.815.269	38,93	(89.158)	-4,68

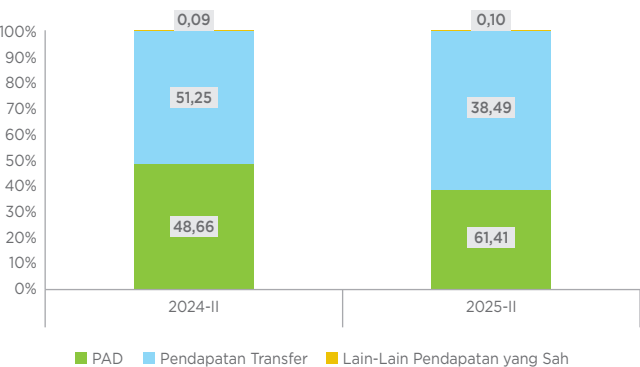
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

Tabel II.3. Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan II 2024 dan 2025

		2024			2025			Selisih	% Perubahan (yoy)
		Pagu	Realisasi Tw-II		Pagu	Realisasi Tw-II			
		Rp Juta	Rp juta	%	Rp Juta	Rp juta	%		
PENDAPATAN (I+II+III)		20.000.000	10.017.382	50,09	20.080.499	7.446.835	37,08	(2.570.547)	-25,66
I. PAD		9.808.078	4.874.443	49,70	10.035.158	4.573.172	45,57	(301.271)	-6,18
Pajak daerah		8.592.000	4.153.172	48,34	8.400.000	3.400.986	40,49	(752.186)	-18,11
Retribusi daerah		869.447	322.159	37,05	1.070.333	549.297	51,32	227.138	70,50
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan		252.916	166.847	65,97	449.310	300.266	66,83	133.419	79,96
Lain-lain PAD yang sah		93.715	232.265	247,84	115.515	322.623	279,29	90.358	38,90
II. Pendapatan Transfer (a+b)		9.542.874	5.133.576	53,79	9.843.291	2.865.956	29,12	(2.267.620)	-44,17
a. Dana Perimbangan		9.542.874	5.133.576	53,79	9.843.291	2.865.956	29,12	(2.267.620)	-44,17
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak & Dana Alokasi Umum/Khusus		9.542.874	5.133.576	53,79	9.843.291	2.865.956	29,12	(2.267.620)	-44,17
b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				-			-	-	-
Dana Penyesuaian				-			-	-	-
III. Lain-lain Pendapatan yang sah		649.047	9.364	1,44	202.050	7.707	3,81	(1.657)	-17,69
Pendapatan Hibah		13.862	9.364	67,55	13.864	7.707	55,59	(1.657)	-17,69
Pendapatan Lainnya		635.186		-	188.186	-	-	-	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

Grafik II.1 Komponen Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltim (dalam %)



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

pangsa sebesar 51,25%. Penurunan pangsa tersebut tidak terlepas dari penurunan realisasi dana bagi hasil bukan Pajak dan dana alokasi umum/khusus (Grafik II.1).

Tingkat kemandirian fiskal pada triwulan II 2025 masih berada pada level positif dengan kemandirian fiskal tertinggi pada Kota Balikpapan. Tingkat kemandirian fiskal pada periode laporan yang masih berada di level positif, tercermin dari Derajat Otonomi Fiskal (DOF)⁶ Provinsi Kaltim

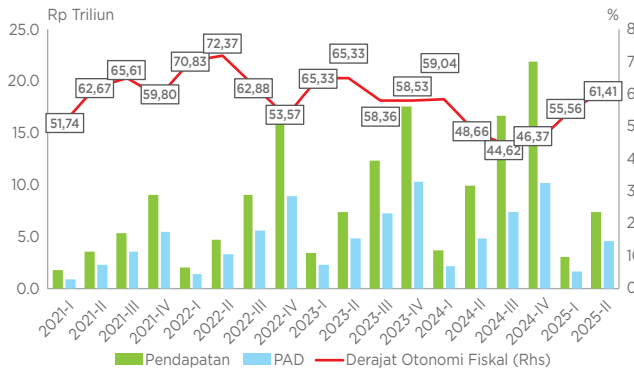
6. DOF merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam mencari pendapatan yang bersumber dari daerahnya masing-masing.

yang tercatat sebesar 55,56% atau menurun dibanding periode sebelumnya yang sebesar 59,04% (Grafik II.2). Hal tersebut menunjukkan Pemprov Kaltim memiliki ketergantungan yang relatif lebih tinggi terhadap dana transfer dari pusat. Sementara itu, secara spasial, tiga kabupaten/kota dengan DOF tertinggi secara berurutan adalah Kota Balikpapan (30,86%), Kota Samarinda (21,28%), dan Kabupaten Bontang (13,87%). Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki PAD yang rendah apabila dibandingkan dengan total pendapatan, sehingga derajat otonomi fiskal hanya sebesar 0,75% (Grafik II.3).

Realisasi Belanja

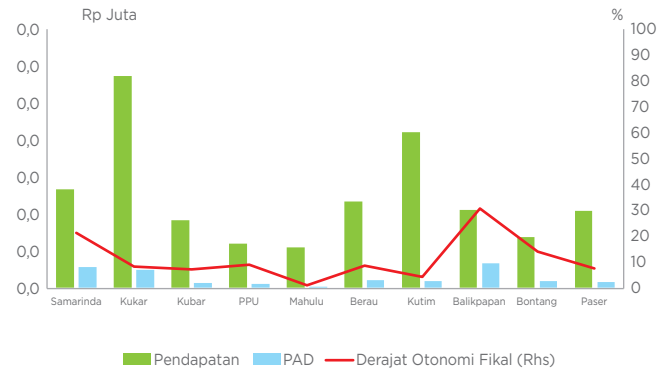
Realisasi belanja tercatat menurun dibandingkan triwulan II 2024, disebabkan oleh menurunnya realisasi belanja modal dan belanja operasional, di tengah belanja transfer yang belum terealisasi. Realisasi belanja triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp5,38 triliun, turun sebesar 19,86% (yoy) dibanding triwulan II 2024 (Tabel II.7). Penurunan tersebut didorong oleh turunnya realisasi belanja seluruh komponen pembentuk belanja daerah. Realisasi belanja modal tercatat sebesar Rp0,35

Grafik II.2 Derajat Otonomi Fiskal Pemprov Kaltim



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

Grafik II.3 Derajat Otonomi Fiskal Pemerintah Kab/Kota



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

triliun, turun 56,48% (yoy) dibandingkan dengan realisasi belanja jenis ini pada triwulan II 2024. Penurunan ini disebabkan oleh tertundanya sejumlah pengadaan barang dan jasa, termasuk untuk pembangunan infrastruktur dan bangunan. Seiring dengan itu, realisasi komponen belanja operasional turun sebesar 19,73% (yoy) menjadi sebesar Rp3,21 triliun atau 26,57% dari pagu 2025 pada triwulan II 2025 dibanding triwulan II 2024 yang sebesar Rp4 triliun atau 36,17% dari pagu 2024 (Tabel II.4).

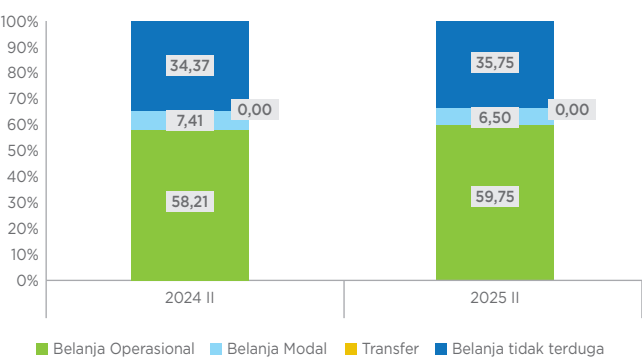
Bila ditinjau dari sisi komponen pembentuknya, realisasi komponen belanja operasional memiliki pangsa terbesar dibandingkan dengan komponen lainnya. Pangsa realisasi belanja operasional terhadap total realisasi belanja daerah mencapai 59,75% (Grafik II.4). Pangsa realisasi belanja operasional tersebut terutama didorong oleh minimnya realisasi komponen belanja modal serta belum terealisasinya komponen belanja transfer dan komponen belanja tak terduga pada triwulan laporan.

Tabel II.4. Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan II 2024 dan 2025

		2024			2025			Selisih	% Perubahan (yoy)
		Pagu	Realisasi Tw-II		Pagu	Realisasi Tw-II			
		Rp Juta	Rp juta	%	Rp Juta	Rp juta	%		
BELANJA (I+II+III+IV)		20.675.000	6.712.491	32,47	20.930.499	5.379.196	25,70	1.333.295	-19,86
I. Belanja Operasional		11.075.936	4.004.043	36,15	12.095.188	3.214.022	26,57	(790.021)	-19,73
	Belanja Pegawai	3.181.413	1.519.372	47,76	4.626.330	1.566.120	33,85	46.747	3,08
	Belanja Barang	4.801.837	1.287.524	26,81	4.680.831	1.043.195	22,29	(244.329)	-18,98
	Belanja Hibah	1.270.441	756.130	59,52	710.193	128.441	18,09	(627.688)	-83,01
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Bantuan sosial	19.800	6.635	33,51	24.584	7.018	28,55	383	5,77
	Belanja Bantuan Keuangan	1.802.445	434.382	24,10	2.053.251	469.248	22,85	34.866	8,03
II. Belanja Modal		4.462.901	804.021	18,02	3.996.899	349.905	8,75	(454.116)	-56,48
	Belanja Tanah	138.844	8.543	6,15	118.508	-	-	(8.543)	-100,00
	Belanja Peralatan Mesin	703.574	126.120	17,93	741.172	62.111	8,38	(64.008)	-50,75
	Belanja Bangunan dan Gedung	1.995.577	276.852	13,87	1.139.152	44.243	3,88	(232.609)	-84,02
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.569.340	381.503	24,31	1.958.143	243.440	12,43	(138.064)	-36,19
	Belanja Aset Tetap Lainnya	32.102	9.453	6,60	20.438	-	-		-100,00
	Belanja Aset Lainnya	23.464	1.549	-	19.486	110			0,00
III. Belanja tidak terduga		343.264	-	-	174.966	-	-	(1.904.428)	
	Belanja tidak terduga	343.264	-	39,73	174.966	-	-	(1.904.428)	
IV. Transfer		4.792.900	1.904.428	39,73	4.663.446	1.815.269	38,93	(89.158)	0,00
	Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	4.792.900	1.904.428	39,73	4.663.446	1.815.269	38,93	(89.158)	0,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

Grafik II.4 Komponen Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan II 2024 dan 2025 (dalam %)



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

2.3. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN/KOTA

Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan daerah pada tingkat kabupaten/kota di Wilayah Kalimantan Timur mengalami penurunan pada triwulan II 2025 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan daerah di tingkat kabupaten/kota pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp16,97 triliun atau 34,38% pagu 2025, turun 16,96% (yoy) dibandingkan dengan periode triwulan II 2024. Penurunan ini

disebabkan oleh realisasi pendapatan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengalami penurunan signifikan sebesar 42,20% (yoy) (Tabel II.5). Rendahnya realisasi pendapatan daerah di Kutai Kartanegara dikarenakan realisasi PAD khususnya pada jenis lain-lain PAD yang sah dan jenis serta pendapatan lainnya menurun.

Realisasi Belanja

Realisasi belanja daerah pada tingkat kabupaten/kota pada triwulan II 2025 menurun dibandingkan triwulan II 2024. Realisasi belanja daerah di kabupaten/kota pada periode laporan tercatat sebesar Rp12,97 triliun atau 24,81% dari pagu 2025, menurun 48,71% (yoy) dibandingkan dengan periode triwulan II 2024 yang sebesar Rp25,81 triliun atau 43,12% dari pagu 2024. Bila ditinjau lebih lanjut dari sisi spasial, realisasi belanja daerah terbesar dicapai oleh Kabupaten Kutai Timur dengan nilai nominal Rp2,50 triliun atau 29,73% dari pagu 2025, sementara Kabupaten Paser mencatatkan realisasi belanja daerah terendah dengan nilai nominal sebesar Rp809,65 miliar atau 17,69% dari pagu 2025 (Tabel II.6).

Tabel II. 5. Realisasi Belanja APBD Kabupaten /Kota Kaltim s.d Triwulan II 2024 dan 2025

Kabupaten/Kota		2024			2025			% Perubahan Realisasi (yoy)
		APBD	Realisasi Tw-II		APBD	Realisasi Tw-II		
		Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	Rp Miliar	%	
PENDAPATAN								
Kota Samarinda		5.797,97	2.878,77	49,65	5.827,68	1.513,14	25,96	(47,44)
Kota Balikpapan		4.545,98	2.074,87	45,64	4595,96	1187,48	25,84	(42,77)
Kota Bontang		3.349,26	1.498,39	44,74	3.021,02	685,31	22,68	(54,26)
Kab. Kutai Kartanegara		13.786,82	6.405,21	46,46	11.665,91	2.837,99	24,33	(55,69)
Kab. Kutai Barat		4.013,00	1.974,48	49,20	3.736,58	964,83	25,82	(51,13)
Kab. Kutai Timur		9.123,80	3.624,90	39,73	8.413,10	2.501,58	29,73	(30,99)
Kab. Paser		5.388,19	1.773,69	32,92	4.576,55	809,65	17,69	(54,35)
Kab. Penajam Paser Utara		3.192,57	1.509,28	47,27	2.403,72	619,12	25,76	(58,98)
Kab. Berau		6.999,19	2.768,61	39,56	5.174,23	1.259,95	24,35	(54,49)
Kab. Mahakam Ulu		2.440,00	773,57	31,70	2.858,37	588,86	20,60	(23,88)
Total Kab/Kota Kaltim		58.636,79	25.281,77	43,12	52.273,11	12.967,91	24,81	(48,71)

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

Tabel II. 6 Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Kaltim s.d Triwulan II 2024 dan 2025

Kabupaten/Kota	2024			2025			% Perubahan Realisasi (yoy)
	APBD	Realisasi Tw-II		APBD	Realisasi Tw-II		
	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	Rp Miliar	%	
BELANJA							
Kota Samarinda	4.271,59	2.005,00	46,94	5.327,68	1849,75	34,72	(7,74)
Kota Balikpapan	3.887,60	1.505,10	38,72	4.216,99	1.622,99	38,49	7,83
Kota Bontang	2.379,58	1.003,22	42,16	2.754,86	806,44	29,27	(19,62)
Kab. Kutai Kartanegara	13.113,82	5.894,40	44,95	11.500,00	3.407,18	29,63	(42,20)
Kab. Kutai Barat	3.908,01	1.559,06	39,89	3.646,58	1.408,13	38,62	(9,68)
Kab. Kutai Timur	9.148,80	3.115,94	34,06	8.425,45	3.068,61	36,42	(1,52)
Kab. Paser	3.717,96	1.517,24	40,81	4.191,55	1.194,40	28,50	(21,28)
Kab. Penajam Paser Utara	2.639,08	964,85	36,56	2.404,18	773,84	32,19	(19,80)
Kab. Berau	4.627,67	2.062,25	44,56	4.686,23	2.171,84	46,35	5,31
Kab. Mahakam Ulu	1.927,33	808,18	41,93	2.208,37	666,02	30,16	(17,59)
Total Kab/Kota Kaltim	49.621,44	20.435,24	41,18	49.361,88	16.969,20	34,38	(16,96)

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

2.4. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA APBN WILAYAH KALTIM

Hingga triwulan II 2025, realisasi belanja dan pendapatan APBN mengalami penurunan. Lebih lanjut, realisasi belanja APBN di Wilayah Provinsi Kaltim pada periode laporan tercatat sebesar Rp21,98 triliun atau 35,97% dari pagu 2025, menurun 39,60% (yoy) dibanding realisasi periode triwulan II 2024 yang sebesar Rp28,69 triliun. Bila ditinjau dari kelompok belanja, persentase realisasi kelompok belanja K/L telah mencapai 36,74% dari pagu 2025 dan kelompok belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar 37,09% dari pagu 2025. Lebih lanjut, menurunnya realisasi belanja APBN disebabkan oleh menurunnya realisasi kelompok belanja K/L yang menurun 39,60% (yoy), didorong oleh menurunnya realisasi jenis belanja modal dan jenis belanja barang masing-masing sebesar 47,91% (yoy) dan 43,71% (yoy). Pagu belanja K/L di wilayah Kaltim tahun 2025 senilai Rp21,03 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk Kementerian PUPR sebesar Rp 12,84 triliun dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur pembangunan IKN yang merupakan bagian dari komponen belanja modal. Sementara itu, komponen pendapatan pada periode triwulan II 2025 tercatat turun 45,14% (yoy), dengan realisasi sebesar Rp 9,47 triliun atau 27,22% dari pagu 2025

atau lebih rendah dibanding realisasi pendapatan triwulan II 2024 yang sebesar Rp17,26 triliun atau 39,21% dari pagu 2024. Penurunan realisasi pendapatan tersebut disebabkan oleh penurunan penerimaan perpajakan sebesar 47,64% (yoy) dan penurunan penerimaan negara bukan pajak sebesar 22,40% (yoy) (Tabel II.7).

Persentase realisasi pendapatan APBN wilayah Kaltim pada periode laporan lebih rendah dibandingkan triwulan II 2024 disebabkan oleh turunnya penerimaan perpajakan. Hingga triwulan II 2025, capaian pendapatan APBN di wilayah Kaltim yaitu Rp9,47 triliun (27,22% dari pagu 2025). Capaian tersebut turun 45,14% (yoy) disebabkan oleh realisasi jenis penerimaan perpajakan yang tercatat sebesar Rp8,14 triliun (24,94% dari pagu 2025), dan turun 47,64% (yoy). Penurunan realisasi jenis penerimaan perpajakan disebabkan oleh turunnya realisasi komponen penerimaan pajak dalam negeri sebesar 55,27% (yoy). Kondisi ini tidak terlepas dari pengaruh turunnya penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang masing-masing berkontraksi sebesar 73,81% (yoy) dan 68,61% (yoy). Penurunan penerimaan PBB disebabkan oleh penundaan pembayaran oleh wajib pajak hingga mendekati jatuh tempo pada triwulan III 2025. Adapun penurunan penerimaan

Tabel II. 7. Realisasi Pendapatan dan Belanja APBN di Kalimantan Timur s.d Juni 2025

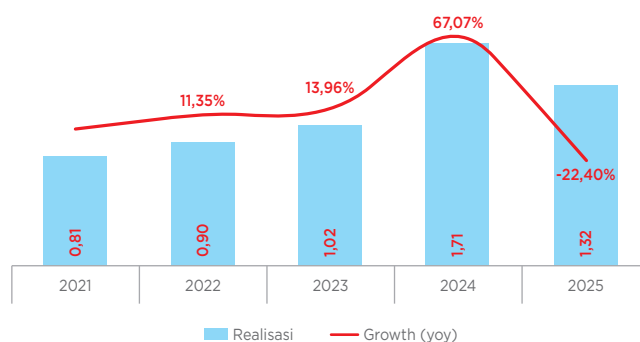
	Triwulan II 2024		Triwulan II 2025			
	Realisasi terhadap APBN		APBN	Realisasi terhadap APBN		Growth (yoy)
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	Rp Miliar	%	%
A. Pendapatan Negara	17.260,30	39,21	34.784,64	9.469,02	27,22	-45,14
1. Penerimaan Perpajakan	15.553,76	37,26	32.655,79	8.144,70	24,94	-47,64
a. Pajak Dalam Negeri	14.760,07	37,26	32.031,56	6.602,85	20,61	-55,27
b. Pajak Perdagangan Internasional	793,69	35,88	624,23	1.541,85	247,00	94,26
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.706,54	77,73	2.128,85	1.324,32	62,21	-22,40
B. Belanja Negara	28.692,95	31,17	59.447,90	21.976,52	36,97	-23,41
I. Belanja Pemerintah Pusat	12.798,49	24,16	21.037,82	7.729,83	36,74	-39,60
1. Belanja Pegawai	1.849,82	54,65	3.624,42	1.949,22	53,78	5,37
2. Belanja Barang	1.774,14	28,19	3.519,87	998,73	28,37	-43,71
3. Belanja Modal	9.169,79	21,19	13.882,79	4.776,84	34,41	-47,91
4. Bantuan Sosial	4,74	47,99	10,74	50,42	46,93	963,80
II. Transfer ke Daerah	15.894,46	40,66	38.410,08	14.246,69	37,09	-10,37
1. Dana Bagi Hasil	11.505,94	40,25	27.984,76	10.137,16	36,22	-11,90
2. Dana Alokasi Umum	2.760,10	42,99	6.678,60	2.488,92	37,27	-9,83
3. Dana Transfer Khusus	1.162,49	54,33	2.877,19	1.158,55	46,88	-0,34
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	31,90	3,61	405,72	-	-	-100,00
b. Dana Alokasi Khusus NonFisik	1.130,59	50,72	2.471,47	1.158,55	46,88	2,47
4. Dana Insentif Daerah	44,26	26,85	59,48	29,74	50,00	-32,81
5. Dana Desa	421,66	52,06	810,05	432,32	53,37	2,53
C. Keseimbangan Primer (A-B)						
D. Surplus/Defisit Anggaran	(11.432,65)	12,72	(57.319,06)	(12.507,50)	21,82	(36,22)

Sumber: Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, diolah

PPN sejalan dengan aktivitas pembangunan IKN yang masih belum masif di periode triwulan II 2025. Sementara itu realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,32 triliun (62,21% dari pagu 2025) atau turun sebesar 22,40% (yoy) (Grafik II.5). Penurunan realisasi PNBP ini didorong oleh PNBP lainnya yang telah terealisasi 67,01% dari target Rp1,62 triliun dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang terealisasi 46,73% dari target Rp0,50 triliun. Porsi terbesar PNBP lainnya meliputi pendapatan jasa ke pelabuhan sebesar Rp0,47 triliun (data per Mei 2025) dan pendapatan BLU terbesar dari pendapatan jasa pelayanan pendidikan sebesar Rp0,16 triliun (data per Mei 2025).

Peningkatan realisasi pajak perdagangan internasional menjadi katalis positif di tengah penurunan realisasi penerimaan pajak dalam negeri di wilayah Kaltim. Penerimaan pajak perdagangan internasional pada periode

Grafik II.5 Kinerja Pendapatan APBN Kaltim



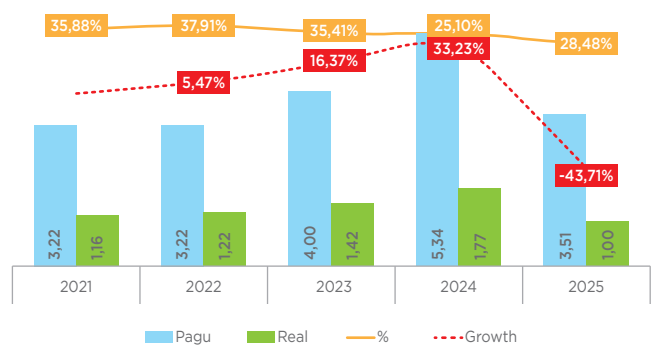
Sumber: Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, diolah

triwulan II 2025 terealisasi sebesar Rp1,54 triliun atau sebesar 247% dari pagu 2025 meningkat sebesar 94,26% (yoy) dibanding triwulan II 2024. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh persentase realisasi penerimaan bea keluar sebesar 260,96% dari pagu tahun 2025. Kenaikan penerimaan bea keluar dipengaruhi oleh kenaikan harga referensi CPO pada Triwulan II 2025.

Kinerja Belanja APBN Kalimantan Timur

Realisasi nominal belanja APBN Provinsi Kaltim sampai dengan triwulan II 2025 mengalami penurunan, utamanya dipengaruhi oleh penurunan realisasi belanja K/L dan belanja TKD. Capaian realisasi belanja APBN Provinsi Kaltim tercatat sebesar Rp21,98 triliun, atau 36,97% dari pagu belanja APBN 2025 dimana *growth* realisasi belanja APBN menurun sebesar 23,41% (yoy) dibanding triwulan II 2024 yang sebesar Rp28,69 triliun atau 31,17% dari pagu. Penurunan tersebut didorong oleh menurunnya realisasi kelompok belanja K/L yang menurun 39,60% (yoy) (Grafik II.8), akibat penurunan realisasi belanja modal dan belanja barang masing-masing sebesar 47,91% (yoy) dan 43,71% (yoy) pada triwulan II 2025 (Grafik II. 6 dan Grafik II.7). Capaian realisasi belanja K/L tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi/realokasi anggaran pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan di level nasional yang difokuskan pada belanja barang dan belanja modal. Lebih lanjut, realisasi belanja modal APBN Kalimantan Timur pada triwulan II mengalami penurunan signifikan karena alokasi belanja modal IKN beralih ke anggaran OIKN. Selain itu terdapat anggaran yang terblokir dan belum dapat digunakan pada periode triwulan II 2025. Dari pagu belanja K/L tahun 2025 yang sebesar 21 triliun, terdapat anggaran Rp2,6 triliun (atau 12,38% dari pagu 2025) yang terblokir dan tersebar di beberapa kementerian dengan porsi terbesar yaitu di Kementerian PU sebesar Rp1,85 miliar). Sementara itu, realisasi anggaran transfer

Grafik II.7 Kinerja Realisasi Belanja Barang APBN Kaltim

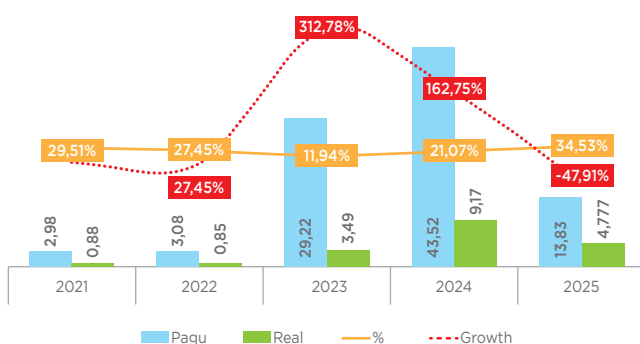


Sumber: Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, diolah

ke Daerah pada periode laporan tercatat sebesar Rp14,25 triliun (37,09,94% dari pagu 2025 sebesar Rp38,41 triliun), atau turun 10,37% (yoy) (Tabel II.7). Capaian tersebut disebabkan oleh penurunan pagu pada penyaluran DBH ke Kaltim serta belum direalisasikannya alokasi DBH yang menjadi porsi pendapatan daerah.

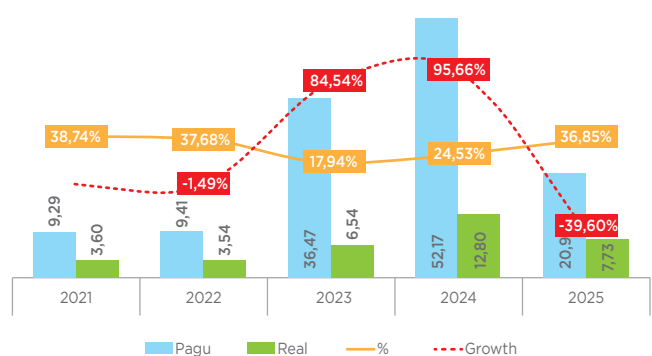
Penggunaan anggaran belanja APBN terkait pembangunan IKN pada triwulan II 2025 menunjukkan penurunan, anggaran digunakan masih terbatas untuk menyelesaikan seluruh proyek on-going maupun baru. Kinerja pelaksanaan belanja APBN di Kaltim berkaitan erat dengan kinerja pembangunan IKN. Pada periode laporan, pagu belanja untuk IKN mencapai Rp12,36 triliun atau 58,37% dari total pagu Kaltim sebesar Rp21 triliun, dengan realisasi pada triwulan II sebesar Rp4,71 triliun atau 38,11% dari pagu IKN. Untuk non-IKN, pagu belanja sebesar Rp8,81 triliun dengan realisasi Rp3,06 triliun atau 34,67%

Grafik II.6 Kinerja Realisasi Belanja Modal APBN Kaltim



Sumber: Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, diolah

Grafik II.8 Kinerja Realisasi Belanja K/L APBN Kaltim



Sumber: Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, diolah

dari pagu. Secara keseluruhan, realisasi triwulan II mencapai Rp7,76 triliun atau 36,67% dari pagu belanja K/L Kaltim. Namun demikian, terdapat blokir anggaran sebesar Rp2,44 triliun, yang terdiri dari Rp1,35 triliun untuk pembangunan IKN dan Rp1,09 triliun untuk anggaran non-IKN.

Lebih lanjut, anggaran belanja K/L Kalimantan Timur dalam rangka pembangunan IKN di kelola oleh 5 kementerian/lembaga dengan jumlah satker total 27 satker. Kementerian PU sebagai pengelola utama dengan pagu Rp11,56 triliun dan realisasi triwulan II sekitar Rp4,25 triliun, ditujukan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di KIPP (Kawasan Inti Pemerintahan Pusat) dan koneksi antar-wilayah pengembangan, termasuk pusat bisnis, edukasi, dan kesehatan, serta ekosistem pendukung legislatif dan yudikatif. Meskipun demikian, pagu anggaran untuk IKN yang dapat digunakan hingga akhir triwulan II sebesar 89,06% setelah dikurangi blokir. Upaya pembukaan blokir akan terus dilakukan melalui koordinasi dengan pusat dan Kemenkeu untuk mempercepat penyerapan anggaran dan mendukung target pembangunan tahap II.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Sampai dengan triwulan II 2025, penyaluran Dana Desa di Kalimantan Timur masih menunjukkan progres yang terbatas. Dari total

841 desa penerima, tercatat sebanyak 829 desa telah menerima penyaluran Dana Desa earmark tahap I dengan realisasi mencapai Rp252,39 miliar. Sementara itu, pada tahap II baru tersalur kepada 76 desa dengan nilai sebesar Rp600,91 miliar, sehingga masih terdapat 754 desa yang belum menerima penyaluran tahap II. Sementara itu, untuk Dana Desa non-earmark, penyaluran tahap II baru terealisasi kepada 76 desa dengan nilai Rp668,15 miliar, sedangkan 752 desa lainnya belum tersalur.

Secara spasial, Kabupaten Kutai Timur menjadi wilayah dengan realisasi earmark tahap I tertinggi yakni Rp57,28 miliar untuk 139 desa. Diikuti oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Rp60,23 miliar untuk 191 desa. Sementara itu, Kabupaten Mahakam Ulu masih menyisakan 1 desa yang belum tersalur pada tahap I, dengan realisasi sebesar Rp15,62 miliar.

Pada tahap II, penyaluran earmark terbesar terjadi di Kabupaten Berau sebesar Rp390,60 miliar untuk 9 desa, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebesar Rp210,31 miliar untuk 4 desa. Namun demikian, terdapat 754 desa lainnya yang tersebar di Paser, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, PPU, Kutai Kartanegara, dan Mahakam Hulu masih belum menerima pencairan tahap II (Tabel II.8).

Tabel II.8 Realisasi Penyaluran Dana Desa per Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur Triwulan I 2025

Nama Pemda	Jml Desa	Jml Desa Earmark	Jml Desa Non Earmark	Non Earmark	Non Earmark Tahap II			Earmark Tahap I			Earmark Tahap II		
				Belum Salur	Jml Desa	Rupiah	Belum Salur	Jml Desa	Rupiah	Belum Salur	Jml Desa	Rupiah	Belum Salur
Kab. Paser	139	139	139	0	17	-	122	139	39.653.155.032	0	17	-	122
Kab. Berau	100	100	100	0	9	447.198.800	91	100	31.808.059.524	0	9	390.604.000	91
Kab. Kutai Barat	190	189	189	0	13	-	176	189	38.465.231.094	0	13	-	176
Kab. Kutai Timur	139	139	139	0	29	-	110	139	57.276.262.428	0	29	-	110
Kab. PPU	30	30	30	0	4	220.950.500	26	30	9.343.192.902	0	4	210.307.900	26
Kab. Kutai Kartanegara	193	193	191	0	4	-	187	193	60.226.316.064	0	4	-	189
Kab. Mahakam Ulu	50	40	40	1	0	-	40	39	15.619.522.956	1	0	-	40
TOTAL	841	830	828	1	76	668.149.300	752	829	252.391.740.000	1	76	600.911.900	754

Sumber: Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, diolah



Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 3

Perkembangan Inflasi Daerah



RINGKASAN EKSEKUTIF

- Inflasi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan II 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang disebabkan oleh peningkatan tekanan harga komoditas bahan makanan serta berakhirnya dampak kebijakan diskon tarif listrik yang diterapkan pada awal tahun 2025. Namun demikian, laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penyesuaian harga BBM yang mengalami penurunan pada bulan Juni 2025.
- Secara spasial, inflasi Kabupaten/Kota Kaltim tertinggi tercatat di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda sebesar 1,77% (yoy) dan terendah di Kabupaten Berau sebesar 0,77% (yoy), dengan tren laju inflasi di seluruh Kabupaten/Kota meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya kecuali Kabupaten Berau.

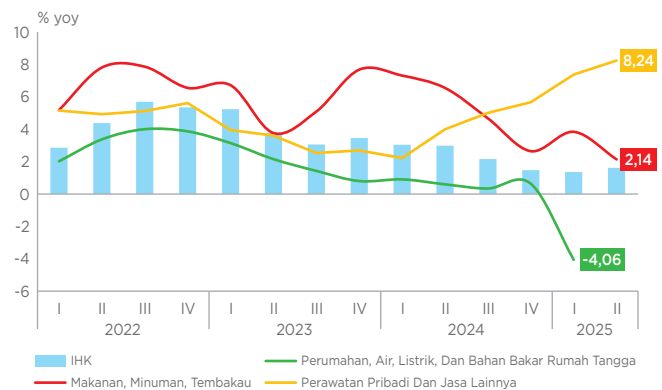


3.1. GAMBARAN UMUM

Realisasi inflasi Kaltim di triwulan II 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh peningkatan laju inflasi kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Inflasi pada periode laporan tercatat sebesar 1,62% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,36% (yoy) (Grafik III.1). Inflasi tersebut didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat memiliki laju inflasi sebesar 2,15% (yoy) dengan andil inflasi yakni 0,64% (yoy). Selain itu, peningkatan laju inflasi Kaltim juga diakibatkan oleh inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,24% (yoy) dengan andil sebesar 0,53% (yoy). Meskipun demikian kenaikan laju inflasi tahunan yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga dan kelompok transportasi dengan laju deflasi masing masing sebesar 0,84% (yoy) dan 0,27% (yoy).

Peningkatan tekanan inflasi Kaltim didorong oleh meningkatnya sisi *demand* di tengah berakhirnya musim panen untuk komoditas pangan, kenaikan harga emas perhiasan, dan berakhirnya dampak kebijakan diskon tarif listrik pada periode pelaporan. Kenaikan inflasi di periode pelaporan disebabkan oleh peningkatan *demand* karena bertepatan dengan momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha dan libur sekolah. Selain itu, peningkatan

Grafik III.2 Kelompok Utama Pendorong Inflasi Kaltim

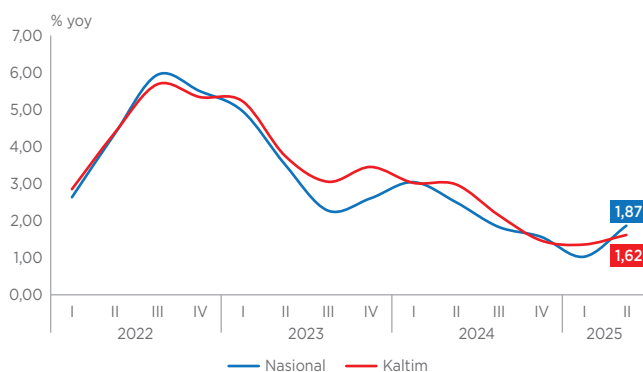


Sumber: BPS, diolah

tekanan juga didorong oleh adanya gangguan pasokan seiring berakhirnya panen sejumlah komoditas di triwulan II 2025. Disamping itu, juga terdapat tekanan dari harga emas perhiasan sebagai dampak peningkatan harga emas global. Komoditas ini konsisten menjadi penyumbang inflasi tahunan secara 3 bulan berturut-turut. Selain itu, berakhirnya dampak kebijakan diskon tarif listrik yang diterapkan pada awal tahun 2025 juga turut meningkatkan tekanan inflasi di periode pelaporan.

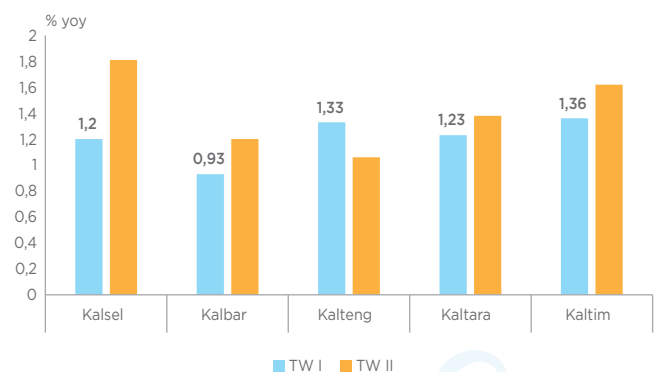
Secara regional Kalimantan, semua provinsi di Kalimantan mengalami peningkatan inflasi pada triwulan II 2025 kecuali Kalimantan Tengah. Inflasi terendah hingga tertinggi di level provinsi wilayah Kalimantan pada periode laporan secara berturut-turut terjadi pada Kalimantan Tengah sebesar 1,06% (yoy), Kalimantan Barat sebesar 1,20% (yoy), Kalimantan Utara sebesar 1,38% (yoy),

Grafik III.1 Inflasi Kaltim dan Nasional



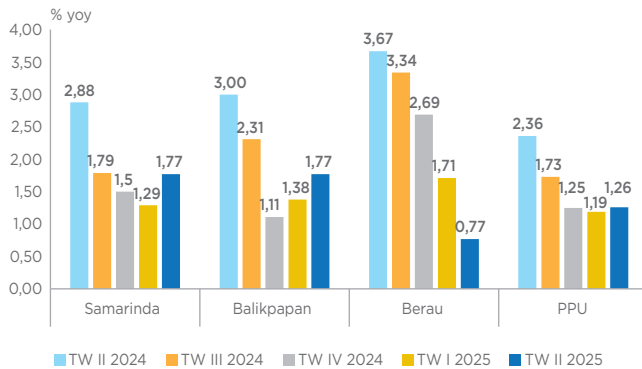
Sumber: BPS, diolah

Grafik III.3 Perbandingan Inflasi Gabungan Kota IHK di seluruh Provinsi di Kalimantan, triwulan I 2025 dan triwulan II 2025



Sumber: BPS, diolah

Grafik III.4 Inflasi Samarinda, Balikpapan, Berau, dan PPU



Sumber: BPS, diolah

Kalimantan Timur sebesar 1,62%, dan Kalimantan Selatan sebesar 1,81% (yoy) (Grafik III.3).

Secara spasial, inflasi di seluruh Kabupaten/Kota IHK di Kaltim tercatat meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya kecuali Kabupaten Berau. Hal ini seiring dengan peningkatan tekanan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Pada triwulan II 2025, inflasi tertinggi tercatat di Kota Balikpapan dan Kota Balikpapan dengan laju sebesar 1,77% (yoy), dilanjutkan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan laju inflasi 1,26% (yoy), Kabupaten Berau dengan laju inflasi 0,77% (yoy) (Grafik III.4).

3.1.1. Perkembangan Inflasi Daerah Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Berdasarkan andilnya, inflasi Kaltim terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Pada triwulan II 2025, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami tekanan inflasi sebesar 2,15% (yoy) dengan andil 0,64% (yoy). Selanjutnya kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi kontributor penyumbang inflasi tertinggi kedua dengan andil sebesar 0,53% (yoy) dan laju inflasi sebesar 8,24% (yoy). Realisasi kelompok ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni 7,37% (yoy). Sementara itu, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga tercatat mengalami deflasi lebih dalam sebesar 0,84% (yoy) dengan andil 0,04% (yoy), setelah mengalami inflasi di triwulan sebelumnya sebesar 0,64% (yoy) (Tabel III.1).

Berdasarkan komoditasnya, emas perhiasan dan kopi bubuk konsisten menjadi andil penyumbang inflasi tahunan selama triwulan II 2025. Kondisi ketidakpastian ekonomi global yang meningkat dan mendorong harga emas dunia serta

Tabel III.1 Kelompok Barang Pembentuk Inflasi Kaltim (yoy)

No	Kelompok Barang	Laju Inflasi Tahun 2024 (% yoy)				Andil Inflasi 2024 (% yoy)				Laju Inflasi Tahun 2025 (% yoy)		Andil Inflasi Tahun 2025 (% yoy)	
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw I	Tw II
	UMUM / TOTAL	3,04	2,99	2,16	1,47	3,04	2,99	2,16	1,47	1,36	1,62	1,36	1,62
1	Makanan, Minuman Dan Tembakau	7,31	6,55	4,67	2,64	2,09	1,89	1,35	0,77	3,84	2,15	1,14	0,64
2	Pakaian Dan Alas Kaki	1,56	1,64	2,37	2,12	0,07	0,07	0,11	0,09	0,42	0,44	0,02	0,02
3	Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,90	0,60	0,34	0,64	0,16	0,10	0,06	0,11	-4,06	0,63	-0,69	0,11
4	Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,29	-0,76	(0,20)	-0,06	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	-0,40	-0,84	-0,02	-0,04
5	Kesehatan	4,43	4,90	5,57	5,20	0,13	0,14	0,16	0,15	1,99	1,55	0,06	0,05
6	Transportasi	2,03	2,90	(0,40)	-2,03	0,27	0,39	-0,06	-0,28	0,88	-0,27	0,12	-0,04
7	Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	0,08	-0,34	(0,41)	-0,62	0,00	-0,02	-0,02	-0,03	-0,64	-0,17	-0,03	-0,01
8	Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	1,70	1,41	1,60	1,65	0,03	0,02	0,03	0,03	1,64	2,37	0,03	0,04
9	Pendidikan	1,08	0,81	1,71	1,71	0,05	0,04	0,08	0,07	1,38	2,37	0,06	0,10
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman/ Restoran	1,22	0,80	1,48	1,92	0,07	0,04	0,03	0,20	0,74	2,14	0,04	0,22
11	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	2,22	4,00	5,01	5,67	0,14	0,25	0,32	0,36	7,37	8,24	0,46	0,53

Sumber: BPS, diolah

Tabel III.2 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Tahunan Provinsi Kaltim Triwulan II 2025

April-25	Mei-25	Juni-25
Komoditas Inflasi	Komoditas Inflasi	Komoditas Inflasi
EMAS PERHIASAN	EMAS PERHIASAN	EMAS PERHIASAN
IKAN LAYANG/IKAN BENGGOL	KOPI BUBUK	KOPI BUBUK
KOPI BUBUK	MINYAK GORENG	MINYAK GORENG
CABAI RAWIT	SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	SIGARET KRETEK MESIN (SKM)
MINYAK GORENG	UDANG BASAH	BERAS
Komoditas Deflasi	Komoditas Deflasi	Komoditas Deflasi
ANGKUTAN UDARA	ANGKUTAN UDARA	BENSIN
BENSIN	BENSIN	ANGKUTAN UDARA
TARIF PULSA PONSEL	PENGHARUM CUCIAN/PELEMBUT	SABUN DETERGEN BUBUK
PENGHARUM CUCIAN/PELEMBUT	TELEPON SELULER	PENGHARUM CUCIAN
TELEPON SELULER	SABUN CAIR/CUCI PIRING	SABUN CAIR/CUCI PIRING

Sumber: BPS, diolah

peningkatan harga kopi secara global menjadi penyebab dua komoditas ini menjadi penyumbang andil inflasi selama triwulan II 2025. Selain itu, komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau seperti cabai rawit, udang basah juga turut menjadi komoditas penyumbang andil inflasi di triwulan II 2025. Telah selesainya momen panen komoditas ini serta adanya gangguan pasokan akibat curah hujan yang tinggi menjadi penyebab peningkatan tekanan harga pada beberapa komoditas tersebut (Tabel III.2).

Komoditas angkutan udara mengalami penurunan tekanan harga dan menjadi penyebab deflasi kelompok transportasi pada periode laporan. Normalisasi permintaan pasca momen Mudik Lebaran pada triwulan sebelumnya serta kebijakan pemberian diskon⁷ pada bulan Juni hingga Juli menjadi penyebab deflasi yang terjadi

pada komoditas angkutan udara. Disamping itu, adanya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di periode Mei hingga Juli 2025 juga turut menjadi penyumbang andil deflasi pada periode laporan.

3.1.2. Perkembangan Inflasi Daerah Berdasarkan Kabupaten/Kota IHK

Seluruh Kabupaten/Kota IHK di Kaltim mengalami laju inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2025, inflasi tertinggi tercatat di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan dengan laju sebesar 1,77% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,38% (yoy) dan 1,29% (yoy). Selanjutnya, inflasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Berau pada triwulan laporan secara berturut-

Tabel III.3 Inflasi Kaltim dan Kota Pembentuk

Wilayah	2022				2023				2024				2025	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Nasional	2,64	4,35	5,95	5,51	4,97	3,52	2,28	2,61	3,05	2,51	1,84	1,57	1,03	1,87
Kaltim	2,86	4,38	5,69	5,35	5,24	3,76	3,06	3,46	3,03	2,99	2,16	1,47	1,36	1,62
Samarinda	2,58	3,97	5,27	5,22	5,03	3,67	3,14	3,37	2,84	2,88	1,79	1,5	1,29	1,77
Balikpapan	3,23	4,93	6,26	5,52	5,51	3,87	2,96	3,60	2,95	3,00	2,31	1,11	1,38	1,77
Berau									4,05	3,67	3,34	2,69	1,71	0,77
PPU									3,18	2,36	1,73	1,25	1,19	1,26

Sumber : BPS, diolah

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi pada periode libur sekolah yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2025

Tabel III.4 Inflasi Kabupaten/Kota Pembentuk IHK di Kaltim Menurut Kelompok Barang

No	Kelompok Pengeluaran	Laju Inflasi								Andil Inflasi							
		2025-I	2025-II	2025-I	2025-II	2025-I	2025-II	2025-I	2025-II	2025-I	2025-II	2025-I	2025-II	2025-I	2025-II	2025-I	2025-II
		Samarinda (%yoy)	Samarinda (%yoy)	Balikpapan (%yoy)	Balikpapan (%yoy)	Berau (%yoy)	Berau (%yoy)	PPU (%yoy)	PPU (%yoy)	Samarinda (%yoy)	Samarinda (%yoy)	Balikpapan (%yoy)	Balikpapan (%yoy)	Berau (%yoy)	Berau (%yoy)	PPU (%yoy)	PPU (%yoy)
	UMUM / TOTAL	1,29	1,77	1,38	1,77	1,71	0,77	1,19	1,26	1,29	1,77	1,38	1,77	1,71	0,77	1,19	1,26
1	Makanan, Minuman Dan Tembakau	3,20	1,97	4,37	2,95	4,66	0,56	3,23	1,25	0,88	0,54	1,36	0,81	1,38	0,04	1,28	0,07
2	Pakaian Dan Alas Kaki	2,27	1,21	-2,27	-0,68	2,07	0,80	1,17	1,45	0,09	0,05	-0,10	-0,03	0,12	0,01	0,06	0,01
3	Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-4,85	0,27	-3,79	1,17	-1,70	0,48	-4,42	0,35	-0,87	0,05	-0,62	0,17	-0,30	0,02	-0,70	0,01
4	Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,62	-1,14	-0,91	-1,32	1,09	0,51	1,36	1,11	-0,02	-0,04	-0,04	-0,05	0,06	0,01	0,04	0,01
5	Kesehatan	2,77	1,75	1,25	1,41	0,48	0,52	-	3,27	0,10	0,06	0,03	0,03	0,01	0,00	0,06	0,01
6	Transportasi	0,83	-0,01	1,33	-0,25	-0,22	-1,42	-	0,06	0,11	0,00	0,18	-0,03	-0,03	-0,05	0,04	0,00
7	Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	-1,00	-0,23	-0,20	-0,15	-0,48	-0,05	0,01	-0,13	-0,06	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	-0,04	0,00
8	Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	1,48	1,87	1,54	3,10	1,24	1,11	-	3,85	0,03	0,03	0,03	0,04	0,02	0,00	0,07	0,01
9	Pendidikan	1,26	1,46	1,45	3,70	1,69	1,69	-	1,21	0,06	0,06	0,06	0,14	0,07	0,02	0,04	0,00
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	3,60	3,10	0,35	0,99	2,09	1,78	-	2,40	0,41	0,36	0,04	0,09	0,14	0,03	0,16	0,03
11	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	8,37	10,04	7,92	7,33	3,95	5,91	0,01	3,84	0,56	0,69	0,45	0,38	0,27	0,11	0,18	0,03

Sumber : BPS, diolah

turut tercatat sebesar 1,26% (yoy) dan 0,77% (yoy) (Tabel III.3). Peningkatan tekanan inflasi di 3 kota IHK didorong oleh kenaikan andil Penurunan tekanan inflasi di Kabupaten Berau didorong terutama oleh deflasi kelompok transportasi yang memberikan andil tertinggi deflasi di Kabupaten Berau (Tabel III.4).

Jika dibandingkan berdasarkan kelompok pengeluarannya, kelompok makanan, minuman dan tembakau memegang andil inflasi tertinggi secara spasial di Provinsi Kaltim. Kelompok ini tercatat mengalami tekanan inflasi di seluruh kabupaten/ kota di wilayah Kaltim. Adapun sejumlah komoditas yang mengalami peningkatan tekanan harga secara spasial diantaranya cabai rawit, minyak goreng, udang basah dan beras. Sejumlah komoditas tersebut mengalami peningkatan tekanan inflasi didorong oleh kondisi gangguan pasokan akibat telah selesainya panen serta tingginya curah hujan yang mengganggu proses distribusi dari daerah sentra. Adanya kebijakan pembatasan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di bulan Juni juga tercatat membuat peningkatan harga komoditas beras di kota Samarinda dan Balikpapan.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga memberikan andil yang cukup tinggi pada tekanan IHK secara spasial di triwulan laporan. Kenaikan harga emas perhiasan yang terjadi di seluruh Kabupaten/Kota menjadi penyebab tingginya tekanan inflasi pada kelompok ini. Kondisi ketidakpastian ekonomi nasional dan global yang tinggi mendorong adanya peningkatan permintaan dari masyarakat untuk pembelian emas sebagai alternatif simpanan masa depan. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami laju inflasi yang lebih tinggi di hampir seluruh Kabupaten/Kota IHK di Kaltim.

Sementara itu, kelompok transportasi mengalami deflasi pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim. Kelompok transportasi pada periode laporan mencatatkan laju deflasi yang cukup dalam di seluruh Kabupaten/Kota, setelah mengalami inflasi pada periode sebelumnya kecuali Kabupaten Berau. Laju deflasi yang lebih dalam di seluruh wilayah Kaltim didorong oleh implementasi kebijakan diskon angkutan udara pada bulan Juni hingga Juli.

3.2. TRACKING INFLASI TRIWULAN III 2025

Tekanan inflasi pada triwulan III 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2025 dan berada pada rentang target sasaran inflasi. Laju inflasi yang lebih tinggi terutama disebabkan oleh periode pembayaran biaya sekolah mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, berakhirnya diskon tarif angkutan udara pada bulan Agustus serta penyesuaian harga BBM di bulan Juli turut mendorong tekanan inflasi di triwulan III. Meskipun demikian, laju inflasi yang lebih tinggi diperkirakan akan tertahan oleh potensi penurunan beberapa komoditas seperti beras dan bawang merah seiring dengan penyaluran beras SPHP serta potensi panen bawang merah yang mendorong penurunan inflasi triwulan II 2025.

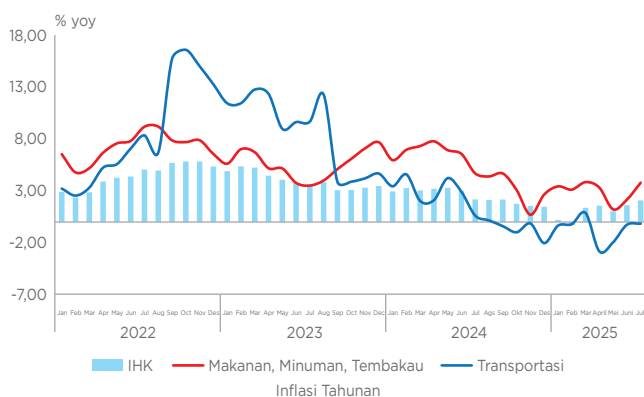
Pada Juli 2025, inflasi Provinsi Kaltim secara tahunan dan bulanan tercatat melambat dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya. Pada bulan Juli 2025 inflasi tahunan tercatat sebesar 2,08% (yoy) atau menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 1,62% (yoy) (Grafik III.5). Sementara itu, inflasi bulanan pada periode yang sama tercatat mengalami inflasi sebesar 0,06% (mtm) atau juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,38% (mtm) (Grafik III.6).

Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi pada bulan Juli 2025 didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau memiliki andil sebesar 3,78% (yoy) dengan laju inflasi sebesar 1,12% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pangsa dan laju di bulan April 2025 yang masing-masing tercatat sebesar 4,68% (yoy) dan 1,36% (yoy) (Tabel III.5). Penurunan laju inflasi tahunan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau didorong oleh penurunan harga komoditas pangan seperti daging ayam ras, kangkung, dan bayam.

Kelompok transportasi menjadi penahan laju inflasi yang lebih tinggi pada Juli 2025. Kelompok transportasi memiliki pangsa sebesar 0,38% (yoy) dan mengalami laju sebesar -2,83% (yoy), mengalami deflasi jika dibandingkan dengan pangsa dan laju inflasi transportasi bulan Juli 2025 yang masing-masing tercatat sebesar 0,61% (yoy) dan 0,08% (yoy) (Tabel III.5). Deflasi yang terjadi pada kelompok transportasi diakibatkan oleh pemberian diskon tarif angkutan udara saat bulan Juni-Juli 2025.

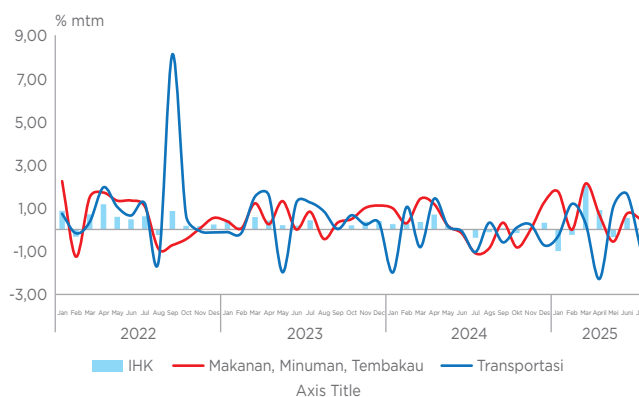
Berdasarkan *tracking* terkini, inflasi triwulan III 2025 diperkirakan berada pada rentang target sasaran dan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi pada triwulan III 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan

Grafik III.5 Inflasi Tahunan (year-on-year, yoy) Kaltim



Sumber: BPS, diolah

Grafik III.6 Inflasi Bulanan (month-to-month, mtm) Kaltim



Sumber: BPS, diolah

Tabel III.5 Inflasi Kaltim Menurut Kelompok Barang

Kelompok Pengeluaran	Juni-25				Juli-25			
	Andil Inflasi (%mtm)	Laju Inflasi (%mtm)	Andil Inflasi (%yoy)	Laju Inflasi (%yoy)	Andil Inflasi (%mtm)	Laju Inflasi (%mtm)	Andil Inflasi (%yoy)	Laju Inflasi (%yoy)
UMUM	0,54	0,54	1,62	1,62	0,06	0,06	2,08	2,08
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	0,22	0,74	0,64	2,15	0,14	0,48	1,12	3,78
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	-0,01	-0,24	0,02	0,44	0,00	0,07	0,00	0,01
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0,04	0,24	0,11	0,63	0,01	0,03	0,11	0,66
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	-0,02	-0,47	-0,04	-0,84	0,00	-0,09	-0,05	-1,09
KESEHATAN	0,00	0,00	0,05	1,55	0,00	0,08	0,05	1,56
TRANSPORTASI	0,21	1,64	-0,04	-0,27	-0,12	-0,94	-0,02	-0,16
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	0,00	0,00	-0,01	-0,17	-0,01	-0,11	-0,01	-0,26
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	0,00	0,00	0,04	2,37	0,00	-0,08	0,03	1,62
PENDIDIKAN	0,04	0,88	0,10	2,37	0,05	1,07	0,13	3,11
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	0,02	0,21	0,22	2,14	0,01	0,14	0,23	2,18
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	0,04	0,63	0,53	8,24	0,02	-0,25	0,49	7,63

Sumber: BPS, diolah

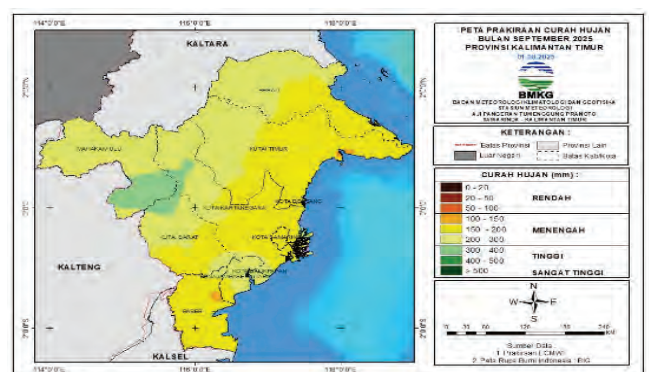
Tabel III.6 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Kaltim Juli 2025

Juli-25	
Komoditas Inflasi (mtm)	Komoditas Inflasi (yoy)
TOMAT	EMAS PERHIASAN
CABAI RAWIT	TOMAT
BERAS	BERAS
BIAYA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	KOPI BUBUK
BAWANG MERAH	MINYAK GORENG
Komoditas Deflasi (mtm)	Komoditas Deflasi (yoy)
ANGKUTAN UDARA	ANGKUTAN UDARA
POPOK BAYI SEKALI PAKAI	BENSIN
SABUN DETERGEN BUBUK	SABUN DETERGEN BUBUK
SABUN MANDI CAIR	PENGHARUM CUCIAN/PELEMBUT
PARFUM	TELEPON SELULER

Sumber: BPS, diolah

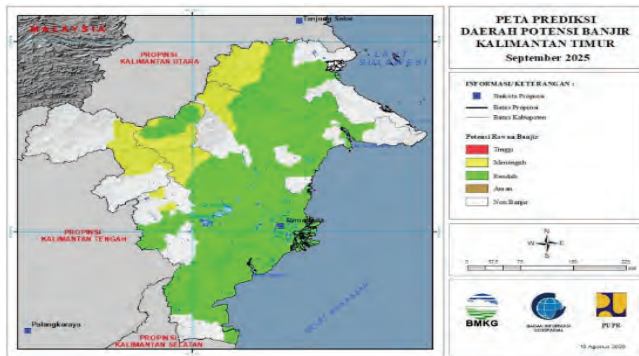
dengan triwulan sebelumnya, yang disebabkan karena periode pembayaran biaya pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Lebih lanjut, berakhirnya diskon tarif angkutan udara di bulan Agustus menjadi pendorong laju inflasi yang lebih tinggi. Meskipun demikian, terdapat beberapa *downside risk* yang berpotensi menurunkan tekanan inflasi Kaltim di triwulan III 2025, terutama dari sisi *supply*, seiring dengan massifnya penyaluran beras SPHP mulai bulan Agustus 2025. Lebih lanjut, curah hujan pada bulan Agustus-September dapat memengaruhi hasil produksi pertanian khususnya komoditas hortikultura yang rentan terhadap perubahan cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan pada

Gambar III.1 Peta Prakiraan Curah Hujan Kaltim September 2025



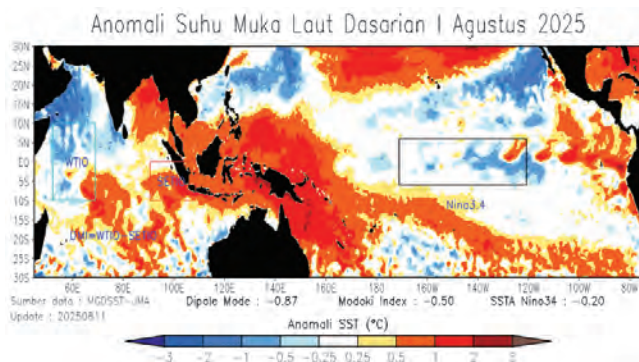
Sumber: BMKG Stasiun Meteorologi Kelas III APT Pranoto - Samarinda

Gambar III.2 Peta Prakiraan Daerah Potensi Banjir Kaltim September 2025



Sumber: BMKG Stasiun Meteorologi Kelas III APT Pranoto - Samarinda

Gambar III.3 Peta Anomali Suhu Muka Laut Dasarian I Agustus 2025



Sumber: BMKG

September 2025, sebagian besar wilayah Kaltim akan mengalami curah hujan intensitas menengah hingga tinggi (200-500 mm per bulan) (Gambar III.1), serta berpotensi mengalami banjir dengan intensitas rendah hingga menengah (Gambar III.2). Hal tersebut tidak terlepas dari fenomena anomali iklim global menunjukkan Anomali SST di Nino3.4 berada pada indeks IOD berada pada kategori netral dengan indeks -0,50. Adapun fase Netral IOD diprediksi bertahan hingga semester kedua tahun 2025. Sementara itu, anomali SST di Nino3.4 menunjukkan indeks sebesar -0,20 (Gambar III.3).

3.3. PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Koordinasi dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Kalimantan Timur terus dilakukan baik di level Provinsi

maupun Kabupaten/Kota guna merumuskan berbagai langkah pengendalian inflasi di daerah. Secara nasional, strategi pengendalian inflasi dirumuskan dengan kerangka 4K, yaitu menciptakan kestabilan harga, menjamin ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, dan melakukan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. Upaya pengendalian inflasi pangan juga dilaksanakan berdasarkan 7 (tujuh) program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) tahun 2025 yang meliputi penguatan ketahanan komoditas pangan strategis, penguatan kapasitas budidaya pangan mandiri, optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD), dukungan fasilitas distribusi pangan, penguatan digitalisasi dan data pangan, dukungan optimalisasi Operasi Pasar/Pasar Murah/SPHP/GPM, serta penguatan koordinasi dan komunikasi. Adapun beberapa program pengendalian inflasi yang dilakukan sepanjang triwulan II 2025 antara lain sebagai berikut.

3.3.1. Keterjangkauan Harga

Dalam rangka menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota terus bersinergi dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk pelaksanaan program-program strategis dalam rangka meminimalisir lonjakan harga, mengelola permintaan, dan mencapai ketahanan pangan. Beberapa program yang telah dilakukan diantaranya Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah dengan frekuensi 13 kali sepanjang triwulan II 2025 dan berlokasi hampir di seluruh wilayah Kaltim.

Komitmen TPID dalam upaya pengendalian harga dan menjaga ketersediaan pasokan di masyarakat maka sejak tahun 2024, TPID Provinsi Kaltim juga telah membentuk Tim *Early Warning System* (EWS) yang memiliki tujuan utama untuk melakukan *monitoring* perkembangan harga serta melakukan asesmen proyeksi inflasi untuk memperoleh rekomendasi tindak lanjut pengendalian inflasi ke depan agar berada pada kisaran target nasional $2,5\% \pm 1\%$.

3.3.2. Ketersediaan Pasokan

Ketersediaan pasokan merupakan salah satu langkah penting dalam mengendalikan inflasi dari sisi *supply*. Hal ini dikarenakan karakteristik pasokan menjadi peran krusial dalam Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah bukan sentra produksi. Untuk itu menjaga ketersediaan pasokan dan didukung dengan sinergi dan kerjasama untuk mendatangkan komoditas dari luar wilayah Kaltim menjadi strategi dalam mengendalikan inflasi. Adapun saat ini dalam upaya mendukung ketersediaan, telah dilaksanakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan beberapa wilayah seperti Kabupaten Ngawi dengan Kabupaten Kutai Timur, Kota Batu dengan Kabupaten Kutai Timur, Kota dan Kabupaten Enrekang dengan Kota Samarinda. Lebih lanjut, bentuk kerjasama ini merupakan B2B dengan komoditas berupa beras, telur ayam, sayur dan buah.

3.3.3. Kelancaran Distribusi

Dalam rangka memantau kelancaran distribusi, TPID wilayah Kalimantan Timur melakukan pemberian subsidi ongkos angkut skala mikro pada kegiatan Pasar Murah dan Pasar Tani. Pada triwulan II 2025, pemberian bantuan subsidi ongkos angkut memiliki frekuensi sebanyak 4 kali. Adapun subsidi ongkos ini difokuskan untuk komoditas pangan strategis, seperti aneka cabai, dan komoditas hortikultura. Adapun dukungan dalam bentuk subsidi ongkos angkut telah diberikan kepada KWT Wanita Mandiri Kukar,

Poktan Kedoyan Kukar, Petani Mariyasih, dalam rangka Gerakan Pangan Murah.

3.3.4. Komunikasi Efektif

Untuk mendukung komunikasi efektif, TPID Kalimantan Timur telah melakukan beberapa kegiatan yang meliputi peningkatan koordinasi, kapasitas SDM TPID, serta pengendalian ekspektasi masyarakat terhadap inflasi. Selama triwulan II 2025, telah dilakukan 1 (satu) kali *High Level Meeting* (HLM) TPID, yaitu oleh TPID Kota Bontang yang membahas isu pengendalian inflasi serta stabilisasi ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok dan barang strategis saat HBKN Idul Adha. Selain itu, juga telah dilaksanakan secara rutin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dengan Kemendagri yang dilakukan mingguan dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi internal masing-masing TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM TPID juga telah dilakukan 3 (tiga) kali *capacity building*, yakni *capacity building* penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi se-Kalimantan Timur periode 2025 – 2027, Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Kota Samarinda periode 2025 – 2027, serta Evaluasi Program Kerja Pengendalian Inflasi Kalimantan Timur. Adapun penyusunan peta jalan ini membutuhkan penyalarsan antara program kerja masing-masing OPD dengan target Tim Pengendalian Inflasi Daerah agar perencanaan pengendalian inflasi memiliki arah yang sejalan.

Tabel III.7. Program Pengendalian Inflasi Daerah Kaltim Periode April-Juni 2025

KEGIATAN	FREKUENSI	KETERANGAN
<i>High Level Meeting</i>	1	<i>High Level Meeting</i> TPID Kota Bontang semester I menjelang hari raya besar keagamaan Idul Adha tahun 2025 dengan tema Akselerasi kinerja TPID : evaluasi, inovasi, dan sinergitas pengendalian inflasi daerah.
Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah, dan Operasi Pasar	18	Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah, dan Operasi pasar yang dilakukan oleh TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk memastikan ketersediaan pasokan serta untuk menjamin keterjangkauan harga pangan dan bapokting untuk pengendalian harga pangan selama Triwulan II 2025.
<i>Capacity Building</i>	3	Telah dilaksanakan <i>Capacity Building</i> dalam rangka Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi se-Kalimantan Timur periode 2025 – 2027, Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Kota Samarinda periode 2025 – 2027, serta Evaluasi Program Kerja Pengendalian Inflasi Kalimantan Timur.

Sumber: TPID Wilayah Kalimantan Timur

BAB 4

Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM



RINGKASAN EKSEKUTIF

- Meskipun mengalami perlambatan kinerja, fungsi intermediasi perbankan di Kaltim masih terjaga didukung oleh tingkat risiko yang rendah.
- Sejalan dengan kredit, Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Kaltim turut mengalami perlambatan disebabkan utamanya oleh kontraksi DPK pemerintah.
- Pembiayaan syariah dan kredit UMKM di Kaltim menunjukkan kinerja positif, dengan risiko pembiayaan syariah dan kredit UMKM yang terkendali pada level rendah.



ELECTRONIC QUEUE

CLIENT	WINDOW
A 80.....	2
F82.....	
C10.....	

4.1. GAMBARAN UMUM

Penyaluran kredit Kaltim mengalami perlambatan, disebabkan utamanya oleh kontraksi kredit modal kerja. Penyaluran kredit Kaltim pada triwulan II 2025 terkontraksi, sejalan dengan kontraksi kredit modal kerja akibat penurunan optimisme pelaku usaha di tengah peningkatan risiko geopolitik. Lebih lanjut, tercatat pertumbuhan kredit sektor utama Kaltim turut mengalami kontraksi sejalan dengan perlambatan di PDRB-nya. Secara spasial, penyaluran kredit pada sebagian besar kabupaten/kota Kaltim menunjukkan pertumbuhan positif, dan masih terkonsentrasi di Kota Balikpapan dan Samarinda. Penyaluran kredit yang tumbuh positif diikuti dengan risiko kredit yang tetap rendah, tercermin dari rasio *non-performing loan* (NPL) yang rendah dan berada di bawah *threshold* 5%. Rasio NPL di Kaltim yang rendah ini tidak terlepas dari upaya penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko oleh sektor perbankan.

Sejalan dengan pertumbuhan kredit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) turut mengalami perlambatan. Berdasarkan golongan nasabah, DPK Kaltim didominasi oleh nasabah perseorangan yang mencatatkan perlambatan seiring dengan tren penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di tengah kewaspadaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Lebih lanjut, DPK korporasi dan pemerintah turut mencatatkan perlambatan, seiring dengan kebutuhan likuiditas korporasi dalam rangka mendukung kegiatan usaha serta kecenderungan pemerintah dalam menjaga fleksibilitas fiskal di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Di sisi lain, DPK Syariah tercatat masih tumbuh positif mengindikasikan kepercayaan terhadap perbankan syariah serta potensi penguatan intermediasi syariah Kaltim ke depan.

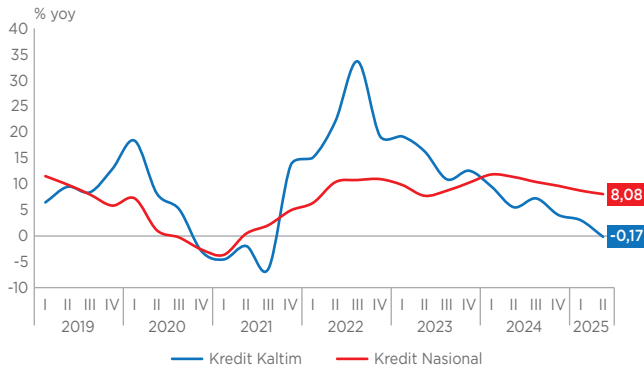
4.2. PERKEMBANGAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN DAERAH

4.2.1. Perkembangan Penyaluran Kredit dan Dana Pihak Ketiga

Kinerja penyaluran kredit Kaltim melambat sejalan dengan perlambatan pertumbuhan kredit nasional. Pada triwulan II 2025, penyaluran kredit Kaltim terkontraksi sebesar 0,17% (yoy), setelah tumbuh positif pada triwulan sebelumnya sebesar 3,03% (yoy). Penurunan kinerja pembiayaan juga terjadi pada tingkat nasional, namun masih terjaga positif pada level 8,08% (yoy) melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,74% (yoy) (Grafik IV.1). Adapun pertumbuhan kredit Kaltim yang lebih rendah dibandingkan nasional mulai tercatat sejak awal tahun 2024, setelah sebelumnya selalu melampaui rata-rata nasional.

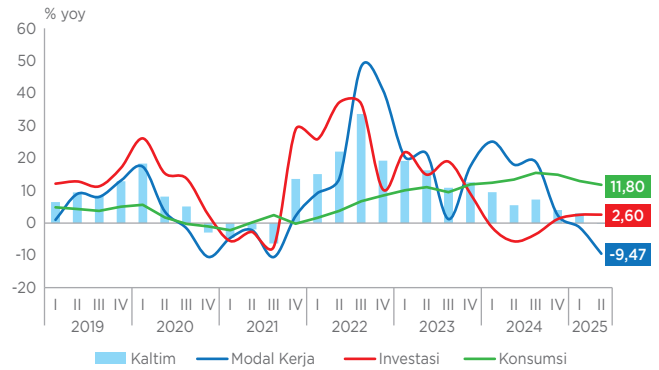
Berdasarkan jenis penggunaan, perlambatan kredit Kaltim disebabkan utamanya oleh kontraksi kredit modal kerja. Pada triwulan II 2025, kredit modal kerja Kaltim tercatat mengalami kontraksi sebesar 9,47% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sejalan dengan optimisme pelaku usaha yang cenderung menurun akibat peningkatan risiko geopolitik. Lebih lanjut, kredit konsumsi turut mencatatkan perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dari 13,03% (yoy) menjadi 11,80% (yoy) seiring dengan penurunan konsumsi rumah tangga pasca momen HBKN Idul Fitri pada triwulan I. Adapun kredit investasi tumbuh sebesar 2,60% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,55% (yoy) (Grafik IV.2). Berdasarkan golongan debitur, korporasi mendominasi pangsa penyaluran kredit yang mencapai 62,46% dari total kredit, disusul oleh perseorangan dan pemerintah dengan pangsa masing-masing sebesar 31,58% dan 0,02% (Grafik IV.3).

Grafik IV.1 Perkembangan Kredit Kaltim dan Nasional



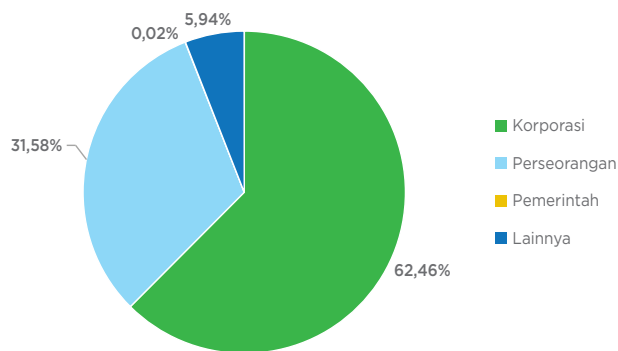
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.2 Perkembangan Kredit Kaltim Berdasarkan Penggunaannya



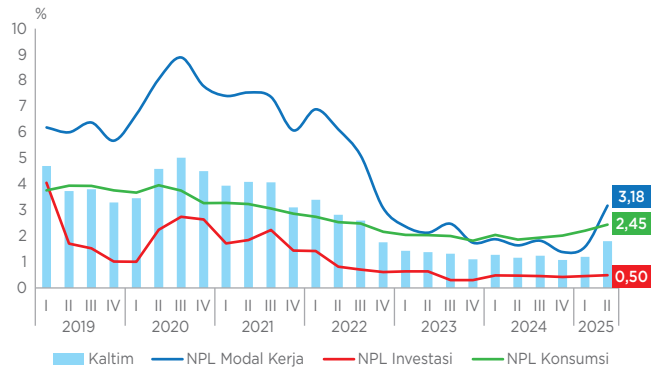
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.3 Pangsa Penyaluran Kredit Berdasarkan Debitur



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.4 Perkembangan NPL Kredit Kaltim Berdasarkan Penggunaannya



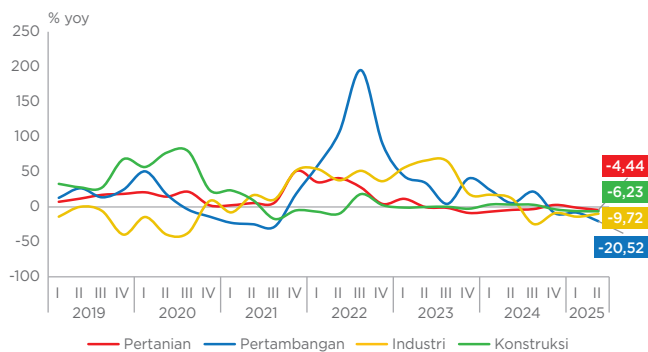
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Walau mengalami perlambatan, fungsi intermediasi perbankan di Kaltim masih terjaga didukung oleh tingkat risiko yang rendah. Pada triwulan II 2025, rasio *non-performing loan* (NPL) di Kaltim tercatat sebesar 1,81%, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,20%. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan NPL pada seluruh jenis penggunaan baik kredit modal kerja (3,18%), investasi (0,50%), maupun konsumsi (2,45%). Meski demikian, rasio NPL di Kaltim masih terjaga rendah dan berada di bawah *threshold* 5%, didukung oleh upaya penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko oleh pihak perbankan (Grafik IV.4).

4.2.1.1. Kinerja Penyaluran Kredit Sektoral di Kaltim

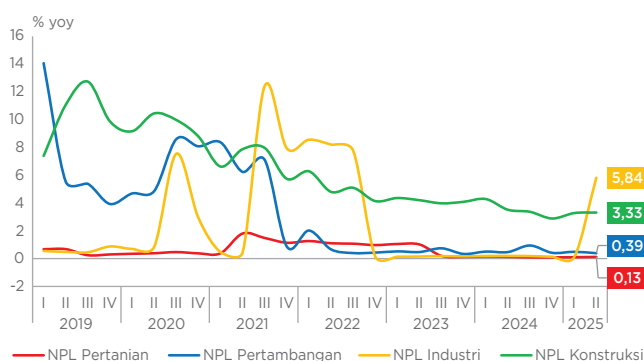
Penyaluran kredit pada sektor utama Kalimantan Timur turut mencatatkan perlambatan. Secara sektoral, perlambatan kredit Kaltim didorong utamanya oleh kontraksi pada sejumlah sektor utama meliputi, pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Tercatat sektor pertambangan mengalami kontraksi paling dalam sebesar 20,52% (yoy), sejalan dengan perlambatan pertumbuhan PDRBnya akibat pelemahan permintaan barubara dari negara mitra dagang utama (Grafik IV.5). Selain itu, kredit sektor industri pengolahan dan konstruksi turut mengalami kontraksi masing-masing sebesar 9,72% (yoy) dan 6,23% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan positif masih

Grafik IV.5 Perkembangan Kredit Sektoral Kaltim



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.7 Perkembangan NPL Kaltim Berdasarkan Sektor

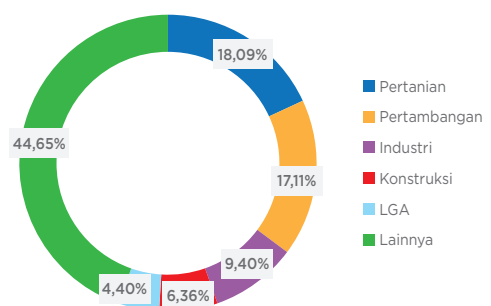


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

tercatat pada kredit sektor rumah tangga dan transgud walau melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sejalan dengan normalisasi permintaan pasca momen HBKN. Sementara itu, pangsa kredit sektor pertambangan tetap signifikan, mencapai 18,09% dari total penyaluran kredit di Kalimantan Timur (Grafik IV.6).

Walau pertumbuhan kredit sektor utama Kaltim mengalami kontraksi, rasio NPL secara umum masih terjaga rendah. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) sebagian besar sektor utama Kaltim tercatat berada pada level yang rendah di bawah *threshold* 5%. Adapun rasio NPL sektor pertanian dan pertambangan terjaga rendah di bawah 1%, masing-masing sebesar 0,13% dan 0,39%. Di sisi lain, NPL sektor industri pengolahan meningkat menjadi 5,84% utamanya disebabkan oleh ekspansi subsektor industri kayu lapis untuk memenuhi tingginya permintaan ekspor ke Amerika Serikat, namun belum sepenuhnya diikuti dengan perbaikan kinerja pembayaran debitur (Grafik IV.7).

Grafik IV.6 Share Kredit Kaltim Berdasarkan Sektor



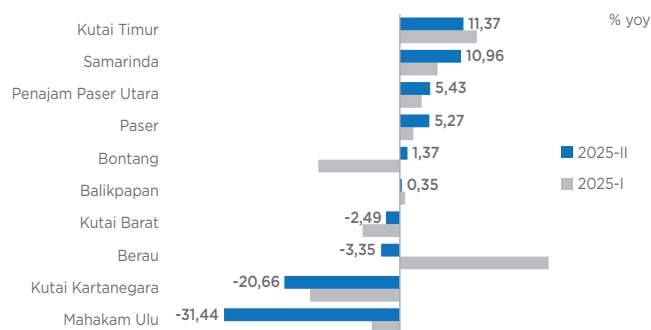
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

4.2.1.2. Kinerja Penyaluran Kredit Secara Spasial

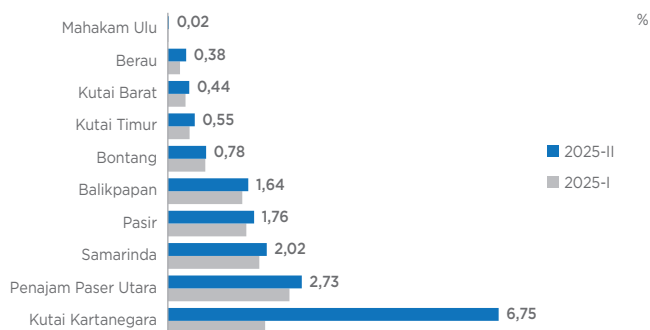
Secara spasial, penyaluran kredit pada sebagian kabupaten/kota di Kaltim tumbuh positif. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan kredit tertinggi di triwulan II 2025 adalah Kabupaten Kutai Timur yang tercatat sebesar 11,37% (yoy), disusul oleh Kota Samarinda dengan 10,96% (yoy) (Grafik IV.8). Sementara itu, di beberapa wilayah Kaltim lain khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu tercatat mengalami kontraksi yang cukup dalam masing-masing sebesar 26,55% (yoy) dan 31,44% (yoy). Lebih lanjut, Kabupaten Berau turut mencatatkan kontraksi setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh tinggi (Grafik IV.8).

Pertumbuhan positif penyaluran kredit spasial juga diiringi dengan NPL yang terjaga rendah. Hampir seluruh kabupaten/kota di Kaltim mencatatkan rasio NPL yang rendah dan berada di bawah *threshold* 5%. Adapun Kabupaten Mahakam Ulu mencatatkan NPL paling rendah sebesar 0,02% sedangkan NPL tertinggi tercatat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 6,75% (Grafik IV.9).

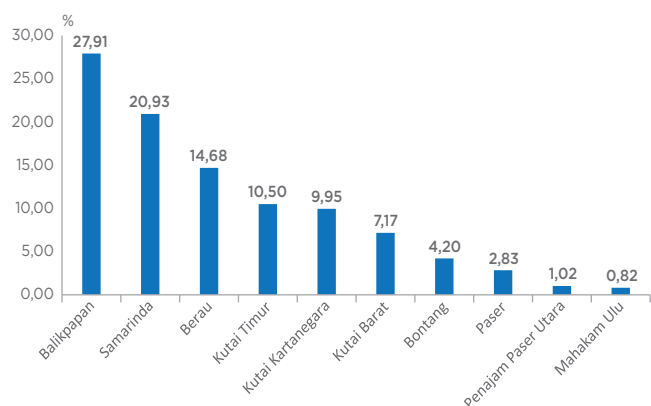
Pada triwulan II 2025, penyaluran kredit Kaltim masih terkonsentrasi di Kota Balikpapan dan Samarinda. Sebesar 48,84% dari total kredit yang disalurkan di Kaltim tercatat mengalir ke Kota Balikpapan dan Samarinda. Besarnya pangsa penyaluran kredit di kedua kota tersebut tidak terlepas dari perannya sebagai pusat kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur. Sebaliknya, Kabupaten Penajam Paser Utara menempati posisi terendah dengan pangsa terhadap kredit Kaltim hanya sebesar 0,82% (Grafik IV.10).

Grafik IV.8 Pertumbuhan Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.9 Perkembangan NPL Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.10 Pangsa Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Kaltim

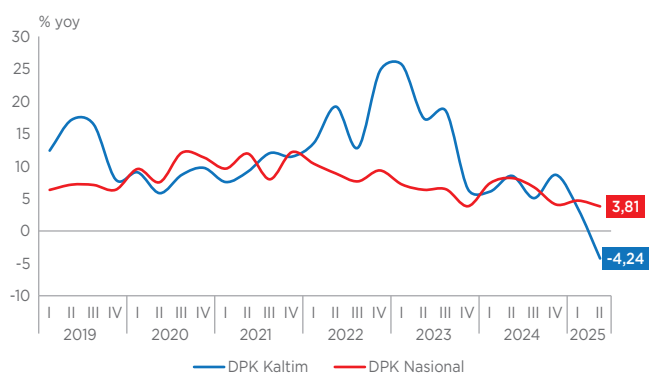
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

4.2.1.3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga di Kalimantan Timur

Dana Pihak Ketiga (DPK) Kaltim mengalami kontraksi, didorong oleh kontraksi giro dan deposito. Pada triwulan II 2025, penghimpunan DPK Kaltim tercatat mengalami kontraksi sebesar 4,24% (yoy). Di sisi lain, DPK nasional masih tumbuh positif sebesar 3,81% (yoy), walau turun dibandingkan dengan periode sebelumnya (Grafik IV.11). Penurunan DPK Kaltim pada periode laporan, terjadi seiring dengan kontraksi pada giro dan deposito masing-masing sebesar 21,14% (yoy) dan 2,08% (yoy). Lebih lanjut, walau masih tumbuh positif, pertumbuhan tabungan tercatat mengalami perlambatan menjadi sebesar 7,46% (yoy) dari 9,77% (yoy) pada periode sebelumnya (Grafik IV.12). Berdasarkan pangsaanya, DPK

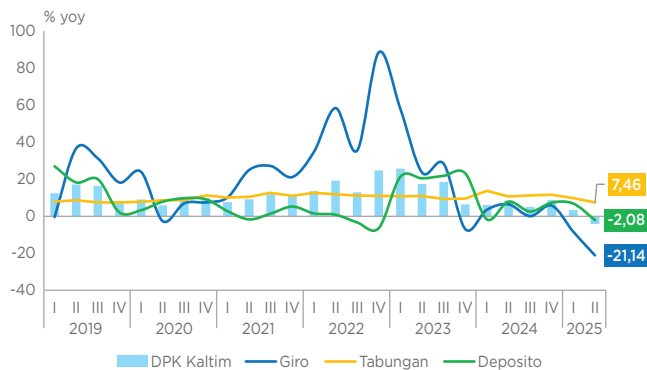
Kaltim didominasi oleh tabungan dengan pangsa mencapai 45,15%, sedangkan deposito dan giro memiliki pangsa yang relatif sama yakni sebesar 27,55% dan 26,30% (Grafik IV.13).

Berdasarkan golongan nasabah, DPK Kaltim didominasi oleh nasabah perseorangan. Pada triwulan II 2025, pangsa DPK perseorangan mencapai 57,22% dari total DPK Kaltim, disusul oleh korporasi dan pemerintah dengan pangsa sebesar 30,38% dan 9,71% (Grafik IV.14). Adapun DPK perseorangan Kaltim tercatat masih tumbuh positif sebesar 2,38% (yoy), walau melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya (Grafik IV.15). Kondisi ini sejalan dengan tren penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang mencerminkan kewaspadaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi sekaligus masih terbatasnya daya beli.

Grafik IV.11 Perkembangan DPK Kaltim dan Nasional

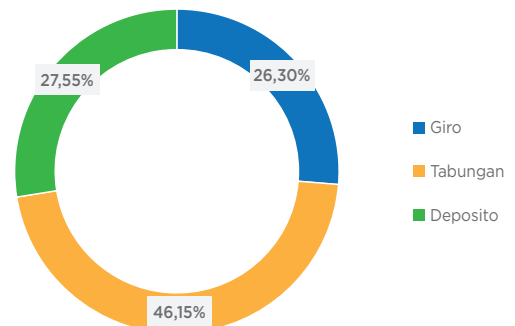
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.12 Perkembangan DPK Kaltim Berdasarkan Sumbernya



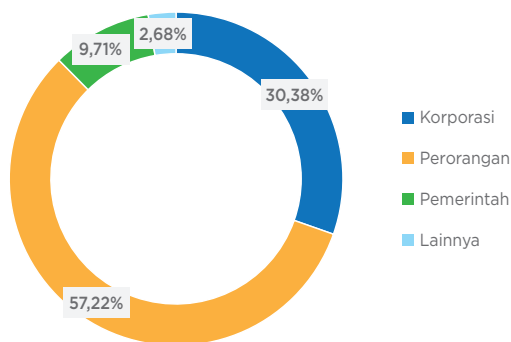
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.13 Pangsa DPK Kaltim Berdasarkan Sumber



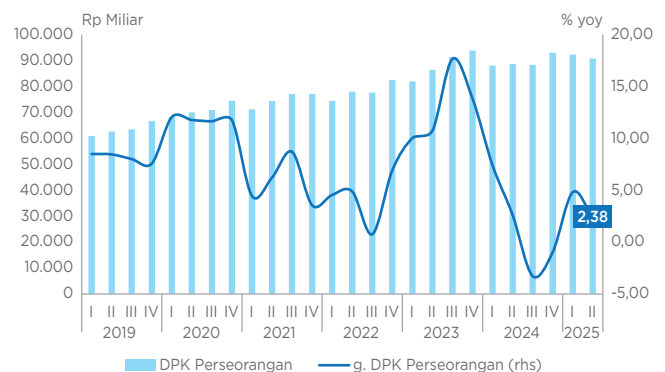
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.14 Pangsa DPK Kaltim Berdasarkan Golongan Nasabah



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.15 Perkembangan DPK Perseorangan Kaltim



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

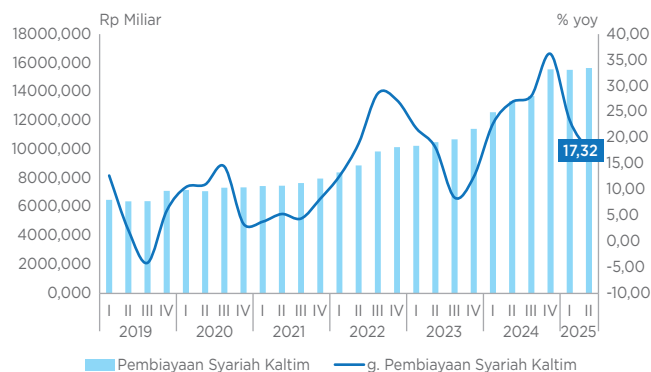
4.2.2. Perkembangan Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Syariah

Kinerja pembiayaan syariah tetap tumbuh kuat dan secara konsisten mengalami peningkatan pangsa terhadap total pembiayaan Kaltim. Meski berada dalam kondisi melambat, pembiayaan syariah tumbuh positif sebesar 17,32% (yoy) pada triwulan II 2025 (Grafik IV.16). Adapun pangsa pembiayaan syariah terhadap total penyaluran pembiayaan di Kaltim terus melanjutkan tren peningkatan mencapai sebesar 8,62% dari 8,28% pada periode sebelumnya (Grafik IV.17). Hal ini mengindikasikan tren peningkatan preferensi masyarakat terhadap pembiayaan syariah di Kaltim yang terus berkembang. Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan syariah untuk modal kerja masih mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 44,09% (yoy), meski melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Perlambatan juga terjadi pada pembiayaan syariah untuk investasi yang melambat menjadi 13,17% (yoy) dari 20,35% (yoy). Di sisi lain, pembiayaan konsumsi menunjukkan sedikit peningkatan pada periode laporan dengan pertumbuhan sebesar 13,18% (yoy) (Grafik IV.18).

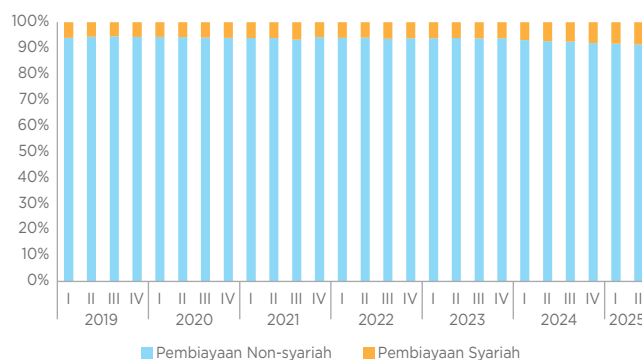
Kinerja baik pembiayaan syariah di Kaltim juga tercermin dari rasio *Non-Performing Financing (NPF)* yang terjaga rendah. Rasio NPF Kaltim pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 0,89%, sedikit meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Rendahnya rasio NPF ini menggambarkan risiko pembiayaan syariah di Kaltim yang terkendali. Jika ditinjau berdasarkan penggunaannya, rasio NPF pada pembiayaan modal kerja, konsumsi, dan investasi masing-masing tercatat sebesar 1,61%, 1,45%, dan 0,21% (Grafik IV.19).

Grafik IV.16 Perkembangan Pembiayaan Syariah Kaltim



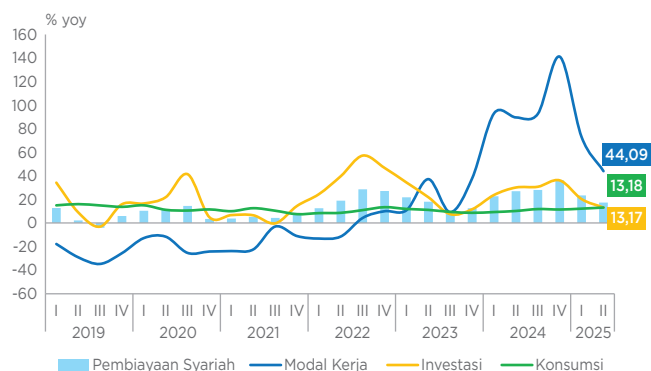
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.17 Perkembangan Pangsa Pembiayaan Syariah Kaltim



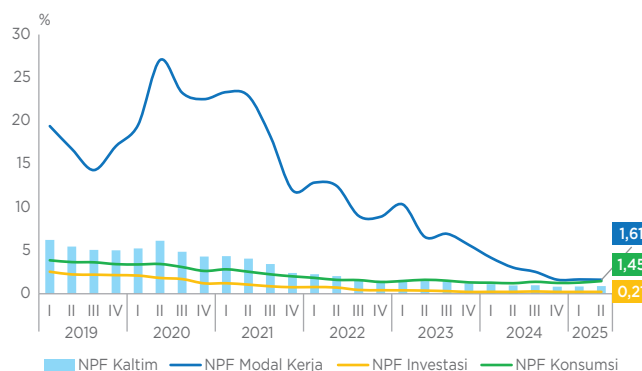
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV. 18 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.19 Perkembangan NPF Kaltim Berdasarkan Penggunaannya



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

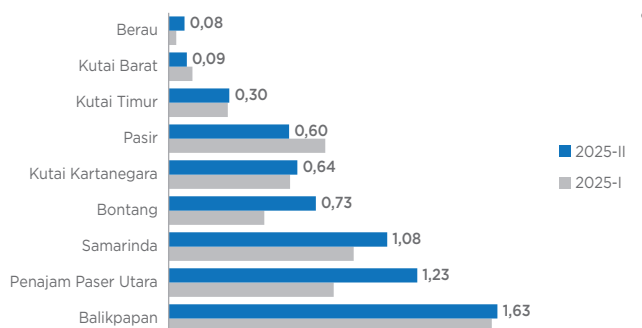
4.2.2.1. Kinerja Pembiayaan Syariah Secara Spasial

Secara spasial, pertumbuhan positif pembiayaan syariah Kaltim didorong oleh kinerja sebagian besar kabupaten/kota. Pada triwulan II 2025, penyaluran pembiayaan syariah di kabupaten/kota Kaltim secara umum meningkat dibandingkan dengan triwulan. Adapun pertumbuhan pembiayaan syariah tertinggi tercatat di Kabupaten Kutai Timur sebesar 66,72% (yoy), diikuti oleh Kabupaten Paser sebesar 32,52% (yoy). Sementara itu, penyaluran pembiayaan syariah di Kabupaten Berau dan Penajam Paser Utara berkontraksi masing-masing sebesar 26,35% (yoy) dan 2,75% (yoy) (Grafik IV.20).

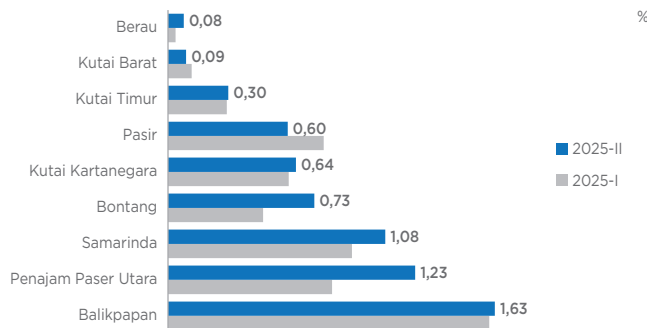
Kinerja positif pembiayaan syariah spasial juga diiringi dengan rasio NPF yang terjaga rendah. Secara umum, risiko pembiayaan syariah di kabupaten/kota Kaltim terjaga, dengan NPF terendah terjadi di Kabupaten Berau sebesar

0,08%. Walaupun hampir seluruh kabupaten/kota Kaltim mengalami peningkatan NPF dibandingkan dengan periode sebelumnya, tercatat rasio NPF masing-masing daerah masih terjaga di bawah *threshold* 5% (Grafik IV.21). Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas pembiayaan syariah di Kaltim masih terjaga, memberikan ruang bagi peningkatan intermediasi keuangan syariah ke depan.

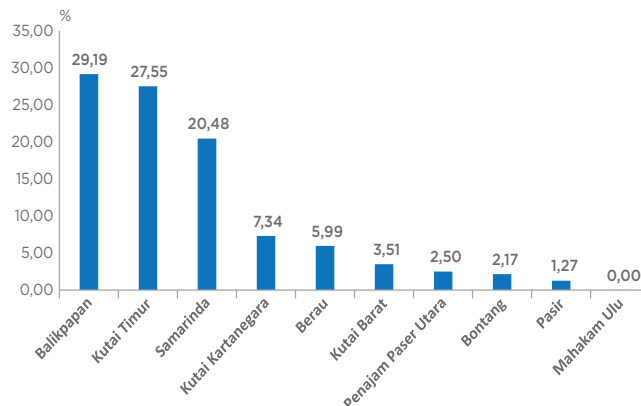
Grafik IV.20 Pertumbuhan Pembiayaan Syariah Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.21 Perkembangan NPF Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

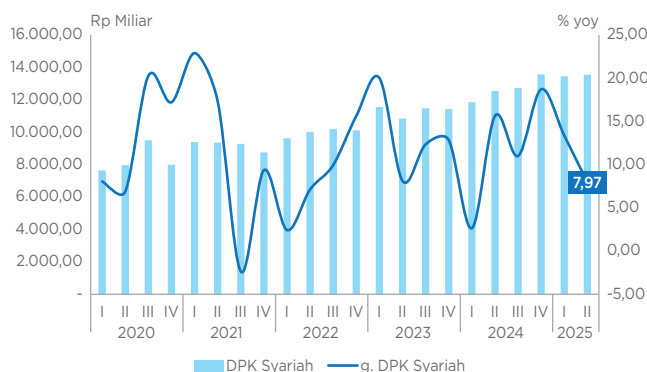
Grafik IV.22 Pangsa Pembiayaan Syariah Spasial Kabupaten/Kota di Kaltim

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

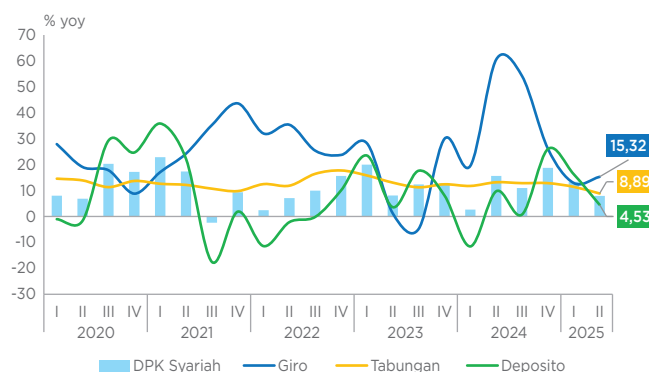
Berdasarkan sebarannya, penyaluran pembiayaan syariah Kaltim terkonsentrasi di Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Timur. Pada triwulan II 2025, Kota Balikpapan masih memegang pangsa pembiayaan syariah terbesar yakni 29,19%. Lebih lanjut, sejalan dengan perkembangan pangsa pada periode sebelumnya, Kabupaten Kutai Timur menjadi penyumbang pembiayaan syariah tertinggi kedua sebesar 27,55%, melebihi pangsa Kota Samarinda (Grafik IV.22). Adapun Kondisi ini menunjukkan minat atas pembiayaan syariah yang mulai merata di beberapa wilayah Kaltim lainnya selain dua kota besar (Balikpapan dan Samarinda).

4.2.2.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Syariah Kaltim

Mendukung pertumbuhan kreditnya, Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) syariah Kaltim tumbuh positif. Pada triwulan II 2025, penghimpunan DPK syariah Kaltim tercatat tumbuh positif sebesar 7,97% (yoy), melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya (Grafik IV.23). Perlambatan tersebut terjadi seiring dengan penurunan pertumbuhan tabungan dan deposito, di tengah kinerja giro yang sedikit meningkat (Grafik IV.24). Berdasarkan pangsa, tabungan masih mendominasi DPK syariah dengan

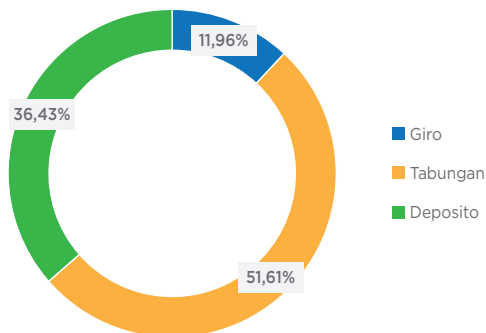
Grafik IV.23 Perkembangan DPK Syariah Kaltim

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.24 Perkembangan DPK Syariah Kaltim berdasarkan Komponen Pembentuk

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.25 Pangsa DPK Syariah Kaltim berdasarkan Komponen Pembentuk



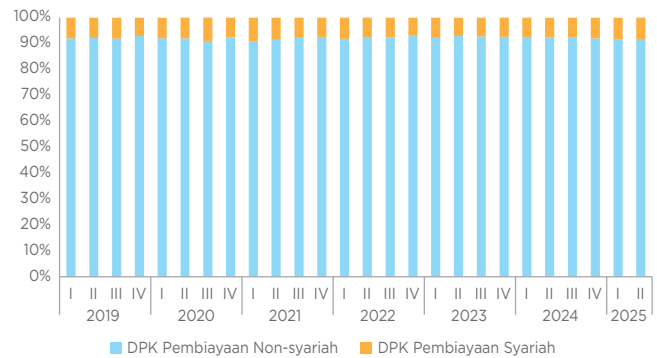
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

pangsa mencapai 51,61%, disusul oleh deposito dengan pangsa sebesar 36,43% dan giro sebesar 11,96% (Grafik IV.25). Sejalan dengan pangsa pembiayaannya, pangsa DPK syariah Kaltim turut menunjukkan tren peningkatan dan mencapai sebesar 8,62% pada periode laporan (Grafik IV.26). Hal ini mengindikasikan meningkatnya kepercayaan terhadap perbankan syariah serta potensi penguatan intermediasi syariah di Kaltim.

4.2.3. Asesmen Stabilitas Keuangan Korporasi di Kaltim

Penyaluran kredit korporasi Kaltim tercatat mengalami kontraksi, seiring dengan perlambatan sejumlah sektor utama Kaltim. Sejalan dengan penyaluran kredit pada beberapa sektor utama Kaltim, penyaluran kredit korporasi pada triwulan II 2025 berkontraksi sebesar 3,33% (yoy), setelah

Grafik IV.26 Pangsa DPK Syariah dan Non Syariah Kaltim

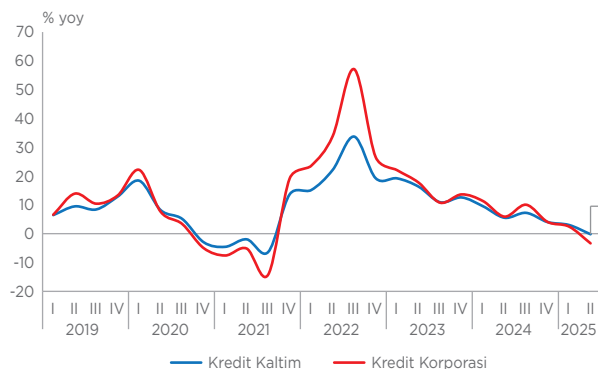


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

tumbuh positif pada periode sebelumnya. Lebih lanjut, kredit korporasi di Kaltim berkontraksi lebih dalam dibandingkan dengan kredit agregatnya (Grafik IV.27). Namun demikian, di tengah perlambatan kinerjanya rasio NPL kredit korporasi masih terjaga rendah sebesar 1,64% (Grafik IV.28).

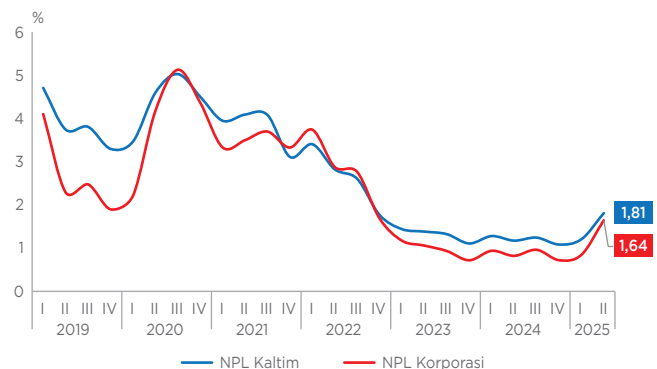
Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) korporasi mengalami kontraksi, seiring dengan perlambatan pada giro. Pada triwulan II 2025, DPK korporasi Kaltim berkontraksi sebesar 8,17% (yoy), setelah tumbuh positif pada periode sebelumnya (Grafik IV.29). Perlambatan tersebut terjadi disebabkan utamanya oleh kontraksi pada giro sebesar 19,40% (yoy), seiring dengan meningkatnya kebutuhan likuiditas korporasi untuk mendukung kegiatan usaha yang tercermin dari peningkatan PDRB sektor utama khususnya industri pengolahan (15,12% (yoy) (Grafik IV.30). Adapun berdasarkan pangsa, giro

Grafik IV.27 Perkembangan Kredit Korporasi Kaltim



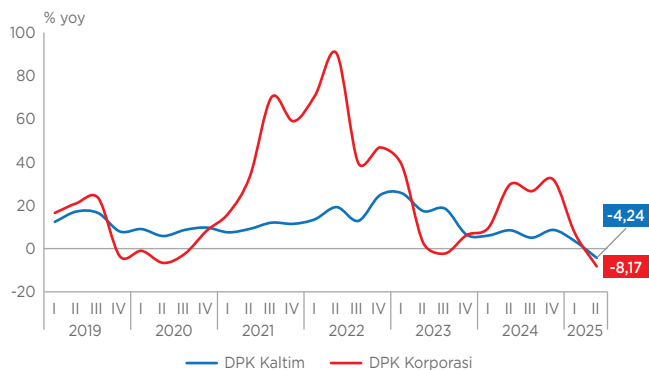
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.28 Perkembangan NPL Korporasi Kaltim



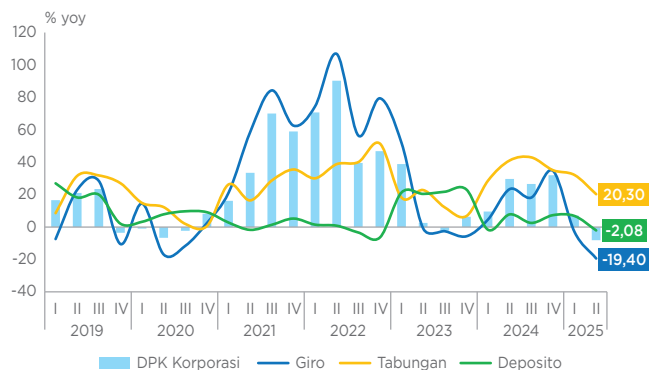
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.29 Perkembangan DPK Korporasi Kaltim



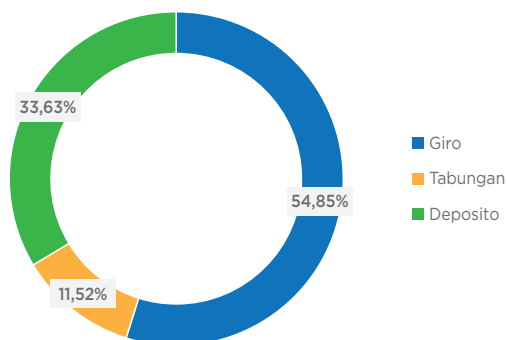
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.30 Perkembangan DPK Korporasi Kaltim Berdasarkan Komponennya



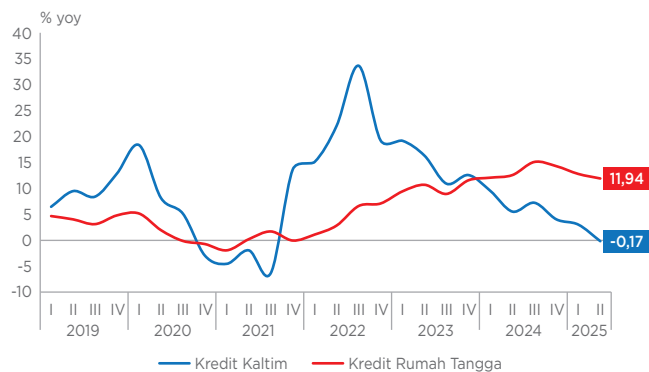
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.31 Pangsa DPK Korporasi Kaltim



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.32 Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltim



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

menyumbangkan pangsa terbesar terhadap DPK korporasi yakni 54,85%, diikuti oleh deposito dan tabungan masing-masing sebesar 33,63% dan 11,52% (Grafik IV.31).

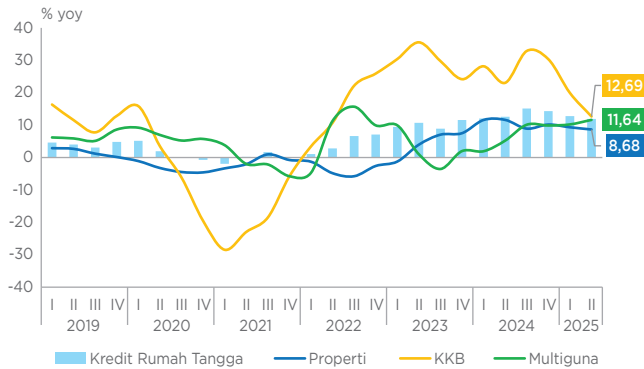
4.2.4. Asesmen Stabilitas Keuangan Rumah Tangga

Kredit rumah tangga Kaltim tumbuh positif dengan NPL yang terjaga rendah. Pertumbuhan kredit rumah tangga pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 11,94% (yoy), sedikit melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya (Grafik IV.32). Perlambatan tersebut didorong utamanya oleh penurunan kinerja kredit properti⁸ dan kendaraan bermotor ditengah terbatasnya daya

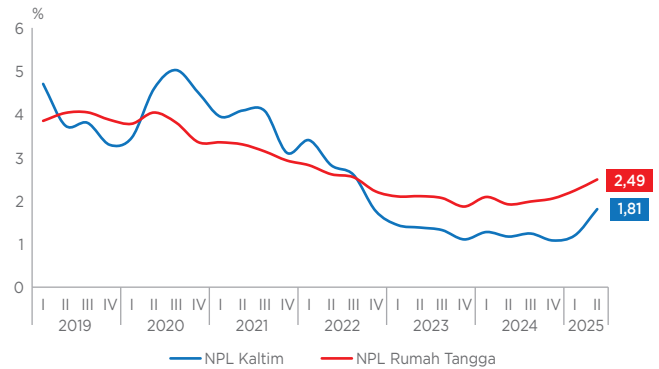
beli rumah tangga tercermin dari tren penurunan Indeks Keyakinan Konsumen. Di sisi lain, daya beli yang cenderung terbatas mendorong rumah tangga memprioritaskan kebutuhan rutin, terindikasi dari peningkatan penyaluran kredit multiguna tumbuh yang sebesar 11,64% (yoy) (Grafik IV.33).

Penyaluran kredit rumah tangga yang tumbuh positif diiringi oleh risiko kredit yang rendah. Rasio NPL kredit rumah tangga Kaltim pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 2,49%, lebih tinggi dibandingkan dengan rasio NPL kredit Kaltim secara umum (Grafik IV.34). Jika ditinjau berdasarkan penggunaannya, kredit multiguna mencatatkan rasio NPL yang paling rendah sebesar 1,32% (yoy). Di sisi lain, terjadi peningkatan NPL yang cukup tinggi pada kredit kendaraan bermotor dari 1,87% menjadi 2,69% pada periode laporan (Grafik IV.35).

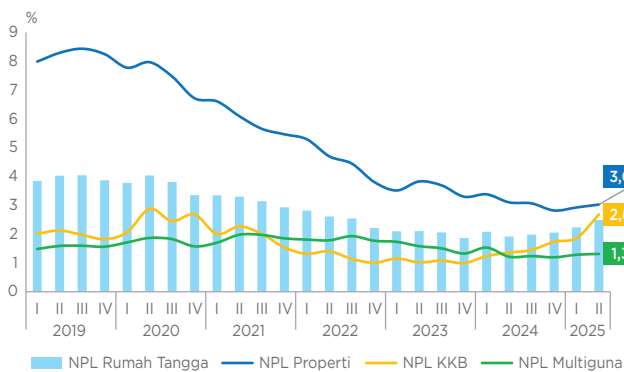
8. Kredit properti dalam laporan ini mencakup penjumlahan dari Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) berdasarkan kategori usia debitur (<21 tahun, 22-70 tahun, >70 tahun), Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berdasarkan kategori usia debitur (<21 tahun, 22-70 tahun, >70 tahun), serta kredit untuk ruko/rukan.

Grafik IV.33 Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaannya

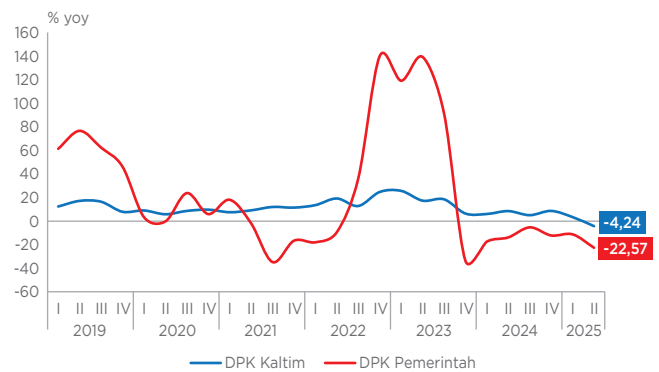
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.34 NPL Kredit Rumah Tangga Kaltim

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.35 NPL Kredit Rumah Tangga Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaannya

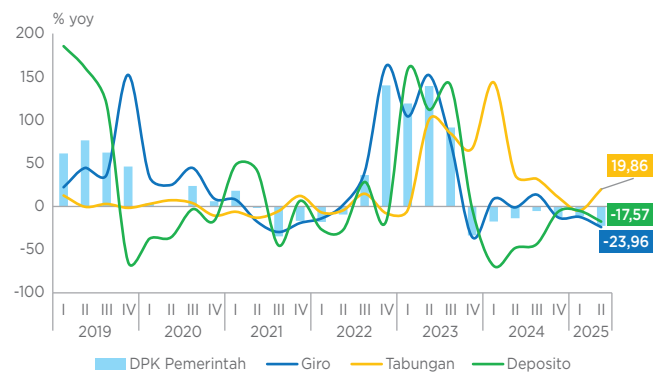
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.36 Perkembangan DPK Pemerintah Daerah Kaltim

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

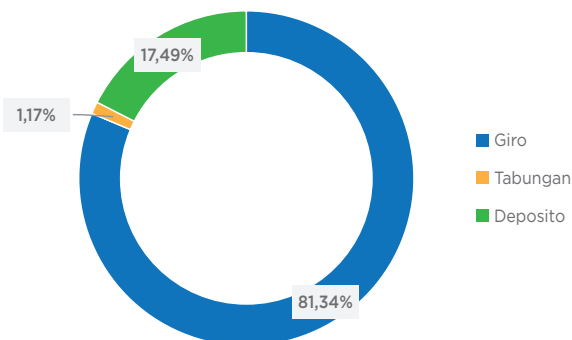
4.2.5. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Pemerintah Daerah

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pemerintah daerah melanjutkan tren perlambatan. Pada triwulan II 2025, DPK pemerintah daerah Kaltim melambat sebesar 22,57% (yoy), didorong utamanya oleh kontraksi pada giro dan deposito masing-masing sebesar 23,96% (yoy) dan 17,57% (yoy). Sementara itu, tabungan pemerintah tercatat tumbuh positif sebesar 19,86% (yoy) (Grafik IV.37). Hal ini sejalan dengan strategi efisiensi anggaran, di mana pemerintah daerah cenderung mengurangi penempatan dana pada giro dan deposito, sekaligus meningkatkan tabungan untuk menjaga fleksibilitas fiskal. Adapun di antara ketiga komponen tersebut, dana pemerintah sebagian besar disimpan dalam bentuk giro dengan pangsa mencapai 81,34% (Grafik IV.38).

Grafik IV.37 Perkembangan DPK Pemerintah Daerah Kaltim Berdasarkan Komponennya

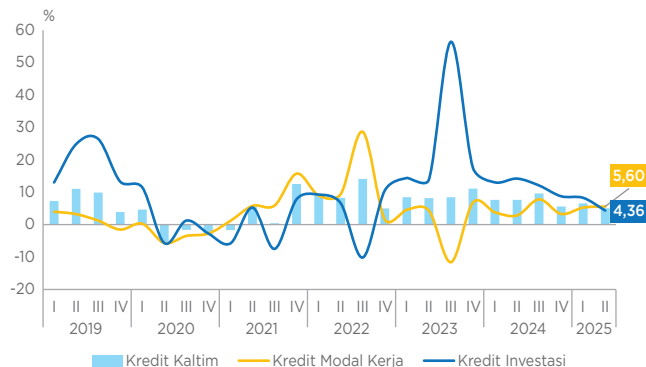
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.38 Pangsa DPK Pemerintah Daerah Kaltim Berdasarkan Komponennya



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.40 Perkembangan Kredit UMKM Kaltim berdasarkan Jenis Penggunaan



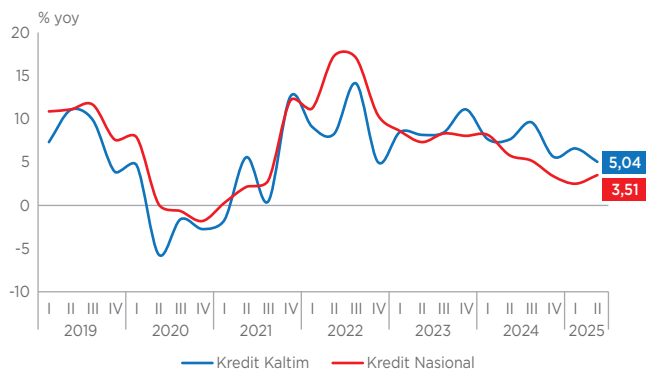
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

4.3. PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT UMKM

Kredit UMKM Kaltim tumbuh kuat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Walau mengalami perlambatan pada triwulan II 2025 menjadi 5,04% (yoy), pertumbuhan kredit UMKM Kaltim tercatat berada di atas tingkat pertumbuhan kredit UMKM nasional (Grafik IV.39). Adapun berdasarkan jenis penggunaannya, penurunan kinerja penyaluran kredit UMKM Kaltim bersumber dari penurunan kredit modal kerja dan investasi masing-masing sebesar 5,60% (yoy) dan 4,36% (yoy) (Grafik IV.40). Kondisi ini mencerminkan terbatasnya ekspansi usaha UMKM di tengah permintaan (daya beli) yang masih terbatas.

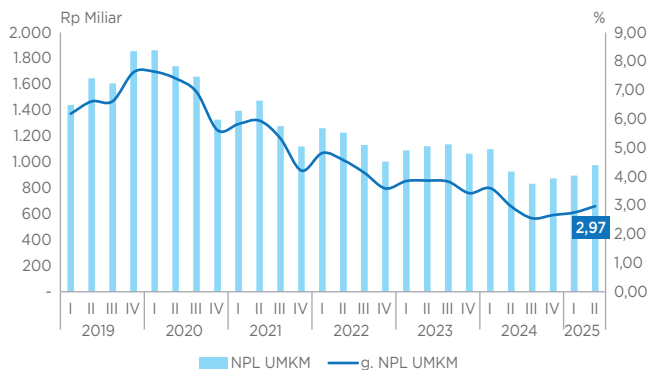
Pertumbuhan positif kredit UMKM Kaltim turut ditopang oleh terjaganya risiko kredit pada level yang rendah. Pada triwulan II 2025, rasio NPL UMKM Kaltim tercatat sebesar 2,97%, sedikit meningkat dibandingkan periode sebelumnya namun masih berada di bawah threshold 5% (Grafik IV.41). Sementara itu, berdasarkan jenis penggunaan, kualitas kredit investasi UMKM tercatat lebih baik dibandingkan kredit modal kerja, tercermin dari rasio NPL yang lebih rendah (Grafik IV.42). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kredit UMKM yang diarahkan untuk tujuan produktif jangka panjang cenderung memiliki risiko lebih terkendali, sementara kredit modal kerja masih menghadapi tekanan khususnya akibat terbatasnya permintaan.

Grafik IV.39 Perkembangan Kredit UMKM Kaltim dan Nasional

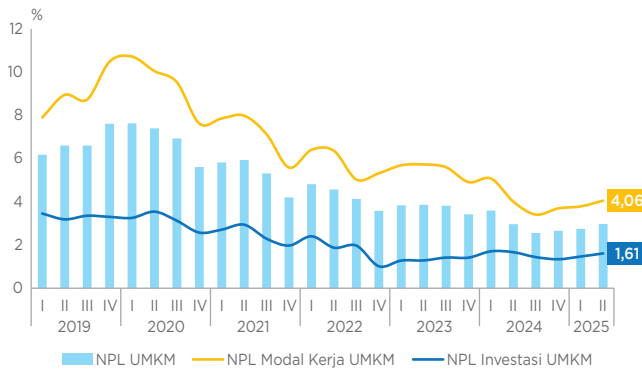


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

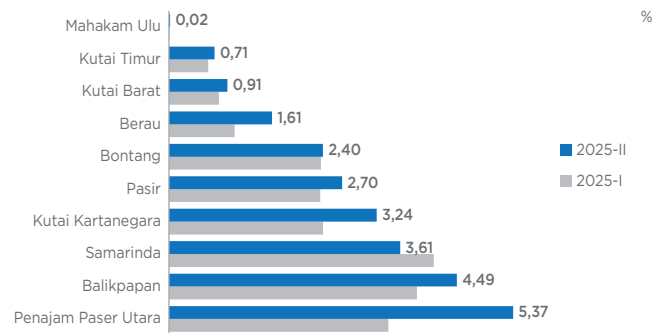
Grafik IV.41 Perkembangan NPL UMKM Kaltim



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.42 Perkembangan NPL UMKM Kaltim berdasarkan Jenis Penggunaan

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.44 Perkembangan NPL UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

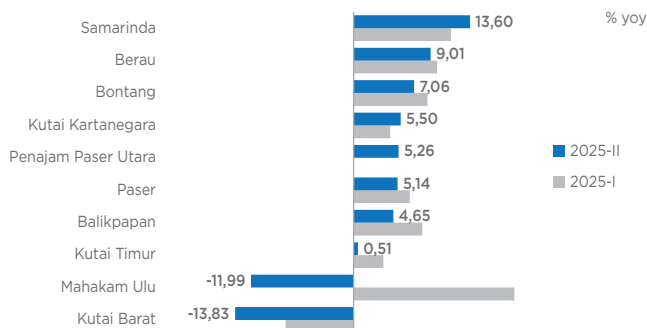
4.3.1. Perkembangan Kredit UMKM Spasial

Secara spasial, penyaluran kredit UMKM di sebagian besar kabupaten/kota di Kaltim tumbuh positif. Pada triwulan II 2025, penyaluran kredit UMKM pada hampir seluruh kabupaten/kota di Kaltim tumbuh positif, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di Kota Samarinda sebesar 13,60% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM terendah terjadi di Kabupaten Kutai Barat yang berkontraksi sebesar 13,83% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi periode sebelumnya (Grafik IV.43).

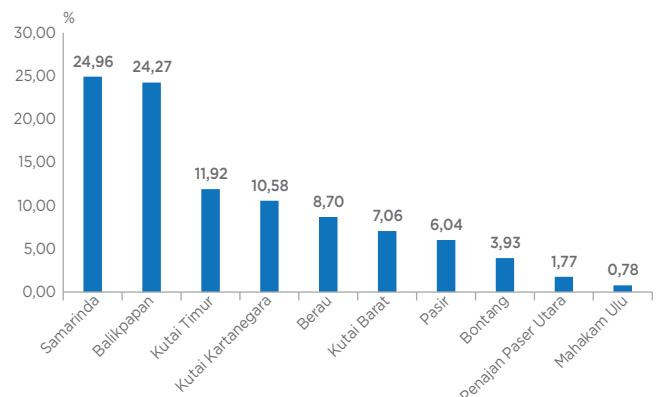
Penyaluran kredit UMKM spasial Kaltim yang positif, diiringi dengan tingkat risiko yang relatif rendah. Secara spasial, rasio NPL kredit UMKM di kabupaten/kota Kaltim relatif rendah, dengan rasio NPL paling kecil tercatat di Kabupaten

Mahakam Ulu (0,02%) dan paling besar di Kabupaten Penajam Paser Utara (4,13%). Adapun secara umum, risiko kredit UMKM di kabupaten/kota Kaltim mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya (Grafik IV.44).

Penyaluran kredit UMKM Kaltim masih terkonsentrasi di Kota Balikpapan dan Samarinda. Melanjutkan data historis, Kota Balikpapan dan Samarinda masih menjadi penyumbang kredit UMKM tertinggi dengan total *share* kedua kota tersebut mencapai 49,22%. Besarnya *share* penyaluran kredit pada kedua kota tersebut tidak terlepas dari kondisi bahwa kedua kota tersebut merupakan pusat kegiatan ekonomi di Kaltim yang memiliki jumlah UMKM *bankable* yang cenderung lebih banyak. Di sisi lain, Kabupaten Mahakam Ulu menempati posisi terendah dalam pangsa kredit UMKM Kaltim yakni sebesar 0,78% (Grafik IV.45).

Grafik IV.43 Pertumbuhan Kredit UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.45 Pangsa Kredit UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Kaltim

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

BAB 5

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah





RINGKASAN EKSEKUTIF

- Pada triwulan II-2025 kinerja transaksi sistem pembayaran melalui infrastruktur Bank Indonesia tumbuh positif.
- Pembayaran nontunai retail melalui Uang Elektronik (UE) dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mengalami pertumbuhan positif baik dari sisi nominal maupun volume transaksi.
- Aliran uang kartal pada triwulan II-2025 berada pada posisi *net inflow*, seiring dengan meningkatnya aliran uang masuk yang sejalan dengan normalisasi konsumsi masyarakat pasca HBKN Idul Fitri pada triwulan I-2025.



THAILAND



JAPAN



5.1. GAMBARAN UMUM

Transaksi sistem pembayaran di Kalimantan Timur melanjutkan tren pertumbuhan pada triwulan II-2025, didorong oleh sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi pada periode laporan. Dari sisi nominal, transaksi sistem pembayaran melalui infrastruktur Bank Indonesia pada triwulan II-2025 tumbuh sebesar 6,10% (yoy) dengan nominal Rp106,4 triliun, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,48% (yoy) dengan nominal Rp109,2 triliun. Dari sisi volume, transaksi melalui infrastruktur Bank Indonesia juga mengalami pertumbuhan, sebesar 22,6% (yoy) di triwulan II-2025, lebih rendah dibanding pertumbuhan pada triwulan I-2025 menjadi 58,55% (yoy) pada triwulan I-2025. Pertumbuhan ini didorong oleh transaksi BI-FAST yang meningkat dari sisi nominal sebesar 14,83% (yoy), di tengah transaksi melalui SKNBI yang secara nominal mengalami kontraksi sebesar 16,14% (yoy), sejalan dengan pergeseran preferensi masyarakat terhadap BI-FAST sebagai sistem pembayaran non tunai yang dinilai lebih cepat, mudah diakses, aman dan berbiaya rendah. Adapun pada sistem pembayaran dalam jumlah besar, transaksi pada sistem RTGS juga tumbuh 1,29% (yoy). Jika ditelaah berdasarkan instrumen pembayaran non-tunai ritel, QRIS terus mencatatkan pertumbuhan signifikan sebagai instrumen pembayaran digital yang terdepan yang digunakan masyarakat dengan pertumbuhan nominal dan volume transaksi masing-masing sebesar 173% (yoy) dan 248% (yoy). Sementara transaksi menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) tumbuh dari sisi nominal sebesar 6,10% (yoy) dan dari sisi volume transaksi sebesar 22,86% (yoy).

Dari sisi transaksi tunai, aliran uang kartal pada triwulan II tahun 2025 mencatat posisi *net inflow*, ketersediaan uang kartal yang memadai untuk mendukung kelancaran transaksi dan aktivitas ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur. Secara nominal, nilai uang kartal yang masuk ke wilayah Kaltim (*inflow*) sebesar Rp4,22 triliun, sementara nilai uang kartal yang diedarkan oleh Bank Indonesia (*outflow*) sebesar Rp2,47 triliun. Dengan kondisi tersebut, aliran uang kartal

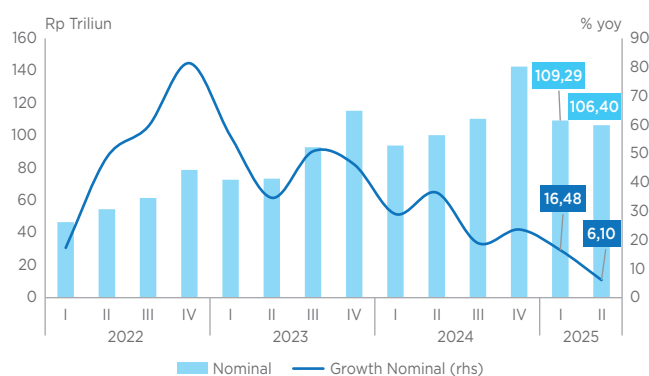
berada pada posisi *net inflow* sebesar Rp1,75 triliun seiring dengan pertumbuhan transaksi non tunai di wilayah Kalimantan Timur.

5.2. SISTEM PEMBAYARAN YANG DISELENGGARAKAN BANK INDONESIA

Pada triwulan II 2025, nominal transaksi sistem pembayaran melalui infrastruktur Bank Indonesia⁹ tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Nominal transaksi sistem pembayaran melalui infrastruktur Bank Indonesia mencapai sebesar Rp106,403 triliun atau tumbuh sebesar 6,10% (yoy) meskipun mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik V.1). Sementara dari sisi volume, transaksi sistem pembayaran melalui infrastruktur Bank Indonesia tumbuh sebesar 22,86% (yoy) (Grafik V.2). Hal ini mencerminkan aktivitas perekonomian yang tetap tumbuh di Kalimantan Timur pada periode laporan.

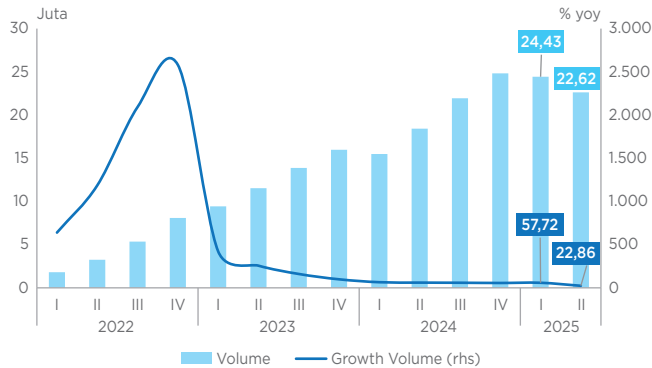
Transaksi sistem pembayaran melalui infrastruktur Bank Indonesia didominasi oleh transaksi BI-FAST, baik dari sisi nominal maupun volume. Transaksi BI-FAST berkontribusi sebesar 55% dari total nominal transaksi. Dari sisi volume, transaksi BI-FAST berkontribusi sebesar 99% dari total volume transaksi yang tercatat (Grafik V.3).

Grafik V.1 Perkembangan Nominal Transaksi Melalui Sistem Pembayaran Bank Indonesia di Provinsi Kaltim



Sumber: Bank Indonesia, diolah

9. Sistem pembayaran non tunai yang diselenggarakan Bank Indonesia secara umum terdiri dari tiga sistem utama, yaitu RTGS, SKNBI, dan BI-FAST, yang masing-masing melayani kebutuhan transfer dana dengan karakteristik berbeda.

Grafik V.2 Perkembangan Volume Transaksi Melalui Sistem Pembayaran Bank Indonesia di Provinsi Kaltim (% yoy)

Sumber: Bank Indonesia, diolah

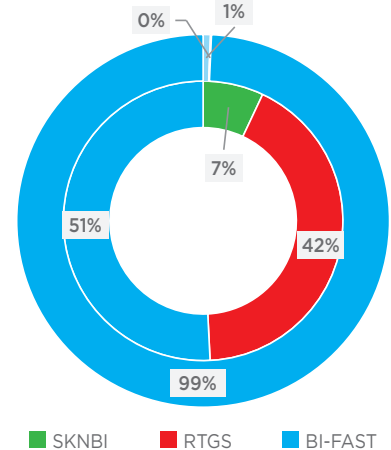
5.2.1. Perkembangan Transaksi *Real Time Gross Settlement (RTGS)*

Transaksi RTGS pada triwulan II-2025 mengalami pertumbuhan dari sisi nominal, sementara dari sisi volume mengalami kontraksi. Pada triwulan II-2025, nominal transaksi RTGS tumbuh sebesar 1,29% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang mengalami kontraksi 6,54% (yoy). Nominal transaksi RTGS triwulan II-2025 tercatat sebesar Rp44,90 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang tercatat sebesar Rp40,874 triliun (Grafik V.4). Volume transaksi RTGS juga mengalami kontraksi sebesar 12,97% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan

Grafik V.3 Transaksi Melalui Sistem Pembayaran Bank Indonesia di Kaltim Berdasarkan Infrastruktur

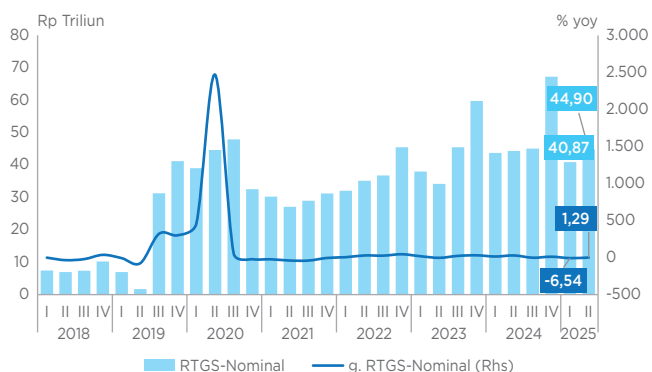
*Bagian dalam menggambarkan Nominal

*Bagian luar menggambarkan Volume

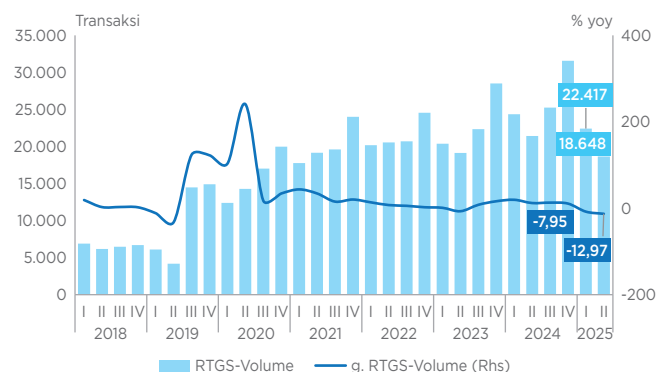


Sumber: Bank Indonesia, diolah

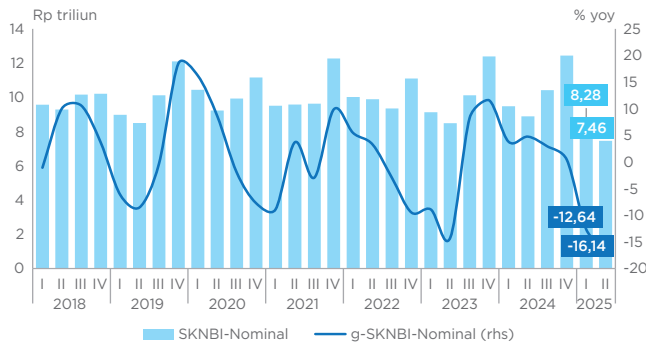
triwulan I-2025 yang berkontraksi sebesar 7,95% (yoy). Kondisi ini diperkirakan karena peralihan preferensi masyarakat ke sistem pembayaran BI-FAST yang lebih lebih cepat, mudah diakses, aman dan berbiaya rendah. Volume transaksi RTGS triwulan II-2025 tercatat sebanyak 18.648 transaksi, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang tercatat sebanyak 22.417 transaksi (Grafik V.5).

Grafik V.4 Perkembangan Nominal Transaksi RTGS di Provinsi Kaltim

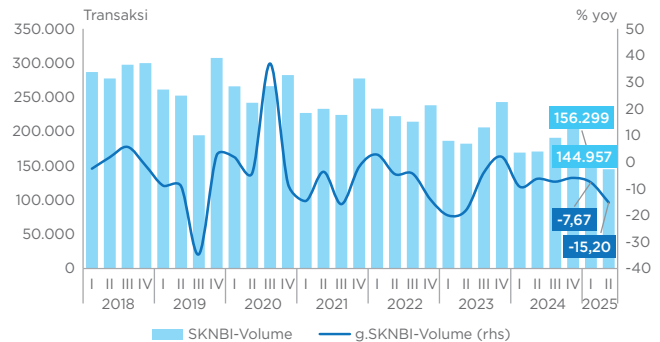
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.5 Perkembangan Volume Transaksi RTGS di Provinsi Kaltim

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.6 Perkembangan Nominal Transaksi SKNBI di Provinsi Kaltim

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.7 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI di Provinsi Kaltim

Sumber: Bank Indonesia, diolah

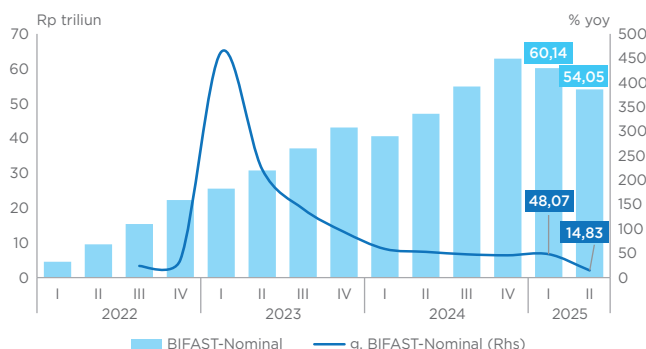
5.2.2. Perkembangan Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Transaksi SKNBI pada triwulan II-2025 mengalami kontraksi dari sisi nominal dan volume transaksi. Pada triwulan II-2025, nominal transaksi SKNBI terkontraksi sebesar 16,14% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang terkontraksi sebesar 12,64% (yoy). Nominal transaksi SKNBI triwulan II-2025 tercatat sebesar Rp7,46 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang tercatat sebesar Rp8,28 triliun (Grafik V.6). Lebih lanjut, volume transaksi SKNBI mengalami kontraksi sebesar 15,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang terkontraksi mencapai 7,67% (yoy). Volume transaksi SKNBI triwulan II 2025 tercatat sebanyak 144,957 transaksi, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang tercatat sebanyak 156.299 transaksi (Grafik V.5). Kondisi penurunan yang dialami oleh SKNBI merupakan dampak

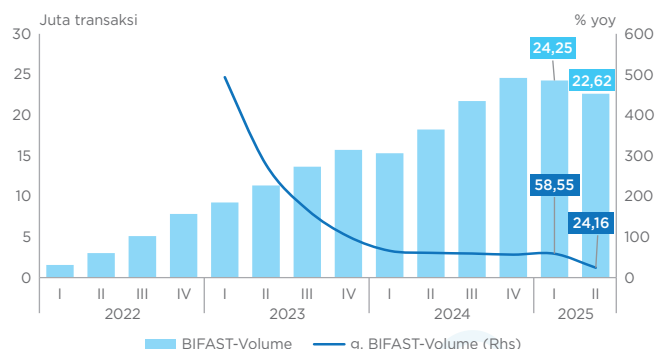
shifting perubahan preferensi masyarakat yang saat ini banyak menggunakan BI-FAST.

5.2.3. Perkembangan Transaksi BI-FAST

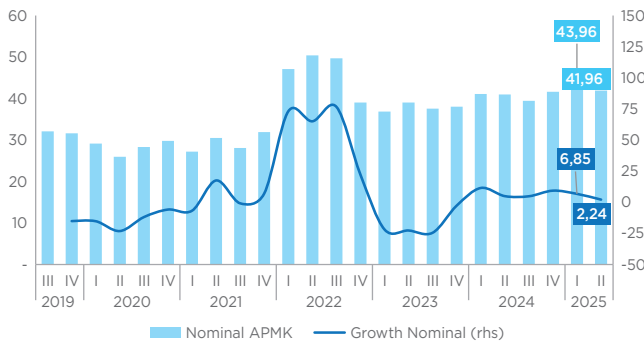
Transaksi BI-FAST pada triwulan II-2025 mengalami pertumbuhan dari sisi nominal dan volume transaksi. Pada triwulan II-2025, nominal transaksi BI-FAST tumbuh sebesar 14,83% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang tumbuh sebesar 48,07% (yoy). Nominal transaksi BI-FAST triwulan II-2025 tercatat sebesar Rp22,62 triliun, (Grafik V.8). Lebih lanjut, volume transaksi BI-FAST mengalami peningkatan sebesar 24,16% (yoy), meski melambat dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 58,55% (yoy). Volume transaksi BI-FAST triwulan II-2025 tercatat sebanyak 22,62 juta transaksi (Grafik V.9). Tren pertumbuhan positif BI-Fast merupakan dampak

Grafik V.8 Perkembangan Nominal Transaksi BI-FAST di Provinsi Kaltim

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.9 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI di Provinsi Kaltim

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.10 Perkembangan Nominal Transaksi APMK di Kaltim

Sumber: Bank Indonesia, diolah

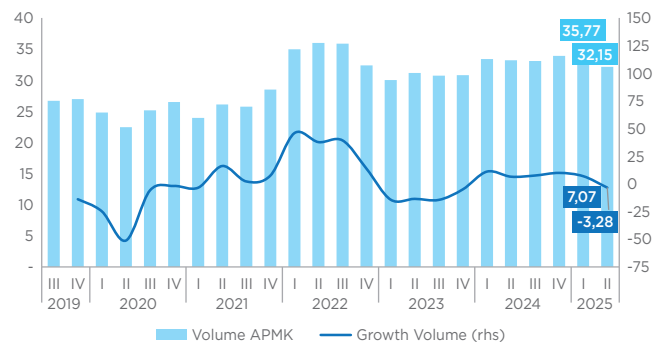
dari adanya perubahan preferensi masyarakat serta kondisi aktivitas ekonomi di Kaltim yang masih tumbuh membaik di triwulan II 2025.

5.3. SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI RITEL

Sistem pembayaran non tunai ritel yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia merupakan mekanisme pembayaran elektronik yang digunakan untuk transaksi masyarakat sehari-hari dengan nilai kecil. Sistem ini terdiri dari beberapa instrumen utama, yaitu Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang terdiri dari Kartu Debit/ATM dan Kartu Kredit, Uang Elektronik (UE), dan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

5.3.1. Perkembangan Transaksi APMK

Transaksi APMK mencatat pertumbuhan nominal, namun mengalami kontraksi pada volume transaksi. Pada triwulan II-2025, nominal transaksi APMK tumbuh sebesar 2,24% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,85% (yoy). Nominal transaksi APMK triwulan II-2025 tercatat sebesar Rp41.96 triliun, (Grafik V.10). Sementara dari sisi volume transaksi APMK mengalami kontraksi sebesar 3,28% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang tumbuh sebesar 7,00% (yoy). Volume transaksi APMK triwulan II - 2025 tercatat 32,15 juta transaksi (Grafik V.11).

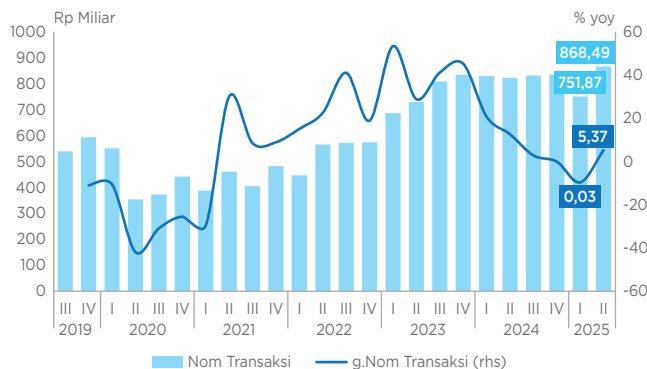
Grafik V.11 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI di Provinsi Kaltim

Sumber: Bank Indonesia, diolah

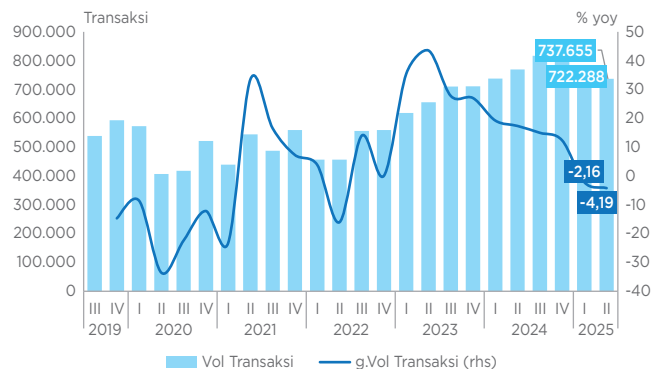
5.3.1.1. Perkembangan Transaksi APMK Kartu Kredit

Transaksi kartu kredit mengalami pertumbuhan dari sisi nominal, sementara dari sisi volume mengalami kontraksi. Nominal transaksi APMK Kartu Kredit pada triwulan II-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,37%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang tumbuh sebesar 0,03% (yoy). Nominal transaksi kartu kredit triwulan II-2025 tercatat sebesar Rp868,49 miliar (Grafik V.12). Meski meningkat dari sisi nominal, transaksi kartu kredit dari sisi volume justru mengalami kontraksi sebesar 4,19% (yoy), atau menurun dibandingkan dengan kondisi triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 2,16% (yoy). Volume transaksi kartu kredit triwulan II-2025 tercatat 737.655 transaksi di Provinsi Kaltim (Grafik V.13).

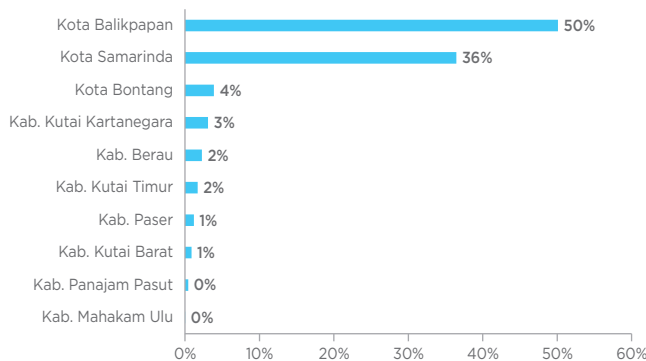
Kota Balikpapan dan Kota Samarinda menjadi penggerak utama pertumbuhan transaksi kartu kredit di Provinsi Kaltim. Berdasarkan nominal transaksi, Kota Balikpapan memiliki porsi sebesar 50%, sementara Kota Samarinda sebesar 36%, disusul oleh Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara masing-masing sebesar 4% dan 3% (Grafik V.14). Berdasarkan volume transaksi, Kota Balikpapan memiliki porsi sebesar 55% sementara Kota Samarinda sebesar 41%, disusul oleh Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara masing-masing sebesar 6% dan 4% (Grafik V.15).

Grafik V.12 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Provinsi Kaltim

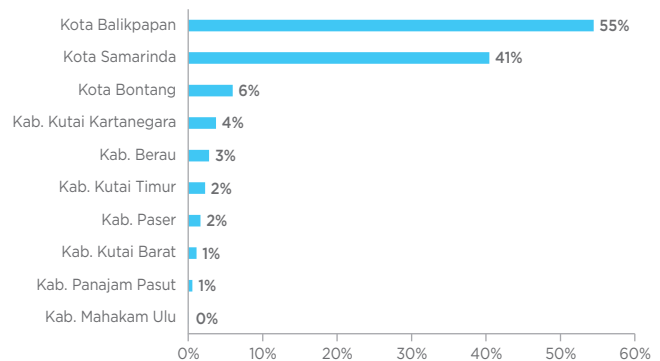
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.13 Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit di Provinsi Kaltim

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.14 Distribusi Nominal Transaksi Kartu Kredit di Provinsi Kaltim

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.15 Distribusi Volume Transaksi Kartu Kredit di Provinsi Kaltim

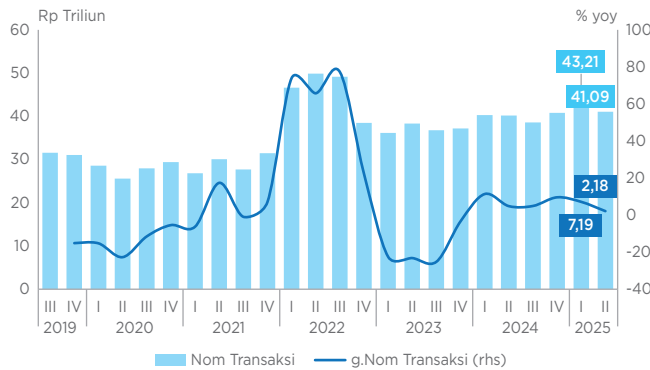
Sumber: Bank Indonesia, diolah

5.3.1.2. Perkembangan Transaksi APMK Kartu ATM/Debit

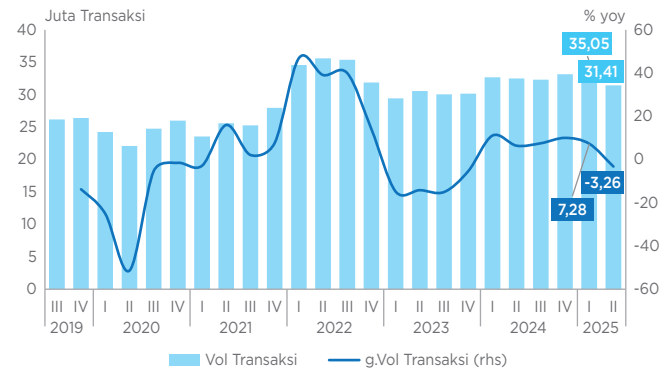
Transaksi kartu ATM/Debit mengalami pertumbuhan positif dari sisi nominal, namun mengalami kontraksi dari sisi volume. Pada triwulan II tahun 2025, nominal transaksi kartu ATM/Debit masih tumbuh positif sebesar 2,18% (yoy), meski melambat dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang tumbuh 7,19% (yoy). Nominal transaksi kartu ATM/Debit triwulan II tahun 2025 tercatat Rp41,09 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I tahun 2024 yang tercatat Rp43,21 triliun (Grafik V.16). Sementara dari sisi volume transaksi kartu ATM/Debit mengalami kontraksi 3,26% (yoy), atau menurun dibandingkan dengan triwulan II-2025 yang tumbuh 7,28% (yoy). Volume transaksi kartu

ATM/Debit triwulan II tahun 2025 tercatat 31,41 juta transaksi (Grafik V.17). Volume transaksi kartu ATM/Debit triwulan II tahun 2025 tercatat 31,41 juta transaksi, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I tahun 2025 yang tercatat 35,05 juta transaksi (Grafik V.17).

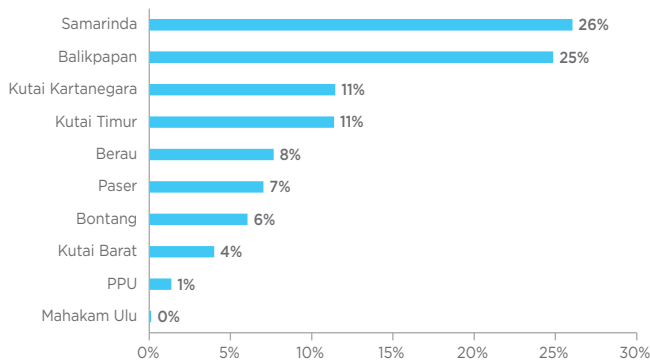
Secara spasial, Kota Samarinda dan Kota Bontang menjadi penggerak utama pertumbuhan transaksi ATM/Debit. Berdasarkan nominal transaksi, Kota Samarinda dan Kota Bontang memiliki porsi sebesar 26%, disusul oleh Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser masing-masing sebesar 12% dan 12% (Grafik V.18). Jika dilihat dari sisi volume transaksi, Kota Samarinda memiliki porsi 30%, sementara Kota Bontang sebesar 28% dan disusul Kabupaten Paser dan Kutai Barat masing-masing sebesar 10% dan 9% (Grafik V.19).

Grafik V.16 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu ATM/Debit di Provinsi Kaltim

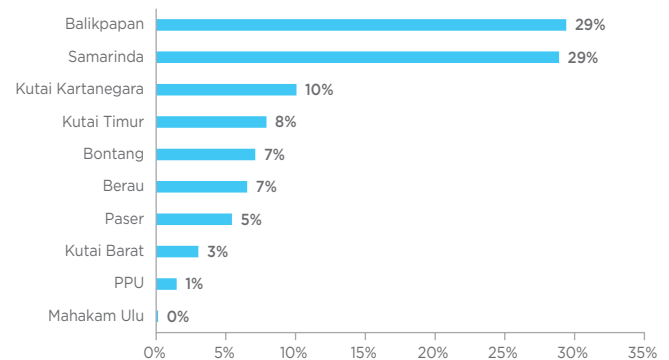
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.17 Perkembangan Volume Transaksi Kartu ATM/Debit di Provinsi Kaltim

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.18 Distribusi Nominal Transaksi Kartu ATM/Debit di Provinsi Kaltim Triwulan II 2025

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.19 Distribusi Volume Transaksi Kartu ATM/Debit di Provinsi Kaltim Tw I 2025

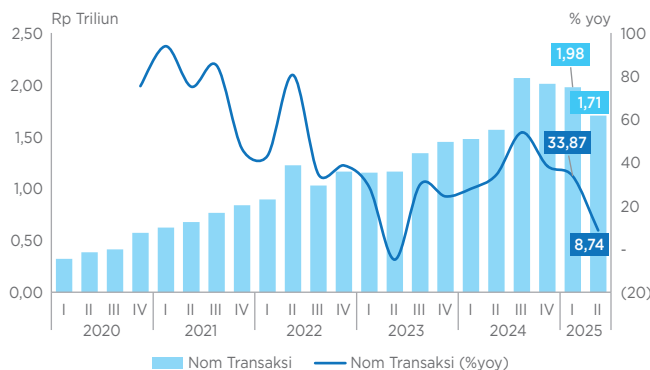
Sumber: Bank Indonesia, diolah

5.3.2. Perkembangan Transaksi Uang Elektronik

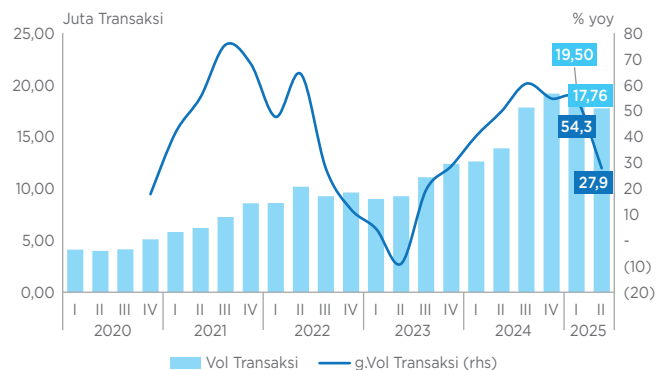
Transaksi Uang Elektronik (UE) mengalami pertumbuhan baik dari sisi nominal maupun volume. Pada triwulan II tahun 2025, nominal transaksi UE tumbuh 8,74% (yoy), meski melambat dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang tumbuh 33,87% (yoy). Nominal transaksi UE triwulan II tahun 2025 tercatat Rp1,71 triliun (Grafik V.20). Volume transaksi UE juga mengalami pertumbuhan sebesar 27,9% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang tumbuh 54,8% (yoy). Volume transaksi UE triwulan II tahun 2025 tercatat 17,76 juta transaksi (Grafik V.21). Pertumbuhan transaksi UE baik dari

sisi nominal maupun volume transaksi, didukung dengan terus tumbuhnya jumlah akun UE.

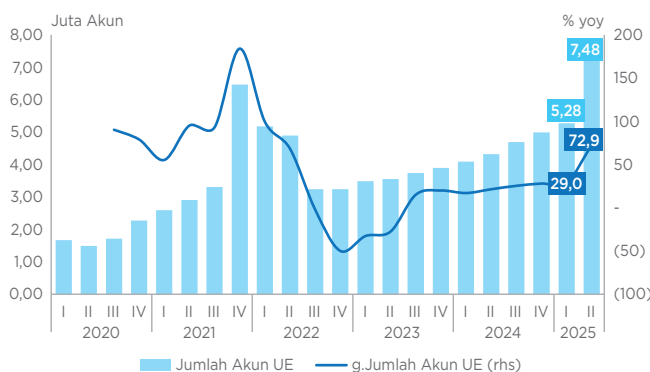
Selain nominal dan volume, jumlah akun uang elektronik juga melanjutkan tren pertumbuhan positif. Pertumbuhan jumlah akun UE triwulan II tahun 2025 tercatat 72,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang tumbuh 29% (yoy). Jumlah akun UE triwulan I tahun 2025 tercatat 7,48 juta akun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I tahun 2025 yang tercatat 5,28 juta akun (Grafik V.22). Pertumbuhan transaksi dan jumlah akun UE sejalan dengan terus tumbuhnya pembayaran menggunakan kanal non tunai ritel untuk transaksi di pusat perbelanjaan, transportasi, dan jalan tol di wilayah Kaltim.

Grafik V.20 Perkembangan Nominal Transaksi Uang Elektronik di Provinsi Kaltim

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.21 Perkembangan Volume Transaksi Uang Elektronik di Provinsi Kaltim

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.22 Perkembangan Jumlah Akun Uang Elektronik di Provinsi Kaltim

Sumber: Bank Indonesia, diolah

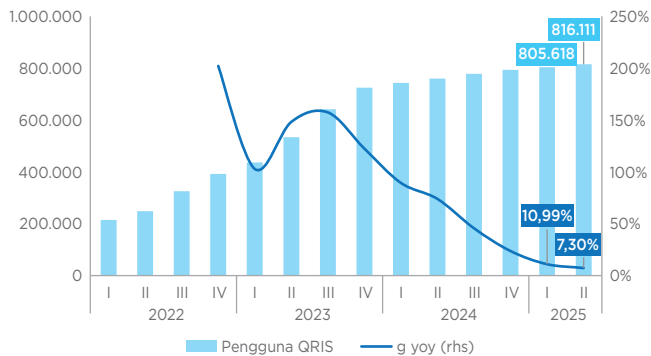
5.3.3. Perkembangan Transaksi QRIS

Jumlah pengguna baru dan merchant QRIS terus mengalami pertumbuhan positif pada triwulan laporan. Pada triwulan II 2025, jumlah pengguna QRIS tumbuh positif sebesar 9,62% (yoy), meski sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 10,99% (yoy). Jumlah pengguna QRIS triwulan II tahun 2025 tercatat 816.111 pengguna, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang tercatat sebanyak 805.618 pengguna (Grafik V.23). Pada triwulan yang sama, jumlah *merchant* QRIS juga mengalami pertumbuhan sebesar 36% (yoy), atau meningkat dibandingkan dengan triwulan I 2025

yang mengalami pertumbuhan 33% (yoy). Jumlah *merchant* triwulan II 2025 tercatat sebanyak 715.038 *merchant* (Grafik V.24). Pertumbuhan jumlah pengguna dan *merchant* QRIS yang tinggi tersebut sejalan dengan berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, dan publikasi yang gencar dilakukan untuk meningkatkan *awareness* dan minat masyarakat dalam menggunakan kanal QRIS.

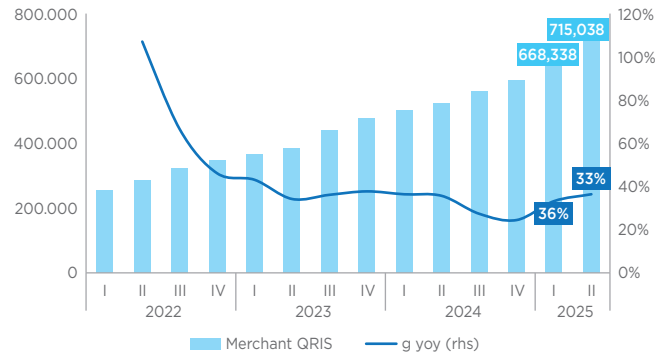
Transaksi QRIS baik dari sisi nominal maupun volume terus berada dalam tren positif. Pada triwulan II-2025, nominal transaksi QRIS tumbuh sebesar 173% (yoy), atau meningkat dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang mengalami pertumbuhan sebesar 136% (yoy). Nominal transaksi QRIS triwulan I-2025 tercatat Rp5,92 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang tercatat Rp3,96 triliun (Grafik V.25). Volume transaksi QRIS juga mengalami pertumbuhan sebesar 248% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang mengalami pertumbuhan sebesar 181% (yoy). Volume transaksi QRIS triwulan II-2025 tercatat 52,69 juta transaksi, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang tercatat 29,96 juta transaksi (Grafik V.26).

Grafik V.23 Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kaltim



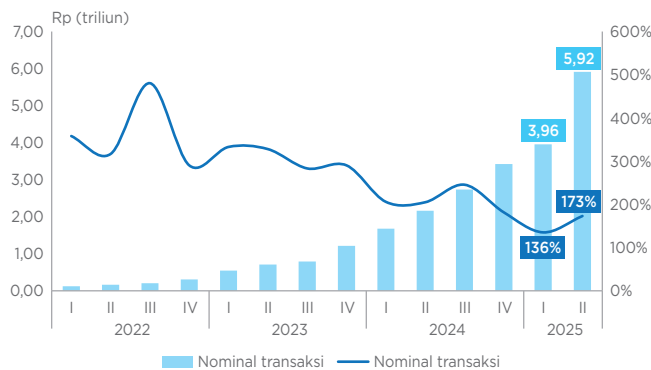
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.24 Jumlah Merchant QRIS di Provinsi Kaltim



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.25 Perkembangan Nominal Transaksi QRIS di Provinsi Kaltim



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.26 Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Provinsi Kaltim

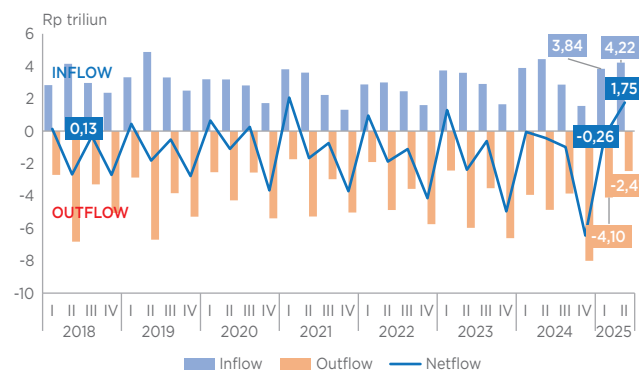


Sumber: Bank Indonesia, diolah

5.4. PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Dari sisi transaksi tunai, aliran uang kartal pada triwulan II-2025 mencatat posisi *net inflow*. Secara nominal, nilai uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia (*inflow*) tercatat sebesar Rp4,22 triliun, sementara nilai uang kartal yang diedarkan oleh Bank Indonesia (*outflow*) sebesar Rp2,47 triliun. Dengan kondisi tersebut, aliran uang kartal berada pada posisi *net inflow* sebesar Rp1,75 triliun (Grafik V.27). Posisi *net inflow* ini menandakan terpenuhinya kebutuhan kas masyarakat dan perbankan akan uang kartal, sementara BI tetap mampu menjaga kontrol terhadap peredaran uang. Secara spasial, *net inflow* bersumber dari wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim sebesar Rp1,43 triliun, sementara *net inflow* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan tercatat sebesar Rp330 miliar (Grafik V.28).

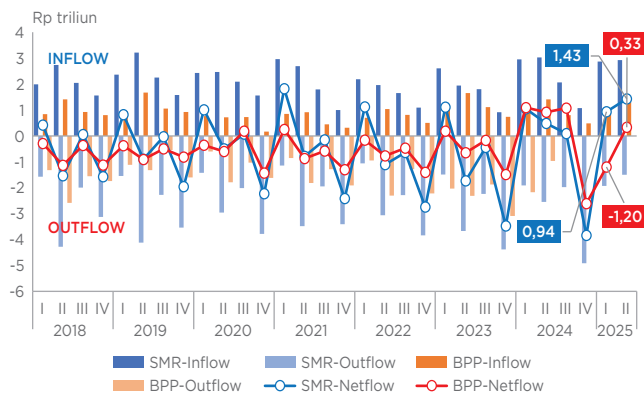
Grafik V.27 Pengedaran Uang Kartal di Provinsi Kaltim



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Dropping Uang Layak Edar (ULE) mengalami penurunan secara yoy. Pada Triwulan II-2025, *dropping* ULE mengalami peningkatan sebesar 6,60% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I tahun 2025 yang berkontraksi sebesar 0,81% (yoy). Nominal *dropping* pada triwulan II

Grafik V.28 Uang Kartal di Provinsi Kaltim – Spasial

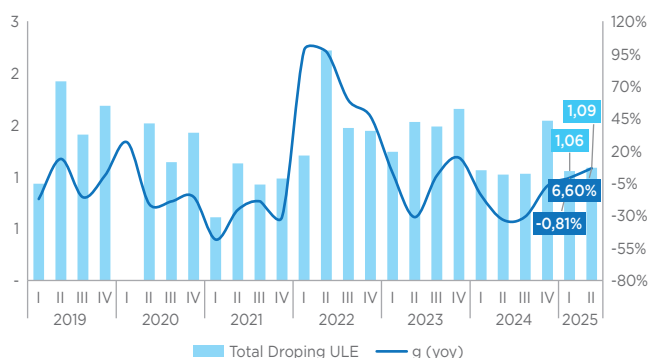


Sumber: Bank Indonesia, diolah

tahun 2025 tercatat Rp1,09 Triliun, lebih rendah dibandingkan pada triwulan I tahun 2025 tercatat Rp1,06 Triliun (Grafik V.29). Peningkatan *dropping* ULE tersebut sejalan dengan peningkatan permintaan pada kas titipan.

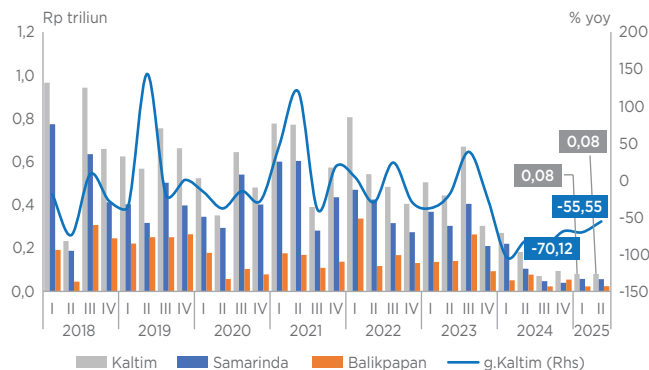
Jumlah Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang ditarik dari masyarakat mengalami penurunan. Dalam rangka menjaga kualitas uang kartal yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia menjalankan kebijakan *Clean Money Policy* (CMP). Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) secara rutin. Pada triwulan II-2025, nominal penyerapan UTLE selama periode laporan mengalami penurunan sebesar 55,55% (yoy) atau sebesar Rp80 miliar,

Grafik V.29 Dropping ULE dan inflow UTLE



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.30 Penarikan Uang Tidak Layak Edar di Provinsi Kaltim

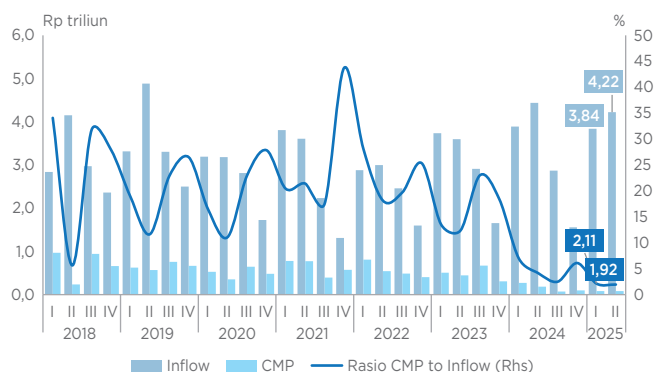


Sumber: Bank Indonesia, diolah

memiliki nominal yang sama dengan triwulan I tahun 2025 meskipun penurunan tahunan lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 70,12% (Grafik V.30).

Nominal penarikan UTLE terhadap inflow di Provinsi Kaltim mengalami kenaikan. Nominal penarikan UTLE terhadap inflow pada triwulan II-2025 tercatat sebesar 4,22 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang tercatat sebesar 3,84 triliun. Peningkatan nominal penarikan UTLE di awal 2025 menunjukkan upaya optimalisasi distribusi uang layak edar untuk mendukung kelancaran transaksi di Provinsi Kaltim (Grafik V.31).

Grafik V.31 Penarikan Uang Tidak Layak Edar terhadap Inflow di Provinsi Kaltim



Sumber: Bank Indonesia, diolah



Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 6

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan



RINGKASAN EKSEKUTIF

- Kondisi ketenagakerjaan mengalami perbaikan didorong oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor utama seiring membaiknya kinerja ekonomi, sehingga meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
- Kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik turut memberikan dampak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari penurunan jumlah penduduk miskin, ketimpangan pendapatan yang semakin rendah, serta peningkatan kesejahteraan petani.



6.1. GAMBARAN UMUM

Sejalan dengan kinerja ekonomi yang masih cukup tinggi, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan secara umum turut menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja beberapa sektor utama seperti sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian saat ini masih menjadi pendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut tercermin dari peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan yang membaik tersebut, kesejahteraan masyarakat juga lebih baik, terindikasi dari penurunan tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan.

6.2. KETENAGAKERJAAN

Kinerja ekonomi Kaltim yang kuat turut ditopang oleh kondisi ketenagakerjaan Kaltim yang terus mengalami perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kaltim pada Februari 2025 sebesar 5,33%, sedikit menurun dari TPT pada Februari 2024 yang sebesar 5,75% . Penurunan TPT tersebut didorong oleh pertumbuhan jumlah angkatan kerja menganggur yang lebih rendah dibanding pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang aktif bekerja. Jumlah angkatan kerja menganggur tumbuh sebesar 3,34% (yoy), sedangkan angkatan kerja yang aktif bekerja tumbuh lebih tinggi yaitu 6,99% (yoy) (Tabel VI.1). Namun demikian, jika

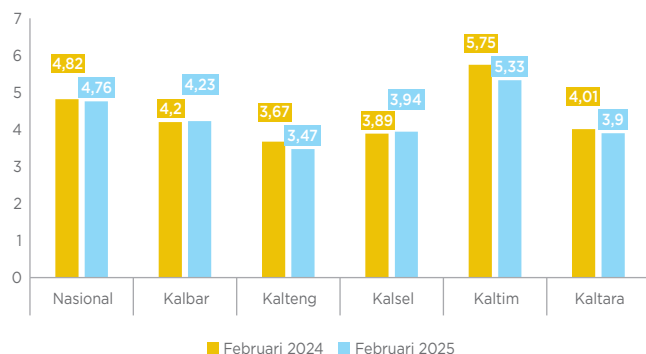
dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, TPT Kaltim merupakan yang tertinggi (Grafik VI.1).

Penurunan TPT tidak terlepas dari peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) akibat peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor utama. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Timur pada Februari 2025 tumbuh 66,40%, lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK di Februari 2024, yakni 66,31% (Tabel VI.1). Jika dilihat berdasarkan lapangan usahanya, LU Pertambangan menjadi sektor yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja paling tinggi, yakni sebesar 30,94% (yoy). Hal tersebut tidak terlepas dari adanya pergeseran tenaga kerja di sejumlah Kabupaten/Kota dari sektor pertanian ke sektor pertambangan yang cakupannya tidak terbatas pada pertambangan batu bara, melainkan juga termasuk pertambangan minyak dan gas (migas). Lebih lanjut, LU industri pengolahan memiliki peningkatan sebesar 11,56% (yoy) seiring ekspansi berbagai perusahaan manufaktur yang sejalan dengan pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan di tahun 2025 yang relatif tinggi. Sektor ekonomi utama lainnya seperti transportasi dan pergudangan juga mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 7,93% (yoy) (Tabel VI.2). Namun demikian, TPAK Kaltim merupakan yang terendah diantara provinsi lainnya di wilayah Kalimantan (Grafik VI.2). Hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kaltim lebih banyak didorong oleh sektor yang padat modal sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi kurang optimal.

Tabel VI.1 Angkatan Kerja dan Pengangguran Kaltim				
Kondisi Ketenagakerjaan	Februari 2024	Februari 2025	Pertumbuhan	
			Orang	%
A. Jumlah Penduduk 15+	3.030.406	3.197.293	166.887	5,51
B. Jumlah Angkatan Kerja	2.009.517	2.123.156	113.639	5,56
B.1 Jumlah Bekerja	1.893.994	2.009.990	115.996	6,12
B.1 Jumlah Penganggur	115.523	113.166	-2.357	-2,04
C. Bukan Angkatan Kerja	1.020.889	1.074.137	53.248	5,22
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja = (TPAK=[B/A]X100%)	66,31	66,40	▲	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT=[B.2/B]X100%)	5,75	5,33	▼	

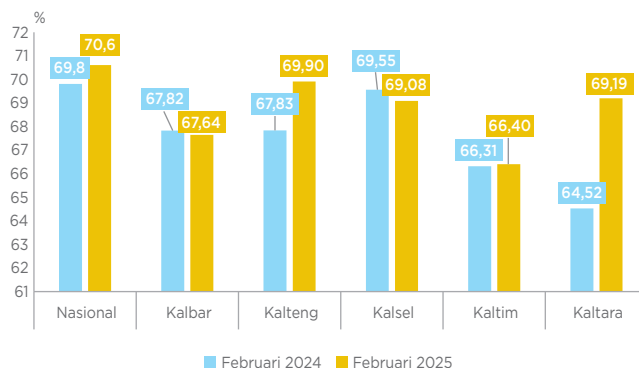
Sumber : BPS, diolah

Grafik VI.1 Perbandingan TPT Kaltim dan Provinsi Lainnya di Kalimantan



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.2 Perbandingan TPAK Kaltim dan Provinsi Lainnya di Kalimantan



Sumber: BPS, diolah

Tabel VI.2 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

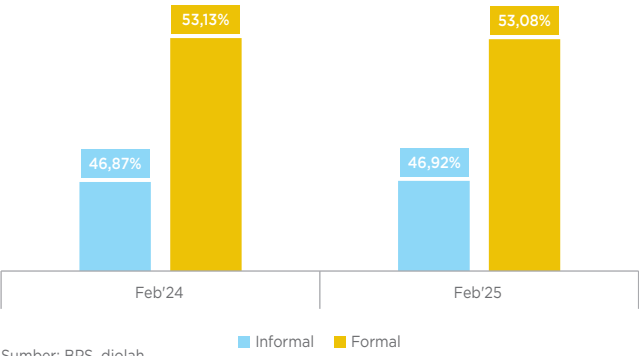
Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	Februari 2024	Februari 2025	Pertumbuhan		Pangsa 2025
			Orang	%	
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	362.937	385.745	22.808	6,28	19,19%
Pertambangan dan penggalian	148.671	194.673	46.002	30,94	9,69%
Industri Pengolahan	137.687	153.605	15.918	11,56	7,64%
Konstruksi	145.870	134.538	(11.332)	-7,77	6,69%
Perdagangan besar, eceran, akomodasi dan makan minum	537.844	547.846	10.002	1,86	27,26%
Transportasi dan pergudangan	107.967	116.527	8.560	7,93	5,80%
Administrasi Pemerintahan	115.986	110.482	(5.504)	-4,75	5,50%
Jasa Perusahaan, Pendidikan, Kesehatan, dan Jasa Lainnya	282.312	296.435	14.123	5,00	14,75%
Lainnya	54.670	70.139	15.469	28,30	3,49%
Total	1.893.944	2.009.990	116.046	6,13	100%

Sumber : BPS, diolah

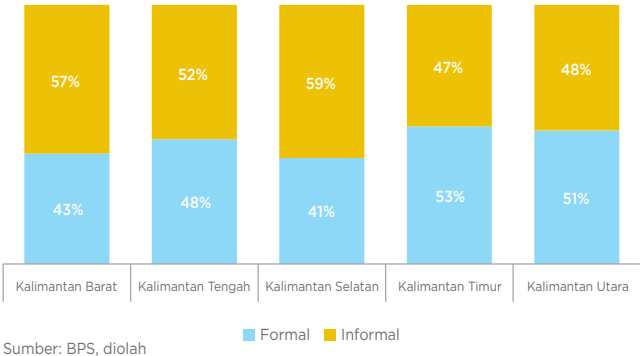
Sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor utama, proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor formal juga lebih besar dibandingkan sektor informal. Hal tersebut didorong oleh cukup tingginya pangsa penyerapan tenaga kerja dari sektor formal. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kaltim, persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor formal pada bulan Februari 2025 mencapai 53,08%, lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja yang bekerja di sektor informal sebesar 46,92% (Grafik VI.3). *Share* pekerja di sektor formal di tahun 2025 tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar

55,33%. Hal tersebut sejalan dengan penurunan pekerja di sektor konstruksi dan administrasi pemerintahan. Meski demikian, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, proporsi pekerja formal di Kalimantan Timur merupakan yang tertinggi di antara Kalimantan lainnya (Grafik VI.4). Selain itu, tingginya pangsa tenaga kerja yang berstatus sebagai karyawan yang mencapai 53,08% (Tabel VI.3) juga turut terindikasi sebagai penyebab lebih tingginya proporsi pekerja formal terhadap pekerja informal di Kaltim dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan.

Grafik VI.3 Tenaga Kerja Kaltim Berdasarkan Sektor Formal dan Informal



Grafik VI.4 Perbandingan Proporsi Tenaga Kerja Formal dan Informal Seluruh Provinsi di Kalimantan



Tabel VI.3 Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltim

Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Usaha	Februari 2024	Februari 2025	Pertumbuhan		Pangsa
			Orang	%	%
Berusaha Sendiri	421.138	436.690	15.552	3,69	21,73%
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	188.586	219.902	31.316	16,61	10,94%
Berusaha dibantu buruh tetap	72.305	78.845	6.540	9,05	3,92%
Buruh/Karyawan	934.044	988.047	54.003	5,78	49,16%
Pekerja bebas di pertanian	28.948	19.845	(9.103)	-31,45	0,99%
Pekerja bebas di non pertanian	49.935	57.459	7.524	15,07	2,86%
Pekerja keluarga/tak dibayar	199.038	209.902	10.864	5,46	10,44%
Total	1.808.972	2.009.990	201.018	11,11	100,00%

Sumber : BPS, diolah

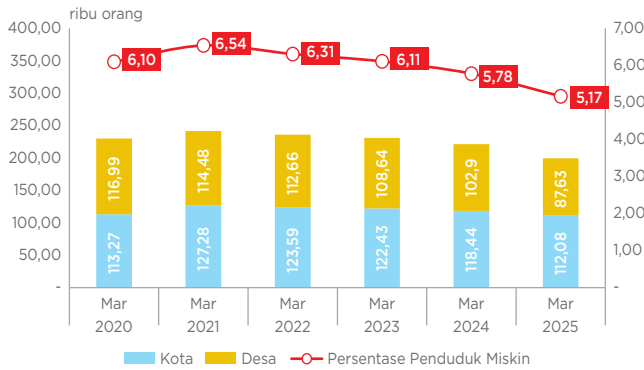
6.3. KESEJAHTERAAN

Kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik turut memberikan dampak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut yang terlihat dari penurunan jumlah penduduk miskin baik di perkotaan maupun perdesaan serta semakin rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan. Jumlah penduduk miskin di Kaltim pada Maret 2025 tercatat sebanyak 199,71 ribu orang, dimana 56% di antaranya atau sebanyak 112,08 ribu orang di perkotaan dan 44% lainnya atau sebanyak 87,63 ribu orang berada di perdesaan. Sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin tersebut, tingkat kemiskinan di Kaltim pada Maret 2025 juga tercatat lebih rendah, yakni dari sebesar 5,78% di Maret 2024 menjadi 5,17% pada Maret 2025 (Grafik VI.5). Lebih lanjut, ketimpangan pendapatan di Kalimantan Timur juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari

rasio gini¹ Kalimantan Timur yang mencatatkan penurunan dari 0,321 pada Maret 2024 menjadi 0,312 pada Maret 2025. Angka tersebut juga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan rasio gini nasional yang pada periode laporan tercatat sebesar 0,375. Meskipun demikian, rasio gini Kaltim tercatat mencatatkan urutan tertinggi kedua setelah Kalimantan Barat jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Kalimantan (Grafik VI.6). Dengan derajat ketimpangan yang menurun ini mengindikasikan kesejahteraan yang lebih merata di tengah indikator lain yang juga menunjukkan perbaikan seperti partisipasi angkatan kerja yang meningkat serta tingkat kemiskinan yang menurun.

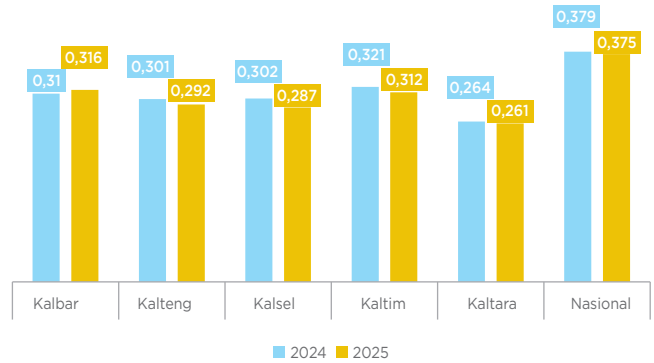
1. Rasio gini menunjukkan ketimpangan pendapatan di sebuah wilayah. Sebuah wilayah dikategorikan mengalami ketimpangan pendapatan ketika angka rasio gini mendekati 1. Sebaliknya, semakin mendekati 0 maka perbedaan pendapatan antara golongan berpendapatan tertinggi dan terendah semakin kecil.

Grafik VI.5 Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Timur



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.6 Perbandingan Rasio Gini Seluruh Provinsi di Kalimantan

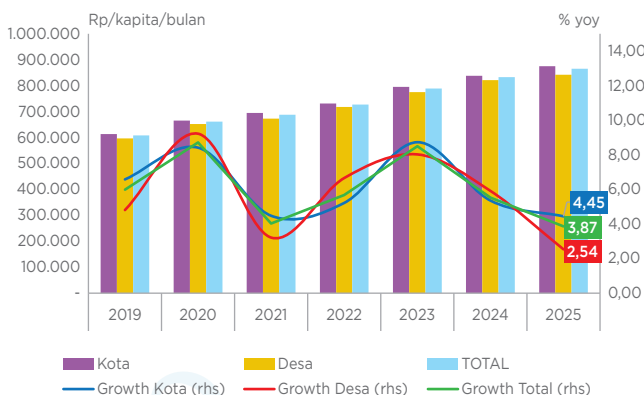


Sumber: BPS, diolah

Di sisi lain, Garis Kemiskinan (GK) mengalami peningkatan. Garis Kemiskinan di Kaltim pada periode Maret 2025 tercatat sebesar Rp876.210/kapita/bulan, meningkat 4,45% (yoy) dibandingkan periode maret di tahun sebelumnya yakni sebesar Rp838.902/kapita/bulan. Peningkatan garis kemiskinan tersebut terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Peningkatan GK di wilayah perkotaan mencapai sebesar 4,45% (yoy), lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan yang meningkat sebesar 2,54% (yoy) (Grafik VI.7). Berdasarkan komponennya, peningkatan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) lebih tinggi dibandingkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM), dimana GKNM meningkat sebesar 4,61% (yoy) atau dari Rp243.384/kapita/bulan menjadi Rp254.609/kapita/bulan, sementara GKM meningkat sebesar 3,56% (yoy) atau dari Rp590.571/kapita/bulan menjadi Rp611.584/kapita/bulan (Grafik VI.8).

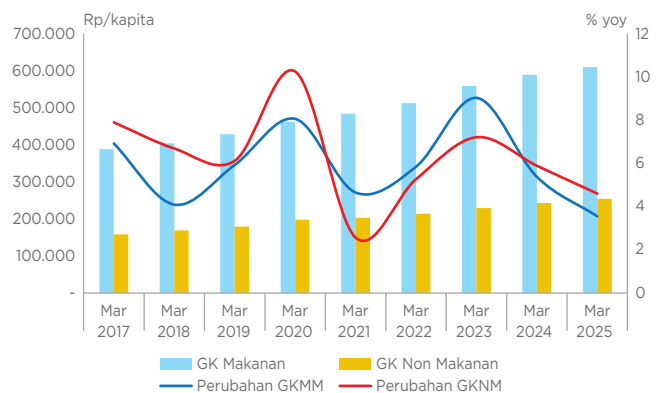
Komoditas terbesar penyumbang peningkatan GKM di perkotaan dan perdesaan adalah komoditas beras dan rokok kretek filter, sementara itu, komoditas non makanan terbesar adalah perumahan, bensin, dan listrik. Komoditas beras merupakan penyumbang terbesar GKM di perkotaan dan perdesaan masing-masing sebesar 69,81% dan 72,51%. Hal tersebut tidak terlepas dari besarnya kebutuhan akan beras sebagai makanan pokok di tengah harganya yang semakin tinggi yang terindikasi dari komoditas penyumbang inflasi triwulan II 2025 secara *year-on-year* salah satunya ialah beras. Selain itu, rokok kretek filter menjadi komoditas penyumbang GKM makanan terbesar kedua setelah beras, baik di perkotaan (bobot 10,32%), maupun perdesaan (bobot 14,11%) (Tabel VI.4). Sama seperti beras, kontribusi rokok sebagai komoditas GKM sejalan dengan tingginya konsumsi rokok di tengah harganya yang semakin meningkat seiring penyesuaian

Grafik VI.7 Garis Kemiskinan Kalimantan Timur



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.8 Pertumbuhan GKM dan GKNM



Sumber: BPS, diolah

Tabel VI.4 Persentase Komoditas Makanan terhadap GKM

Perkotaan		Pedesaan	
Komoditi Makanan	%	Komoditi Makanan	%
Beras	69,81	Beras	72,51
Rokok kretek filter	10,32	Rokok kretek filter	14,11
Daging ayam ras	5,24	Telur ayam ras	4,56
Telur ayam ras	4,56	Daging ayam ras	4,16
Mie instan	2,74	Mie instan	2,93
Tongkol/tuna/cangkalang	2,55	Gula Pasir	2,47
Bawang merah	2,01	Bawang merah	1,96
Gula pasir	1,87	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,81
Kue basah	1,81	Tongkol/tuna/cangkalang	1,77
Cabe rawit	1,73	Cabe rawit	1,63
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,68	Tempe	1,46
Tempe	1,63	Kue basah	1,31
Tahu	1,55	Tahu	1,25

Sumber: BPS, diolah

harga pasca peningkatan cukai produk tembakau di awal tahun. Sementara itu, komoditas utama penyumbang GKNM adalah perumahan sebesar 11,27% di perkotaan dan 11,97% di pedesaan, diikuti bensin sebesar 3,45% di perkotaan dan 3,47% di pedesaan, serta listrik sebesar 3,43% di perkotaan dan 2,41% di pedesaan, yang merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat (Tabel VI.5).

Tingkat kesejahteraan petani mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya namun lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. NTP Kaltim pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 144,75 lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni 136,48, namun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 148,93. Penurunan NTP disebabkan

Tabel VI.5 Persentase Komoditas Nonmakanan terhadap GKNM

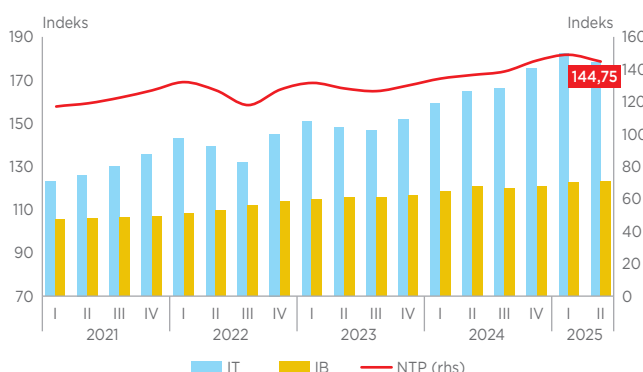
Perkotaan		Pedesaan	
Komoditi Bukan Makanan	%	Komoditi Bukan Makanan	%
Perumahan	11,27	Perumahan	11,97
Bensin	3,45	Bensin	3,47
Listrik	3,43	Listrik	2,41
Pendidikan	2,35	Perlengkapan mandi	1,38
Air	1,70	Pendidikan	1,05
Perlengkapan mandi	1,42	Air	0,94
Perawatan kulit, muka, kuku, dan rambut	0,83	Sabun cuci	0,76
Pakaian jadi perempuan dewasa	0,63	Perawatan kulit, muka, kuku, dan rambut	0,70

Sumber: BPS, diolah

karena Indeks Harga yang Diterima Petani (It) turun sebesar -2,39 persen, sebaliknya Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) naik sebesar 0,47 persen (Grafik VI.9).

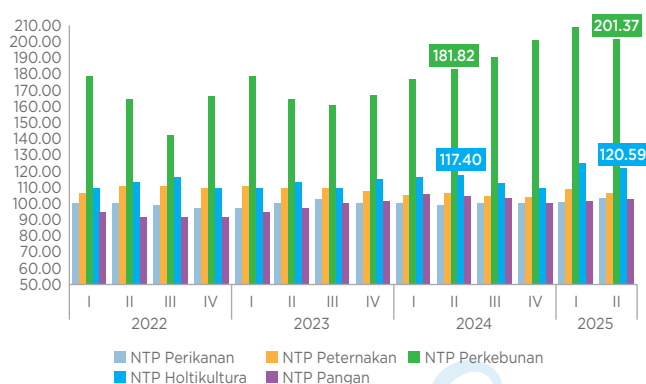
Jika ditinjau NTP berdasarkan sub-lapangan usaha, penurunan NTP terbesar bersumber dari sub-lapangan usaha Perkebunan dan Hortikultura. NTP pada sub-lapangan usaha Perkebunan dan hortikultura pada triwulan II 2025 tercatat secara berturut-turut sebesar 209,43 dan 116,86 lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 210,58 dan 127,27 (Grafik VI.10). Penurunan tersebut tidak terlepas dari periode musiman panen raya yang membuat harga komoditas mengalami penurunan.

Grafik VI.9 Perkembangan NTP, IT, dan IB Kaltim



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI. 10 Perkembangan NTP Sub Sektor Pertanian



Sumber: BPS, diolah



Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 7

Prospek Perekonomian Daerah



RINGKASAN EKSEKUTIF

- Di tengah perlambatan ekonomi global imbas perluasan tarif resiprokal AS, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada 2025 diperkirakan tetap tumbuh di bawah titik tengah kisaran 5,00 – 5,80% (yoy). Faktor penahan pertumbuhan ekonomi tersebut utamanya masih dipengaruhi oleh permintaan ekspor batu bara yang relatif stagnan, termoderasinya proyek pemerintah dan IKN. Kendati demikian, LU industri pengolahan diperkirakan semakin membaik seiring mulai beroperasinya sejumlah kilang *refinery* migas dan semakin ekspansifnya industri CPO.
- Seiring dengan meredanya tekanan inflasi global dan stabilnya nilai tukar Rupiah, Inflasi tahunan Kaltim di tahun 2025 diperkirakan tetap berada dalam koridor target dikisaran $2,5 \pm 1\%$ (yoy) disertai dengan upaya pengendalian inflasi yang konsisten dan intensif untuk mencapai stabilitas harga komoditas utama di Kaltim.



7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI

Prospek Perekonomian Global dan Domestik

Prospek perekonomian global berpotensi melambat seiring dengan meluasnya implementasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). AS telah memperluas tarif resiprokal terhadap 44 negara menjadi 70 negara sejak Agustus 2025, dengan tarif kepada sebagian negara seperti India dan Swiss lebih tinggi dari pengumuman semula. Dampak perluasan tarif tersebut diperkirakan akan menimbulkan risiko terhadap pelemahan ekonomi dunia (Tabel VII.1). Prospek ekonomi di AS diperkirakan akan lebih rendah sejalan dengan melemahnya permintaan di domestik. Begitu pula dengan India yang melemah terutama dipengaruhi oleh dampak tarif AS yang menahan kinerja ekspor dan manufaktur. Sementara itu, ekonomi di Eropa, Jepang, dan Tiongkok diperkirakan lebih baik seiring kesepakatan tarif yang lebih rendah serta didukung oleh ekspansi belanja fiskal.

Seiring kinerja ekspor yang masih positif, serta ekspansi belanja pemerintah yang berpotensi dapat mengakselerasi permintaan domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada di atas titik tengah kisaran 4,60-5,40% (yoy). Pada semester II 2025, kinerja ekspor

diprakirakan masih tetap positif diiringi dengan permintaan global yang masih tetap tinggi. Kinerja ekspor tersebut didukung oleh nilai tukar Rupiah yang relatif stabil dan cenderung menguat hingga agustus 2025, ditopang oleh bauran kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dalam menjaga aliran modal asing, terutama ke SBN, yang disertai penguatan kebijakan terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Di sisi lain, permintaan domestik juga diperkirakan akan kembali menguat sejalan dengan ekspansi belanja pemerintah melalui program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sesuai kapasitas perekonomian nasional. Prospek permintaan domestik tersebut tercermin dari membaiknya Indeks ekspektasi konsumen 6 bulan ke depan dari 128,98 di bulan Juni 2025 menjadi 129,61 di bulan Juli 2025. Selain itu, *prompt manufacturing index* (PMI) juga diperkirakan masih ekspansif sebesar 50,89% pada triwulan II 2025, meskipun sedikit melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 51,67%, dengan ekspektasi meningkat di triwulan III 2025 sebesar 50,89%. Dengan melihat prospek tersebut, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi domestik di 2025 tumbuh positif (Tabel VII.1) dengan koreksi dikisaran 4,60-5,40% (yoy).

Tabel VII.1 Proyeksi Pertumbuhan Global dan Domestik

Insitusi	PDB Global (% ,yoy)			
	2024	2025 *	2025 **	
Dunia	3,2	3,0	3,0	➡
Negara Maju	1,7	1,6	1,6	➡
Amerika Serikat	2,8	2,1	2,0	⬇️
Kawasan Eropa	0,7	1,0	1,0	➡
Jepang	0,1	0,9	1,0	⬆️
Negara Berkembang	4,2	3,9	4,0	⬆️
Tiongkok	5,0	4,3	4,6	⬆️
India	6,6	6,5	6,5	➡
ASEAN-5	4,8	4,5	4,4	⬇️
Amerika Latin	2,1	2,1	1,9	⬇️
Negara Berkembang Eropa	2,8	2,1	2,1	➡
Timur Tengah & Asia Tengah	2,7	3,3	3,4	⬆️

Sumber: World Economic Outlook, *Estimasi BI Mei 2025

**Estimasi BI Agustus 2025

Insitusi	PDB Nasional (% ,yoy)			
	2024	2025 *	2025 **	
Anggaran	5,2	5,2	5,2	➡
Bank Indonesia	4,7-5,5	4,7-5,5	4,6-5,4	⬇️
Konsensus (Juli 2025)	5,0	5,0	4,8	⬇️
IMF (WEO, April 2025)	5,0	5,1	4,7	⬇️
ADB (April 2025)	5,0	5,0	5,0	➡

Keterangan:

⬆️ Naik dari tahun sebelumnya

➡ Tetap / on-track

⬇️ Turun dari tahun sebelumnya

Prospek Perekonomian Kaltim

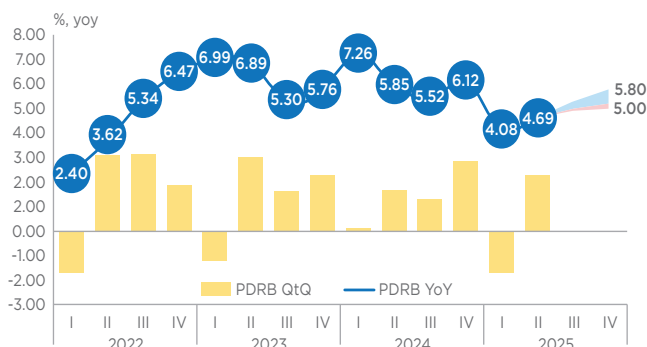
Meskipun terjadi perlambatan permintaan dari mitra ekspor strategis dan termoderasi proyek konstruksi IKN, prospek perekonomian Kaltim pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh melambat di kisaran 5,00% - 5,80% (yoy) (Grafik VII.1). Perlambatan tersebut utamanya disebabkan oleh termoderasinya pertumbuhan LU Pertambangan yang tercermin dari target produksi batu bara tahun 2025 yang tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan penurunan permintaan batu bara Tiongkok dan India seiring dampak dari perang tarif dagang dengan AS serta kebijakan domestik terkait optimalisasi produksi dalam negeri dan transisi menuju energi terbarukan. Selain itu, LU Konstruksi diperkirakan melambat seiring prakiraan progres IKN yang termoderasi akibat pagu anggaran pembangunan IKN untuk keseluruhan tahun 2025 mengalami kontraksi sekitar 45% (yoy). Kendati demikian, perbaikan kinerja Industri Pengolahan yang didorong oleh ekspansi industri CPO mulai beroperasinya sejumlah pabrik refinery di Kalimantan Timur menjadi faktor utama penahan perlambatan ekonomi Kalimantan Timur secara lebih dalam.

Meskipun permintaan domestik diperkirakan masih tinggi, imbas perluasan tarif resiprokal AS terhadap ekonomi negara mitra strategis, terutama Tiongkok dan India, menahan kinerja LU pertambangan secara keseluruhan. Permintaan

domestik terhadap batu bara diperkirakan masih cukup tinggi seiring konsumsi listrik yang tinggi, yang tercermin dari target DMO dari Kementerian ESDM di 2025 sebesar 239,7 juta ton yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 181,3 juta ton. Kendati demikian, realisasi permintaan batu bara dari negara mitra dagang utama hingga triwulan II 2025 masih jauh lebih rendah dibandingkan prakiraan sebelumnya, utamanya dari Tiongkok. Salah satu penyebab permintaan yang stagnan tersebut akibat perlambatan sektor manufaktur Tiongkok imbas dari perang tarif antara AS dan Tiongkok. Adapun permintaan ekspor batu bara jenis thermal dari India untuk pasokan PLTU diperkirakan melambat seiring upaya dari negara tersebut untuk mengoptimalkan produksi domestik. Penurunan permintaan dari India tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang tidak memperpanjang kewajiban campuran batu bara impor dan domestik sejak Oktober 2024.

LU konstruksi diperkirakan melambat dari tahun sebelumnya dengan bias bawah dari prakiraan sebelumnya seiring termoderasinya proyek konstruksi sektor pemerintah dan IKN. Meskipun blokir anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) untuk pembangunan IKN telah dibuka serta telah disetujuinya penambahan anggaran OIKN di akhir triwulan II, pagu anggaran pembangunan IKN untuk keseluruhan tahun 2025 masih terkontraksi sekitar 40% (yoy), yakni dari Rp40T menjadi Rp24T¹⁰. Adapun berdasarkan BCI Asia, distribusi nilai proyek konstruksi di keseluruhan tahun 2025 telah diperkirakan sebesar Rp43,5T, terkontraksi 44,2% (yoy) dan melambat dibandingkan pertumbuhan nilai proyek konstruksi di tahun sebelumnya sebesar 63% (yoy). Kendati demikian, perlambatan LU konstruksi masih tertahan seiring pembangunan sejumlah proyek konstruksi swasta yang telah berlangsung di triwulan II 2025, terutama di daerah Bontang.

Grafik VII.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kaltim 2025



10. Asumsi anggaran OIKN per triwulan II 2025 sebesar 13 triliun rupiah.

Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya didorong oleh industri CPO yang semakin ekspansif serta mulai beroperasinya sejumlah pabrik *refinery* di Kalimantan Timur. Kinerja industri pengolahan CPO diperkirakan akan meningkat seiring perbaikan produktivitas TBS seiring dengan kondisi iklim yang relatif akan lebih kondusif ke depan. Selain itu, konstruksi sejumlah fasilitas *refinery* migas, termasuk *revamp* kapasitas, telah mulai beroperasi sehingga menjadi faktor pendorong produksi di semester II meskipun terdapat penurunan prognosa lifting minyak bumi dan gas bumi yang berkontraksi dari target di 2025 berturut-turut 6,7% (yoy) dan 5,6% (yoy).

7.2. PROSPEK INFLASI

Seiring dengan perlambatan ekonomi dunia dan meredanya inflasi global, dampak terhadap nilai tukar dan inflasi di domestik diperkirakan masih terkendali dan cenderung mereda. Kecenderungan perlambatan ekonomi global sebagai imbas dari perluasan tarif resiprokal AS diperkirakan akan menurunkan tekanan inflasi global dibandingkan tahun sebelumnya. Tekanan inflasi di AS sendiri diperkirakan mereda dipengaruhi oleh menguatnya ekspektasi penurunan *Fed Fund Rate* (FFR) ke depan. Ditopang dengan intervensi bauran kebijakan dalam menjaga aliran modal asing, potensi dampak dari rambatan global

terhadap *imported inflation* dan nilai tukar Rupiah juga relatif terkendali. Terkendalinya dampak rambatan global terhadap inflasi dan nilai tukar tercermin dari proyeksi inflasi di 2025 yang relatif mereda dibandingkan prakiraan sebelumnya (Tabel VII). Meskipun demikian, dalam jangka pendek ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlanjut tetap perlu diwaspadai guna mengantisipasi dampak rambatan global lanjutan terhadap perekonomian domestik, terutama terhadap beberapa komoditas VF dan CI yang berpotensi terdampak akibat pengaruh harga komoditas global seperti emas, energi dan komoditas pangan.

Inflasi di Kaltim untuk keseluruhan 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan inflasi pada tahun 2024 terutama didorong oleh kelompok CI dan VF seiring pengaruh harga komoditas global (Grafik VII.2). Tingkat inflasi yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya terjadi seiring dengan meningkatnya tekanan inflasi kelompok VF (aneka cabai, komoditas hortikultura) yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca pada daerah sentra (khususnya Jawa Timur dan Sulawesi) maupun Kalimantan Timur yang mengalami kondisi cuaca yang kurang stabil dengan indikasi curah hujan 200-500 mm per bulan menurut BMKG. Selain itu, upaya pemerintah dalam percepatan implementasi program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) turut mendorong kenaikan permintaan pakan ternak dan ayam. Lebih lanjut kenaikan harga emas perhiasan yang diakibatkan kenaikan harga emas dunia turut meningkatkan laju inflasi yang lebih tinggi pada CI. Adapun, tekanan pada kelompok AP relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seiring dengan diskon tarif Listrik yang cukup signifikan pada bulan Januari-Februari 2025, serta penurunan tarif angkutan udara saat HBKN Idul Fitri yang juga disertai penambahan rute dan jadwal maskapai baru.

Dalam upaya mencapai sasaran inflasi 2025 dan mengantisipasi potensi inflasi ke depan, berbagai inovasi dan kebijakan pengendalian inflasi di Kaltim terus diimplementasikan secara masif dan

Tabel VII.2 Proyeksi Inflasi Global dan Domestik

Insitusi	Inflasi (% , yoy)			
	2024	2025*	2025**	
Anggaran	2,8	2,5	2,5	➡
Bank Indonesia	2,5±1	2,5±1	2,5±1	➡
Proyeksi Konsensus (Juli 2025)	2,3	2,2	1,8	⬇
IMF (WEO, April 2025)	2,5	2,5	1,7	⬇
ADB (April 2025)	2,8	2,8	1,8	⬇

Sumber: World Economic Outlook, * Estimasi Mei 2025, * Estimasi Agustus 2025

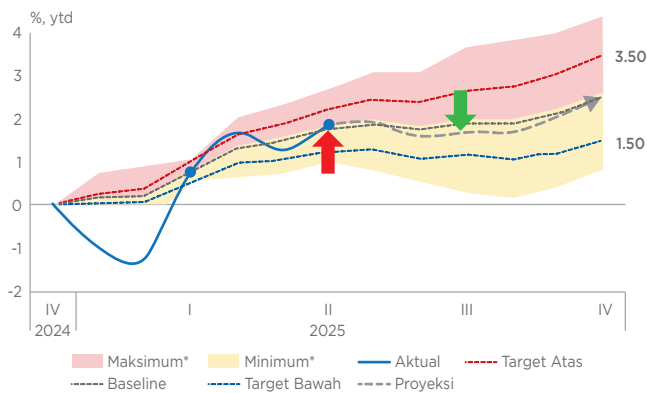
Keterangan:

⬆ Naik dari tahun sebelumnya

➡ Tetap / on-track

⬇ Turun dari tahun sebelumnya

Grafik VII.2 Proyeksi Inflasi Kaltim 2025



Keterangan:

*) berdasarkan historis 5 tahun terakhir

konsisten oleh TPID Kaltim. Beberapa program kerja TPID yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kestabilan inflasi yang rendah dan stabil terutama bahan pangan strategis dalam kerangka GNPIP diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menjaga **ketersediaan pasokan**, dapat dilakukan dengan melanjutkan pemantauan dan monitoring harga serta sidak pasar, terutama pada komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan, seperti aneka cabai, bawang merah, dan perikanan. Selanjutnya, mendorong implementasi penggunaan bibit unggul dan optimalisasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas komoditas strategis meliputi beras, aneka cabai dan bawang merah, melakukan penguatan data neraca pangan Provinsi Kaltim dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan pasokan termasuk program KAD dengan daerah sentra. Dan terakhir, melakukan penguatan data neraca pangan Provinsi Kaltim dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan pasokan termasuk program KAD dengan daerah sentra.
2. Guna menciptakan **keterjangkauan harga**, dapat dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) seperti Operasi Pasar, Sidak Pasar khususnya untuk komoditas strategis dengan tetap memperhatikan margin keuntungan yang wajar bagi petani dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha tani. Selanjutnya, optimalisasi peran tim teknis TPID dalam melakukan pemantauan harga dan ketersediaan pasokan melalui Tim *Early Warning System* (EWS) Kaltim. Terakhir, melakukan penyusunan rencana pengendalian inflasi baik skenario peningkatan harga maupun penurunan harga, dalam rangka menjaga laju inflasi dalam kisaran target $2,5 \pm 1\%$ (yoy).
3. Dalam rangka memastikan **kelancaran distribusi**, TPID dapat dilakukan dengan melanjutkan pemantauan kelancaran jalur-jalur distribusi utama baik dari ketersediaan bahan bakar dan kesiapan infrastruktur jalan maupun ketersediaan bahan bakar.
4. Dalam rangka memperkuat **komunikasi efektif**, perlu menjaga konsistensi dan kesinambungan pelaksanaan koordinasi melalui *High Level Meeting* maupun Rapat Koordinasi secara berkala dan konsisten dalam rangka *monitoring* dan evaluasi pengendalian inflasi termasuk keterlibatan Forkopimda. Selanjutnya, melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat bahwa penting untuk bijak berbelanja dan mendorong gerakan tanam di pekarangan rumah untuk komoditas penyumbang inflasi, utamanya melalui *platform media social*. Dan terakhir, optimalisasi peran kepala daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menjaga ekspektasi dan belanja masyarakat.



Halaman ini sengaja dikosongkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada Pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Dana Pihak Ketiga (DPK).

Dana yang dihimpun perbankan dari masyarakat, yang berupa giro, tabungan atau deposito.

Ekspor-Import

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar provinsi.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Inflasi

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (*persistent*).

Liaison

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

Month to Month (mtm)

Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Non-Performing Loan (NPL)

Kredit/pembiayaan yang bermasalah atau nonlancar yang terdiri dari kredit dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan nilai PDRB atas harga konstan dalam suatu periode tertentu (triwulanan atau tahunan).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.

Year on Year (yoy)

Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.



Tim Penyusun Laporan

Penanggung Jawab:

Budi Widihartanto - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim

Editor:

Bayuadi Hardiyanto - Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim

Azhari Novy Sucipto - Ekonom Senior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim

Tim Penulis:

- **Bab I – Perkembangan Makro Ekonomi Daerah**

Raisa Adilla – Ekonom Yuniior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim

BOKS 1 – Mendukung Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Iklim
Investasi Kalimantan Timur

Shindy Almandasari – Ekonom Yuniior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim

- **Bab II – Keuangan Pemerintah di Daerah**

Rama Sumanta – Analis Yuniior Kantor Perwakilan BI Balikpapan

- **Bab III – Perkembangan Inflasi Daerah**

Rosa Diwanegara – Ekonom Yuniior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim

- **Bab IV – IV. Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM**

Shindy Almandasari – Ekonom Yuniior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim

- **Bab V – Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah**

Fenylia Nurshakira Putri Kusuma – Analis Yuniior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim

- **Bab VI – Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan**

Rosa Diwanegara – Ekonom Yuniior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim

- **Bab VII – Prospek Perekonomian Daerah**

Faizal Rahman – Ekonom Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim

Tim Pengolah Data:

- Raisa Adilla – Ekonom Yuniior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim
- Shindy Almandasari – Ekonom Yuniior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim
- Rosa Diwanegara – Ekonom Yuniior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim
- Fathia Nisa - Analis Yuniior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim
- Desy Sofita – Pelaksana Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim



Halaman ini sengaja dikosongkan

**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Gajah Mada No. 1 SAMARINDA 75122

Telp. 0541 -741022, Fax. 0541 -732644

www.bi.go.id

